

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

EDISI # 04 Januari 2021

<https://infoindonesia.id>

VAKSINASI DIMULAI, COVID 19 SELESAI ...

**RESHUFFLE KABINET
MENYELAMATKAN
EKONOMI & KESEHATAN**

**POLITIK TOILET
DI TEMPAT PIKNIK**

**Iti Octavia Jayabaya
PEREMPUAN PERKASA
DARI LEBAK**



Rp. 90.000 - Jabonisk
Rp. 75.000 - Luar Pabrik

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

PENDIRI

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

DIREKTUR

Usman Rizal

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rio Taufiq Adam, Andika Salahudin

REDAKTUR

Andyanto

REPORTER

Dian Taressa, Desi Wulandari, Anugrah Dany,
Abu Bakar Usman

EDITOR & GRAFIS

Al Amin

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Hesti Dimalia

KEUANGAN

Dra Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Sri Astuti

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia
BCA : No Rek : 553-014-4321
KCP Otista Jakarta Timur

2021

Suram memang. Ini soal kondisi ekonomi di kala pandemi yang belum berhenti. Adakah harapan untuk masa depan, setidaknya pada 2021?

Kajian perwakilan Bank Dunia di Jakarta, misalnya, menyebutkan ekonomi Indonesia terdampak parah selama kuartal kedua pada 2020 lalu akibat pembatasan ruang gerak dan kebijakan kesehatan publik lainnya untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Masih dalam kajian Bank Dunia, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mulai kembali membaik pada 2021 dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada peningkatan ekonomi secara perlahan pada 2021 diikuti pembukaan lebih lanjut dan dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan akan kembali naik ke 4,4 persen pada 2021. Namun, lembaga ini menambahkan, pendorong pertumbuhan ini adalah pemulihan konsumsi swasta. Perkiraan ini juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat, dan hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah berkat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai. Pertumbuhan ekonomi akan naik lagi menjadi 4,8 persen pada 2022.

Toh proyeksi Bank Dunia masih lebih rendah dari harapan pemerintah yang menyebut pertumbuhan pada 2021 akan mencapai target 4,5-5 persen. Selisih proyeksi ini terkait dengan ketidakpastian yang sangat tinggi dalam penanganan pandemi Covid-19. Semakin tinggi keberhasilan penanganan pandemi, potensi pertumbuhan pun akan lebih meningkat.

Sebaliknya, jika penanganan Covid-19 kurang optimal hasilnya, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhan yang berat. Malah Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan dapat merosot menjadi 3,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022 di bawah skenario buruk (*downside scenario*) pengetatan ruang gerak warga dan pembatasan sosial yang sulit terlaksana di Indonesia, pertumbuhan global yang lebih lemah dan harga komoditas yang berarti neraca maupun volume impor dan ekspor kita.

Dari proyeksi buruk Bank Dunia itu kita mudah memahami mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan fokus pemerintah untuk 2021 ini adalah penanganan Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk yang sulit memahami ekonomi makro, dinamika politik belakangan ini dapat menjadi petunjuknya: bongkar-pasang kabinet.

Semuanya akan menjadi bahasan lebih mendalam di halaman-halaman selanjutnya pada edisi kali ini. Selamat membaca...●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

JL. Raya Kalibata No. 8, Jakarta Selatan 12750
Telp / Fax : 021-79196781 / 021-79196786

Twitter : @infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
JANUARI
2021



06 INFO UTAMA

Bagaimana perekonomian Indonesia pada 2021? Banyak pihak sepakat penanganan Covid-19 akan sangat menentukan. Rinciannya saja yang berbeda-beda.



30 INFO EKONOMI

Saat virus corona masih jadi tanda tanya kapan mereda, bisnis batu bara nasional tampak menyala-nyala. Sejumlah kebijakan menunjukkan batu bara menjadi andalan untuk pemasukan devisa manakala kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri melonggar.



44 INFO SUMSEL

Palembang dan Sumatera Selatan memiliki ikon baru: Jembatan Musi 6. Semoga saja bertahan sesuai dengan proyeksi minimal 50 tahun penggunaan.

88 INFO SELEBRITI

Sejumlah pesohor hadir di acara yang kabarnya merupakan ulang tahun pengusaha Ricardo Gelael. Beberapa dari mereka malah memuat foto-foto kerumunan dalam pesta yang disebut-sebut berlangsung di Home Gelael, kawasan Prapanca, Jakarta Selatan.





64 INFO KOTA WARINGIN

Sudah 10 tahun Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Supian Hadi mengabdikan untuk masyarakat. Jabatannya sebagai orang nomor satu di kabupaten akan ditanggalkan pada Februari mendatang. Sejumlah pencapaian pun diraih dari hasil kerja keras.



68 INFO ISTANA

Setidaknya dua kali sudah isu pergantian personel alias reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju berembus: Juli dan Agustus 2020. Akhirnya terjadi juga pada akhir tahun.



80 INFO WISATA

Apa yang salah dengan menyual kualitas toilet dalam konteks pariwisata? Malah jika merasa tersinggung, boleh jadi ia kurang piknik. Toilet adalah tempat yang paling menjadi idaman ketika desakan buang air seni, apalagi buang air besar datang. Bukankah demikian bahkan ketika bersenang-senang di tempat wisata?

- 3 DARI REDAKSI
- 18 INFO NUSANTARA
- 26 INFO PROFIL
- 52 INFO JAMBI
- 56 INFO JATENG-JATIM
- 60 INFO BANTEN
- 68 INFO ISTANA
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 90 INFO KHUSUS
- 98 KAJI



Suasana sepi di Pelabuhan Tanjung Priok.

COVID-19 DULU, EKONOMI KEMUDIAN

Bagaimana perekonomian Indonesia pada 2021?

Banyak pihak sepakat penanganan Covid-19 akan sangat menentukan. Rinciannya saja yang berbeda-beda.

Yang optimistik biasanya pemerintah. Namun, kali ini, optimisme pemerintah soal perekonomian nasional pada 2021 tampaknya harus tunduk pada syarat dan ketentuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, misalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi mulai positif pada 2021. "Pada 2021 ini mulai terjadi pemulihan ekonomi," ungkap Menteri Ani dalam Webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun

2021, Quo Vadis Perempuan Indonesia, Senin, 4 Januari 2021.

Lebih dari itu, ia juga merinci perkiraan proyeksi pertumbuhannya. Menurut dia, pada Maret-April 2021 diproyeksi berkisar 4,5-5,5 persen. Begitu pula pada Mei-Juni 2021, ekonomi diprediksi bertahan di level 4,5-5,5 persen.

Selanjutnya, masih kata Menteri Ani pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus lima persen pada September-Oktober 2021. Lalu, ekonomi diprediksi



Wisatawan wajib bermasker.

menetap di level lima persen pada Desember 2020.

Namun, proyeksi ini memang ada syarat dan ketentuannya. "Sangat bergantung dengan momentum pemulihan yang sedang terjadi. Ini bisa dijaga (jika) tanpa penyebaran covid-19 dan dari sisi vaksinasi," tutur Ani.

Tegasnya, manakala penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi. Secara tidak langsung, ia juga mengakui penanganan wabah Covid-19 ini sepanjang 2020 (sejak temuan pasien pertama pada awal Maret tahun lalu) berpengaruh signifikan terhadap dinamika ekonomi.

"Kegiatan ekonomi menurun tajam karena untuk bisa menghalangi covid-19 meluas maka dilakukan social distancing atau pembatasan sosial," imbuhnya.

Alhasil, anjloklah pertumbuhan ekonomi, Menurut Menkeu, ekonomi Indonesia pada 2020 berada di kisaran

minus 1,7-2,2 persen. Dengan dua kali minus dalam dua triwulan berturut-turut (kuartal II dan III) pada tahun lalu, Indonesia pun mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak Reformasi 1998.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ekonomi Indonesia kuartal III (Juli-September) 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen dari kuartal III 2019, periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year). Sebelumnya, pada kuartal II (April-Juni) 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

"Dengan posisi ini kalau dibandingkan dengan posisi triwulan III 2019 ekonomi Indonesia triwulan III 2020 secara year on year masih mengalami kontraksi 3,49 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis, 5 November 2020.

Dari perjalanan triwulan ke triwulan, ekonomi Indonesia kuartal III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,05 persen dari kuartal II 2020. Sedangkan angka nominal ekonomi

Indonesia yang tercermin dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III 2020, menurut BPS, mencapai Rp 3.894 triliun berdasar harga yang berlaku, dan Rp 2.720,6 triliun menurut harga patokan 2010.

Apapun, kontraksi atau penyusutan pada kuartal II 2020 yang tercatat 5,05 persen ternyata turun menjadi 3,49 persen. "Terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan, dan ini bisa jadi modal bagus untuk melangkah ke triwulan IV 2020," ujar Kepala BPS Suhariyanto.

Dilema terjadi pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2020. Apakah penyusutan berkurang atau bertambah masih memerlukan analisis mendalam sekitar dua bulan sebelum angka resmi keluar sebagaimana kontraksi kuartal III (Juli-September) 2020 yang baru keluar pada awal November 2020.

Toh pemerintah optimistik juga bahwa kontraksi pada kuartal IV 2020 akan lebih rendah dari kuartal-kuartal

sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kondisi ekonomi Indonesia sudah melewati rock bottom pada kuartal kedua tahun 2020, yakni minus 5,32 persen. Sementara pada kuartal ketiga 2020 menunjukkan tren positif, yaitu minus 3,49 persen.

"Diperkirakan sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita minus 2,2 hingga minus 0,9 persen. Namun kita melihat bahwa di Januari ini atau sepanjang tahun 2021 ini APBN kita didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di angka lima persen," kata Airlangga, Selasa, 5 Januari 2020.

Namun, kontraksi yang menurun ini memang berisiko dalam bentuk peningkatan angka warga yang positif Covid-19. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan kegiatan yang dapat mengabaikan upaya pencegahan terhadap penularan wa-

bah seperti menjauhi kerumunan dan jarak sosial.

Hal ini tercermin dari kekhawatiran dampak libur akhir tahun terhadap peningkatan Covid-19 karena begitu banyak kegiatan ekonomi seperti pariwisata dan transaksi belanja untuk merayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Memang, kuncinya adalah pergerakan (mobilitas) kegiatan ekonomi bersesuaian dengan keberhasilan mencegah peningkatan jumlah warga yang terpapar wabah Covid-19.

Banyak yang berharap vaksinasi akan menjadi jawaban terhadap risiko tancap gas di bidang ekonomi. Dengan vaksinasi Covid-19 yang meluas, muncul harapan ekonomi tumbuh lebih baik beriringan dengan penurunan warga yang terkena Covid-19. Toh masih perlu waktu untuk melihat fakta sebenarnya.

Terlebih, saat ini dinamika pandemi Covid-19 di berbagai negara, seperti Inggris, telah muncul strain baru. Sejumlah negara ASEAN, seperti Thailand khususnya Kota Bangkok, kembali mengambil langkah pengetatan. Begitu pula di Tokyo, Jepang. Namun,

Toh Menko Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu tetap optimistik. Ia menyatakan, sejumlah lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,4 persen. Sedangkan IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sebesar 6,1 persen, dan ADB 5,3 persen.

Meski begitu Airlangga mengakui, optimisme pemerintah harus didorong dengan penanganan Covid-19. Saat ini, 3 juta vaksin sudah dikirim ke berbagai daerah. Diharapkan pertengahan



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Januari 2021 vaksinasi sudah bisa dilakukan secara bertahap.

Dia berharap iklim investasi di Indonesia pada 2021 semakin baik. Alasannya, pertama APBN memberi stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat termasuk peyaluran bantuan sosial. Kedua, masyarakat cukup percaya diri untuk melakukan konsumsi. "Saat ini confident level itu sudah meningkat, konsumsi masyarakat sudah bergerak," kata dia.

Ketiga, pada awal Januari indeks saham gabungan (IHSG) sudah kembali ke level 6.100-an sehingga timbul optimisme. Keempat, rupiah menguat ke level 13.890 per dolar AS pada 4 Januari 2021.

Menurut dia, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur ada di posisi 51,3, dan ini terus konsisten. Masih ada indikator lain, yakni kontainer mulai sulit didapat yang menandakan ekspor Indonesia terus mengalami pelonjakan. "Dasar-dasar ini cukup kuat untuk (secara) fundamental, mengatakan bahwa ekonomi kita pada tahun 2021, dengan berbagai asumsi tersebut, akan lebih baik dibandingkan tahun lalu," tandasnya.

Terkait dengan tancap gas ekonomi dan upaya menahan laju wabah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengakui pemerintah memang masih terus bergulat sambil menjaga perekonomian. Kepala Pusat Penelitian LIPI, Agus Eko Nugroho mengatakan bahwa yang menjadi kabar baik adalah Indonesia sudah mengalami pertumbuhan negatif selama tiga kali sejak 1961. Selama itu pula Tanah Air bisa melewatinya.

Kondisi perekonomian pun diperkirakan bakal membaik pada 2021. Namun, kata dia, pertumbuhan akan sangat bergantung pada vaksin Covid-19.

"Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah bagaimana keberadaan vaksin mempengaruhi aspek konsumsi. Jumlah vaksin yang tersedia akan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan produser," katanya melalui diskusi virtual, Kamis, 17 Desember 2020.

Agus menuturkan bahwa LIPI memiliki simulasi pertumbuhan produk

domestik bruto pada 2021. Jika tanpa vaksin, laju ekonomi berkisar 1,57 persen sampai 2,07 persen.

Namun, Apabila vaksin tersedia sebanyak 30 persen dari kebutuhan, pertumbuhan di antara 2,99 persen sampai 3,49 persen. Ekonomi di angka 3,21 persen sampai 3,70 persen jika vaksin 50 persen.

Terakhir, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 3,53 persen sampai 4,03 persen jika ketersediaan vaksin 80

normal. "Wajar Bank Indonesia kemarin menurunkan suku bunga menjadi 3,75 persen untukantisipasi penurunan laju kredit, sekarang pertumbuhan di bawah 1 persen bahkan kemarin September 0,28 persen, ini harus ditingkatkan," jelasnya.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, setidaknya ada beberapa faktor yang perlu meningkat. Antara lain, angka belanja warga, penyerapan anggaran dan pengeluaran belanja



Menteri Keuangan Sri Mulyani.

persen. "Ini lebih rendah dari beberapa prediksi makro ekonomi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi dan bagaimana menggerakkan ekonomi menjadi faktor yang sangat menentukan," jelas Agus.

Sedangkan Direktur Eksekutif lembaga kajian INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, pandemi Covid-19 masih menghantui kelas menengah untuk melakukan konsumsi. "Dengan segala perkembangan global maupun domestik, kita perkiraan perhitungan di 2020 ini -1,35 persen, dan tahun 2021 itu 3 persen," ujar Tauhid akhir November 2020.

Menurut dia, laju kredit perbankan diprediksi hanya mencapai 5-6 persen dari prediksi normal 9 hingga 11 persen sebab permintaan yang belum

pemerintah, peningkatan investasi, juga gabungan kegiatan ekspor-impor. Dengan peningkatan kegiatan-kegiatan itu, maka penerimaan pajak dan angka PDB secara keseluruhan akan meningkat. Kurs nilai rupiah terhadap mata uang asing juga akan ada pengaruhnya.

Namun, semua dinamika ekonomi itu, sekali lagi, berisiko terhadap peningkatan jumlah warga yang tertular Covid-19, dalam arti penurunan potensi pergerakan ekonomi lantaran masalah kesehatan. Tarik-menarik antara tancap gas di bidang perekonomian dan upaya mengurangi jumlah yang terpapar wabah akan menandai perjalanan ekonomi Indonesia pada 2021. Kita akan lihat faktanya secara bersama-sama. ●

CABAI, TEMPE, DAN BT

Memasuki 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Bantuan Tunai (BT) untuk para penerimanya. Bersamaan dengan itu yang pedas dan gurih terasa langka di pasaran: cabai dan tahu-tempe. Jadi, selain menyangga daya beli masyarakat yang terdampak, rantai pasok pangan perlu perhatian ekstra ketika pandemi Covid-19 masih merajalela.

Serba susah mungkin namanya. Katakanlah penyaluran BT (semula BLT, bantuan langsung tunai) berlangsung lancar tanpa hambatan maupun potongan seperti kasus bantuan sosial yang akhirnya menyeret Menteri Sosial sebel umnya, Juliari Peter Batubara, menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, ketika barang kebutuhan pokok, utamanya pangan semisal cabai, tahu, dan tempe, menjadi mahal, dana BT itu lebih cepat terkuras.

Apapun, Presiden Joko Widodo bergegas meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan BT yang berlangsung di Istana Negara,

Jakarta, pada Senin 4 Januari 2021 itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Namun, acara ini juga melibatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat diikuti dalam jaringan online oleh para penerima lainnya secara virtual hingga tingkat provinsi. Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

"Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai," ujar Presiden saat acara peluncuran.



Presiden menyatakan, bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. "Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang

terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak. "Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST. Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Entah ada kaitannya atau tidak, yang jelas, saat acara berlangsung di Istana, terjadi pula kenaikan harga cabai serta tahu dan tempe. Kenaikan ketiga produk kebutuhan pangan itu kian terasa menjelang ganti tahun 2020 dan awal tahun baru 2021.

Kementerian Pertanian (Kementan) memproyeksikan kenaikan ini akan terus berlanjut hingga awal 2021 mendatang. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per Senin (21/12/2020), harga cabai merah besar rata-rata nasional Rp 59.550 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting Rp 54.050 per kilogram, cabai rawit hijau Rp 55.200 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 58.800 per kilogram.

"Kemungkinan akan naik terus sampai Januari 2021, dan Februari akan mulai turun tapi tetap tinggi," ungkap Kepala Bidang Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan Inti Peritiwi, Selasa, 22 Desember 2020.

Menurut dia, puncak kenaikan tertinggi harga cabai diperkirakan akan terjadi di minggu pertama Januari 2021. Inti menjelaskan, rendahnya produksi cabai dalam negeri membuat pasokan di pasar tak bisa memenuhi tingginya permintaan masyarakat.

"Memang pertanaman cabai itu kurang. Karena kemarin sempat turun

"Bahwa kedelai impor tersebut selain diperuntukkan guna pemenuhan industri tahu dan tempe untuk kualitas II juga dipergunakan untuk proses pakan ternak dan proses pembuatan minyak kedelai serta produk turunan lainnya," ujar Argo.



harganya, kemudian gairah petani pun untuk bertanam jadi rendah karena modal enggak kembali. Jadi Ini multiplier effect dari bulan-bulan lalu petani enggak mau tanam,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Inti, kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah, turut berpengaruh pada produksi cabai. Sebab, tanaman menjadi lebih rentan rusak. “Kemudian petani juga kan jadi sulit panen, karena hujan terus,” imbuh dia.

Toh Kementan mencatat pula, terdapat sejumlah daerah yang saat ini memang sedang panen cabai. “Jadi kami identifikasi ada berapa daerah yang masih panen dan kira-kira berapa yang bisa dipasok ke pasar, sehingga pemerintah bisa bergerak, minimal memperlancar distribusi tersebut,” tu-

pe di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pun sempat mogok produksi sejak 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Para pengrajin tahu dan tempe itu mogok produksi dengan harapan pemerintah mendengar keluhan sehingga mengeluarkan kebijakan agar harga kedelai bisa kembali normal.

Bahkan Satgas Pangan Badan Reserse Kriminal Polri turun tangan menelusur pasokan bahan baku ke gudang-gudang importir kedelai. Ternyata, memang pasokan impor agak langka.

“Polri merespons kelangkaan kedelai di pasar. Apabila ditemukan ada dugaan pidana maka Satgas Pangan akan melakukan penegakan hukum,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021.

Argo menyebut Satgas Pangan Bareskrim Polri sudah mengecek ke gudang-gudang importir kedelai pada Selasa, 5 Januari 2021. Antara lain gudang yang berada di Bekasi yakni PT Segitiga Agro Mandiri. Perusahaan itu bergerak di bidang impor kedelai dari Amerika Serikat dengan kapasitas antara 6-7 ribu ton per bulan.

“Bahwa kedelai impor tersebut selain diperuntukkan guna pemenuhan industri tahu dan tempe untuk kualitas II juga dipergunakan untuk proses pakan ternak dan proses pembuatan minyak kedelai serta produk turunan lainnya,” ujar Argo.

Untuk bahan baku tahu dan tempe, perusahaan di bekasi ini mendistribusikannya ke UMKM di wilayah Jabodetabek dan Bandung, Jawa Barat. Pasokannya mencapai 250-300 ton per hari dan stok tersisa saat ini sebanyak 2.500 ton atau cukup untuk 10 hari ke depan.

Dari hasil kunjungan Satgas Pangan, penyaluran kedelai berlangsung melalui distributor dengan harga saat ini Rp8.600 per kg atau terjadi kenaikan sekitar Rp1.000 sejak pertengahan Desember 2020. “Dari informasi staf perusahaan tersebut, kenaikan harga disebabkan karena selain harga beli di negara asal terjadi kenaikan yang sebelumnya Rp6.800 menjadi Rp8.300 juga disebabkan sejak pertengahan bulan Oktober-Desember 2020, kapal yang langsung tujuan Indonesia sangat ja-



Selain itu, lanjut Inti, kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah, turut berpengaruh pada produksi cabai. Sebab, tanaman menjadi lebih rentan rusak. “Kemudian petani juga kan jadi sulit panen, karena hujan terus,” imbuh dia.

tup dia.

Bagaimana dengan tahu dan tempe? Mengalami kenaikan juga akibat pasokan bahan baku yang langka, sementara bahan baku kedelai sebagian besar merupakan pasokan impor.

Kementerian Perdagangan mencatat harga kedelai impor pada November 2020 masih di angka Rp 9.000 per kilogram. Namun pada Desember 2020 harganya sudah 9.300 hingga Rp 9.600 per kilogram. Terjadi kenaikan bervariasi di kisaran 3,3 persen hingga 6,6 persen karena ada yang membeli melalui koperasi ada juga yang langsung ke distributor.

Sejumlah pengusaha tahu dan tem-

rang sehingga menggunakan angkutan tujuan Singapura,” kata Argo.

Maka, lanjutnya, sering terjadi delayed (penundaan) pasokan lantaran menunggu waktu dalam connecting ke Indonesia. “Sehingga keterlambatan antara dua hingga tiga minggu,” kata Argo.

Kemudian pengecekan kedua dilakukan di PT FKS Mitra Agro di Pasar Kemis Pasir Jaya Cikupa Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan di sana infonya adalah pada 31 Desember 2020, kedelai masuk sebanyak 533,29 ton dan sudah didistribusikan sebanyak 79 ton, sisa stok per 31 Desember

tur tata niaga kedelai sejak 2015. Impor-tasi kedelai untuk kebutuhan pangan dan pakan kini dibebaskan dan dikenai bea masuk nol persen. Kebijakan tersebut memang bisa menjamin ketersediaan pasokan. Namun, memang lebih aman jika produksi lokal itu bisa bertambah agar bisa menekan impor.

Sedangkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan melipatgandakan produksi kedelai dalam negeri dalam waktu setidaknya 200 hari, atau dua kali masa tanam. “Kita coba lipatgandakan. Ini kan membutuhkan 100 hari minimal kalau per tan-

“Kemungkinan akan naik terus sampai Januari 2021, dan Februari akan mulai turun tapi tetap tinggi,” ungkap Kepala Bidang Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan Inti Pertiwi, Selasa, 22 Desember 2020.



2020 sebanyak 474,29 ton.

“Bahwa pada 4 Januari 2021, kedelai masuk sebanyak 460,22 ton dan sudah didistribusikan sebanyak 76 ton, sisa stok per 4 Januari sebanyak 384,22 ton. Sisa stok per tanggal 5 Januari 2021 sebanyak 858,51 ton,” kata Argo.

Selanjutnya di PT Sungai Budi di kawasan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, ditemukan fakta bahwa pada 4 Januari 2021, kedelai masuk sebanyak 400 ton dan sebanyak 300 ton sudah siap didistribusikan ke konsumen sehingga sisa stok saat ini per 5 Januari 2021 ada sebanyak 100 ton.

Sejauh ini pemerintah tak lagi menga-

aman. Dua kali 100 hari bisa kita sikapi secara bertahap sambil ada agenda seperti apa mempersiapkan ketersediaannya. Kita juga bekerja sama dengan kementerian lain,” kata dia.

Jelas sudah dampak pandemi Covid-19 sudah berlipat-lipat di bidang perekonomian. Mulai dari produksi, rantai pasok lokal maupun impor-ekspor yang berskala global.

Jadi bukan sekadar soal BT, bantuan tunai, melainkan juga seperti virus corona penyebab Covid-19 menimbulkan dampak ekonomi mondial. Tapi kebijakan dan tindakan yang tepat di tingkat lokal menjadi syarat utama mengatasi masalahnya. ●

SETEL ULANG EKONOMI GLOBAL

Upaya besar menyetel ulang (Great Reset) ekonomi global menghadapi pandemi Covid-19 mulai meluncur pada akhir Januari 2021 dalam acara Davos Agenda. Konferensi yang melibatkan para pemimpin politik maupun bisnis berskala global ini berlangsung secara digital, sekaligus mengawali pertemuan tahunan World Economic Forum yang mengalami pergeseran waktu dan tempat menjadi Mei 2021 di Lucerne, Swiss. Indonesia perlu mengantisipasi implikasinya.

Siap-siap. Gagasan setel ulang besar-besaran (The Great Reset) adalah proposal World Economic Forum (WEF) untuk membangun kembali ekonomi secara berkelanjutan setelah pandemi COVID-19. Peluncurannya berlangsung pada Mei 2020 oleh Pangeran Charles dari Inggris dan direktur WEF Klaus Schwab.

Gagasan ini berusaha meningkatkan ekonomi global dengan membuat investasi lebih diarahkan pada kemajuan bersama dan lebih fokus pada inisiatif lingkungan. Namun, tanggapan terhadap inisiatif ini rupanya beragam. Malah ada petisi di Kanada untuk menghentikannya memperoleh 80.000 tanda tangan dalam waktu kurang dari 72 jam. Teori konspirasi juga telah menyebar sebagai tanggapan, bahwa konsep itu mengarah ke Tatanan Dunia Baru.

Betapapun kontroversial, dikisi atau pilihan kata reset toh menjadi pusat perhatian banyak tokoh dan pemimpin di dunia. Ini terkait terminologi "The

Great Reset" atau setel ulang besar-besaran yang konsepnya digariskan oleh pendiri sekaligus Executive Chairman World Economic Forum, Klaus Schwab. Program yang diperkenalkan pada Mei 2020 bersama dengan Pangeran Charles ini dianggap sebagai solusi dari persoalan yang terjadi akibat Covid-19.

Ini adalah agenda besar untuk menyetel ulang kapitalisme ekonomi dan – seperti klaim Schwab – membuat ekonomi dunia lebih berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Lalu, seperti apa pemikiran tentang The Great Reset ini dalam penerapannya? Bagaimana pula soal konspirasi yang muncul di sekitar konsep ini yang lekat dengan kecurigaan terhadap para elite global mengendalikan umat manusia yang disebut sebagai tatanan dunia baru?

Pemikiran tentang The Great Reset tertuang dalam buku yang Schwab tulis bersama Thierry Malleret berjudul Covid-19: The Great Reset. Dalam bukunya ini, Schwab membahas



Davos Agenda



Komite PC-PEN Indonesia.

bagaimana proses setel ulang berlangsung dalam semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kontrak sosial, kondisi pekerjaan, hingga pemanfaatan teknologi.

Frasa The Great Reset bukan barang baru sebenarnya. Paling tidak, Richard Florida pernah menulis buku berjudul *The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity* yang terbit pada tahun 2010. Dalam tulisannya ini, Florida membahas bagaimana krisis ekonomi pada 2008 merupakan cara dan peluang menyetel ulang berbagai hal, mulai dari soal ekonomi, sosial-kemasyarakatan, termasuk geopolitik global.

Sedangkan *The Great Reset* versi Schwab dan Malleret lebih kompleks. Schwab bahkan mengidealkan sebuah perubahan total dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara mikro maupun makro.

Secara garis besar, ada tiga hal yang menjadi poin utama pemikiran Schwab dan Malleret. Pertama, perlu kebijakan yang mengatur pasar agar menghasilkan outcomes atau hasil

yang lebih adil. Dalam hal ini kalangan pemerintah di lingkup global perlu meningkatkan koordinasi dalam pembuatan kebijakan terkait pajak, kebijakan fiskal, subsidi, juga termasuk hak-hak kekayaan intelektual.

Kedua, adanya investasi besar yang berujung pada ekonomi berkelanjutan agar mampu melahirkan kesetaraan atau equality. Stimulus ekonomi bagi masyarakat bawah misalnya, sangat diperlukan agar kondisi kesulitan yang terjadi pasca Covid-19 bisa diatasi dengan lebih baik.

Dalam ulasan di beberapa media, Schwab juga menyinggung soal dana yang dianggarkan oleh negara-negara untuk tujuan tersebut. Uni Eropa mengalokasikan 826 miliar dolar AS atau setara Rp11 ribu triliun untuk program recovery dan stimulus ekonomi. Negara-negara lain, seperti AS, Tiongkok, Jepang, dan yang lainnya juga diyakini mengambil langkah serupa.

Pada poin ketiga, seiring dengan gagasan Schwab tentang Revolusi Industri 4.0 berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perlu kerja sama global yang lebih erat dalam setel ul-

ang ekonomi global seiring Covid-19 untuk segenap warga dunia. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, publik menyaksikan bagaimana perusahaan, kampus, ahli-ahli dan ilmuwan, serta pemerintah dan masyarakat bersatu padu mencari solusi persoalan ini. Menurut Schwab, dunia akan menjadi tempat berbeda jika kerja sama yang demikian ini bisa terjadi di berbagai bidang lainnya.

Selain itu, teknologi seperti contact tracing dan tracking untuk menghadapi Covid-19, dapat meluas sebagai resep untuk tujuan penanganan krisis kesehatan di kemudian hari, juga untuk tujuan-tujuan lain.

Kemudian, Schwab juga mengelompokkan setel ulang tersebut dalam tiga kelompok besar. Yang pertama adalah setel ulang makro yang meliputi masalah ekonomi, lingkungan, kemasyarakatan, geopolitik dan teknologi. Kedua, micro reset yang berhubungan dengan bisnis dan industri. Terakhir, ketiga, individual reset yang berhubungan dengan redefinisi kemanusiaan, persoalan kesehatan mental, dan prioritas-prioritas dalam

• INFO UTAMA

masyarakat.

Banyak yang menyimpulkan garis pemikiran The Great Reset itu sendiri sebetulnya bertumpu pada bagaimana ekonomi kapitalisme bisa mengondisikan dirinya agar membawa dampak yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang ada di kelas terbawah. Secara keseluruhan, konsep ini tampak sangat bagus dan bahkan bisa dibilang sebagai solusi yang dibutuhkan. Namun, para pemikir dan pendukung kelompok kanan menilainya sebagai agenda yang cenderung Marxist atau kekiri-kirian. Schwab sendiri dicap sebagai seorang Marxist.

gontrol masyarakat global. Banyak yang menganggap The Great Reset sebagai jalan para elite global menciptakan pemerintahan totalitarian Marxisme global untuk membentuk sebuah New World Order atau pemerintahan dunia baru.

Mereka menganggap jika The Great Reset ini terjadi, maka masyarakat akan masuk ke rezim ketika vaksin menjadi hal yang diwajibkan, akan ada penggunaan militer untuk tujuan “memaksa” masyarakat tertib, serta tingkat kontrol dan pengawasan dari kelompok-kelompok ini yang makin besar pada masyarakat secara keseluruhan.

yang menjadi tema utama pertemuan tahunan World Economic Forum pada Mei 2021 di Swiss. Untuk sementara, terlihat tekanan utama kebijakan ekonomi-politik Indonesia adalah menarik antara menjaga pertumbuhan dan mengatasi wabah Covid-19. Contoh paling mencolok, saat lembaga internasional seperti OECD dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke kisaran minus tiga persen akibat Covid-19, kebijakan yang muncul adalah Komite Penanganan Covid-19 dan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Toh ada pula pendukung Great Reset di Indonesia dengan pandangan



Pangeran Charles dan Klaus Schwab

Sebagai pendiri dan eksekutif World Economic Forum, agak aneh jika menganggap Schwab kekiri-kirian. Namun, bahwa ia juga pendukung ekstrem kapitalisme tentu saja bertolak belakang dengan gagasan-gagasan ekonomi berkelanjutannya.

Toh muncul juga berbagai teori konspirasi berhadapan dengan The Great Reset yang menganggap proposal ini adalah cara segelintir pemimpin dan elite dunia untuk men-

Meskipun The Great Reset mengundang kontroversi pada level gagasan, sejauh ini praktik kapitalisme masih berjaya dalam tatanan ekonomi dunia. Bahkan ketika wabah Covid-19 merajalela. Katakanlah persaingan ekonomi Amerika Serikat dan China yang secara politis berbeda ideologi namun sama-sama menjalankan ekonomi pasar.

Indonesia tentu saja akan terdampak oleh gagasan The Great Reset

yang mengingatkan pentingnya merumuskan normal baru perekonomian pasca wabah Covid-19. Antara lain pandemi dapat menjadi momentum seleksi sektor ekonomi yang menyumbang pada perbaikan kualitas lingkungan serta adopsi teknologi. Tantangannya adalah menemukan paradigma pembangunan ekonomi yang mampu menyeimbangkan antara dorongan untuk perekonomian yang terus tumbuh dan keberlanjutan. ●

TAHUN NOL BARU

Oleh: Klaus Schwab

Setahun ke depan bisa menjadi tahun bersejarah - dengan cara positif. Tujuh puluh lima tahun setelah "Tahun Nol" asli usai Perang Dunia II, kita sekali lagi memiliki kesempatan membangun kembali. Proses setelah 1945 bersifat literal: membangun kembali dari reruntuhan perang. Kali ini, fokusnya ada pada dunia material tetapi juga pada lebih banyak lagi. Kita harus membidik tingkat kecanggihan masyarakat yang lebih tinggi dan menciptakan dasar kuat untuk kesejahteraan semua manusia dan planet ini.

Setelah Perang Dunia II, kita mengembangkan filosofi ekonomi baru berdasarkan kolaborasi dan integrasi, dengan kesejahteraan material sebagai tujuan utamanya. Proyek ini melahirkan organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan OECD, serta pengaturan yang akan berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Uni Eropa (UE). Neoliberalisme - komitmen kuat terhadap pasar bebas dan pemerintahan terbatas - berkuasa di Barat, tempat ia menghasilkan kemakmuran dan kemajuan selama beberapa dekade.

Tapi model ini telah rusak. Sementara COVID-19 memberikan pukulan terakhir, sudah jelas selama setidaknya dua dekade bahwa model pascaperang tidak lagi berkelanjutan, secara lingkungan atau sosial (karena tingkat ketidaksetaraan yang setinggi langit saat ini). Sejarawan Inggris terkenal Thomas Fuller mengatakan bahwa "saat paling gelap di malam hari datang tepat sebelum fajar." Namun, kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa tahun yang lebih baik akan mengikuti annus horribilis yang membawa krisis kesehatan masyarakat terbesar dan resesi paling tajam dalam satu abad. Kita harus bertindak untuk membuatnya begitu.

Saya melihat tiga pilar untuk dibangun. Pertama, 2021 bisa menjadi tahun ketika kita mengendalikan COVID-19. Beberapa vaksin tersedia. Jika vaksin berhasil melawan pandemi, kita harus memperhitungkan apa yang telah kita pelajari dari krisis ini. Meskipun dapat menyediakan stabilitas, vaksin bukanlah obat mujarab. Seperti penyelesaian damai yang tercapai namun tak memulihkan kehancuran perang, menghentikan pandemi hanyalah langkah pertama. Tantangan lebih besar adalah memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem dan institusi kita, banyak antaranya gagal memberikan perawatan dan layanan bagi yang memerlukannya.

Terserah kita semua untuk memastikan bahwa sistem kesejahteraan sosial dan perawatan kesehatan kita dibuat lebih tangguh untuk generasi berikutnya. Pandemi telah mengingatkan bahwa kita tidak bisa hanya meningkatkan PDB dan keuntungan, dengan asumsi bahwa memaksimalkan indikator-indikator ini secara otomatis akan menguntungkan masyarakat. Tidak, itulah sebabnya tahun mendatang harus membawa "Great Reset" dalam cara kita mendekati pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan.

Kedua, 2021 akan menjadi tahun saat setiap pemerintah

besar, serta koalisi sektor swasta yang luas, berkomitmen pada target "nol bersih" untuk emisi gas rumah kaca. Ini berarti bahwa, daripada terjebak dalam perlombaan menuju dasar dan takut akan masalah "penunggang bebas" yang berkelanjutan, dunia dapat mengambil manfaat dari siklus dekarbonisasi yang baik.

Uni Eropa telah setuju untuk "mengabadikan netralitas iklim 2050 dalam hukum," China telah berjanji menjadi "netral iklim pada tahun 2060" dan Jepang telah membuat janji serupa untuk tahun 2050. Dengan Joe Biden terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat diharapkan bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris, dan menargetkan 100 persen energi bersih dan emisi nol-bersih pada tahun 2050.

Komitmen ini merupakan perkembangan bersejarah. Cina, Jepang, AS, dan Eropa bersama-sama menyumbang lebih dari separuh emisi gas rumah kaca, dan lebih dari separuh PDB global. Target yang diuraikan dalam perjanjian Paris sekarang sangat dapat dicapai di tingkat nasional dan regional. Terlebih lagi, serangkaian komitmen industri dan perusahaan kini melengkapi upaya pemerintah. Belum pernah sebelumnya pergerakan iklim global begitu besar dan begitu konkret.

Akhirnya, 2021 akan menjadi tahun ketika perusahaan berputar dari orientasi keuntungan jangka pendek ke strategi yang lebih berfokus pada kelangsungan jangka panjang bisnis mereka, dan pada kepentingan dan kontribusi semua pemangku kepentingan. Yang pasti, para pemimpin bisnis merangkul konsep kapitalisme pemangku kepentingan pada tahun 2019, dengan janji Business Roundtable dan kemudian dalam Manifesto Davos 2020. Tetapi mereka kekurangan sarana untuk menerjemahkan komitmen berprinsip ini menjadi target yang terukur dan pelaporan non-keuangan. Sekarang tidak lagi demikian. Dengan pengembangan "Metrik Kapitalisme Pemangku Kepentingan" yang jelas pada 2020, semua perusahaan memiliki alat untuk mengubah komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi tindakan terukur.

Sekali lagi, ini adalah terobosan bersejarah yang akan berdampak global. Kantor akuntan "empat besar" - Deloitte, EY, KPMG dan PwC - semuanya berkontribusi pada tolak ukur baru, dan sekarang dapat memasukkannya ke dalam pelaporan tahunan mereka tentang kinerja perusahaan. Mereka bergabung dengan sejumlah lembaga keuangan besar, dari Bank of America hingga BlackRock, yang semakin menjadi pendukung vokal kapitalisme pemangku kepentingan.

Tiga perkembangan utama ini - fokus baru pada kesehatan dan ketahanan masyarakat, janji nihil bersih dan datangnya Tolak Ukur Kapitalisme Pemangku Kepentingan - semuanya memastikan bahwa 2021 akan menjadi "Tahun Nol" baru. Seperti setelah Perang Dunia II, fondasi untuk membangun era baru peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan aksi iklim. •



VAKSINASI MASAL, MULAI!!!

Beriringan dengan rentetan rekor baru kasus positif harian maupun kasus aktif harian di masa Covid-19, Indonesia memulai program vaksinasi untuk menghadapi wabah penyakit akibat virus corona yang mulai melanda pada Maret 2020 lalu.

Gagap silakan, tapi putus asa jangan.

Tampak berganti ekspresi antara tenang, tegang, maupun jenaka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya menjadi yang pertama menerima suntikan vaksinasi Covid-19 secara resmi. Yang menonton tayangan seketika maupun rekaman acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021 itu akan dapat melihatnya lebih jelas.

"Saya memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia untuk terbebas dari pandemi ini dengan menerima vaksin Covid-19," kata Jokowi melalui akun Instagram miliknya, @jokowi,

sesaat setelah disuntik vaksin.

Vaksinasi Jokowi berlangsung sekitar pukul 09.40 WIB. Sebelum vaksin benar-benar disuntikkan, ada serangkaian tahapan yang harus ditempuh. Jokowi mengatakan, mulanya tim dokter kepresidenan melakukan pengukuran tekanan darah. Didapati bahwa tekanan darah Jokowi normal dengan angka 130/67 mmHg.

Selanjutnya, Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan, antara lain apakah pernah terkonfirmasi positif Covid-19? Kepala Negara mengaku belum pernah terkonfirmasi positif virus corona.

Dokter juga bertanya apakah Jokowi



mengalami batuk atau pilek dalam beberapa hari terakhir. "Nggak. Ya batuk kecil aja, uhuk, udah," kata Jokowi sambil tertawa.

Pertanyaan lanjutan: Apakah anggota keluarga Jokowi di rumah ada yang mengalami batuk; apakah menderita penyakit tertentu seperti jantung, ginjal, gula, atau diabetes? Semua pertanyaan itu dijawab "tidak" oleh Presiden.

Alhasil, dokter kepresidenan menyimpulkan Presiden dapat menerima suntikan vaksinasi. Selanjutnya dokter menyiapkan suntikan di lengan kiri Presiden Jokowi. "Vaksin pun disuntikkan," ungkapnya.

Vaksin yang disuntikkan adalah buatan Tiongkok, berlabel Sinovac yang banyak dipertanyakan kemampuan dan keamanannya di media sosial. Toh Jokowi menegaskan, vaksin Covid-19 telah lama ditunggu-tunggu masyarakat.

Ia memastikan bahwa vaksin Sinovac aman digunakan karena telah mendapat izin penggunaan darurat

atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Maka, resmilah program vaksinasi ini untuk seluruh Indonesia secara gratis. Program vaksinasi diharapkan mampu memutus rantai penularan wabah virus corona di Indonesia. Juga sebagai tahap baru dalam menangani dampak yang ditimbulkan akibat pandemi. Vaksinasi Covid-19 ini, kata Presiden, penting pula untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada kita serta keselamatan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi.

"Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air," ujar Presiden. Setelah vaksinasi, Kepala Negara mengingatkan, protokol kesehatan berupa mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan tetap harus dijalankan.

Vaksinasi perdana ini berlangsung setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan kepastian fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para vaksinator dan tenaga medis lainnya yang turut membantu pelaksanaan vaksinasi perdana tersebut.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. dr. Abdul Muthalib, yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih," tandasnya.

Tak urung dokter Muthalib mengaku sempat merasa deg-degan sebelum menyuntikkan vaksin ke tubuh orang nomor satu di Indonesia ini. "Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa gugup," ujarnya setelah penyuntikan.

Namun, sambungnya, saat memulai penyuntikan, ia merasa tenang kembali dan dapat mengendalikan rasa

gugup yang melanda sebelumnya. Penyuntikan vaksin Covid-19 untuk Presiden Jokowi berjalan lancar dan tanpa rasa sakit. Bahkan, Abdul Muthalib mengatakan tak ada pendarahan di bekas suntikan Presiden Jokowi.

"Pada waktu menyuntikkannya tidak masalah. Tidak gemeteran lagi waktu

takut karena saya juga melihat kan, beliau agak, Profesor Abdul Muthalib agak gemetar sedikit. Jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik Presiden," ujar Jokowi.

"Apalagi ini juga disiarkan secara langsung di televisi. Jadi mungkin be-

suntkan vaksin Covid-19. Tercatat antara lain perwakilan dari sektor kesehatan, pemuka agama, pengusaha, guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga pedagang kecil mengikutinya "Terima kasih telah bersama-sama saya tadi divaksin," kata Jokowi.

Yang ikut mendapat suntikan vaksinasi antara lain adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kyai Ishomuddin dari PBNU, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan selebriti Raffi Ahmad.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua PGRI Unifah Rasyidi serta perwakilan dari PGI, KWI, PHDI, Permabudhi dan Matakin. Kemudian, Kepala BPOM Penny Lukito, Ketua Kadin Rosan Roeslani, Sekjen Ikatan Bidan Indonesia Ade Zubaidah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Juru Bicara Vaksinasi Reisa Brotoasmoro.

Untuk perwakilan perawat ada Nur Fauzah. Turut pula perwakilan buruh oleh Agustini Setiyorini, dan Ibu Narti yang mewakili pedagang pasar.

Nah, bagaimana reaksi tubuh setelah menerima suntikan vaksinasi Covid-19? Jokowi bercerita bahwa pada saat disuntik tak merasakan apa-apa. Tetapi, setelahnya, ada sedikit rasa pegal yang ia rasakan.

"Enggak terasa apa-apa, waktu suntik ya. Tapi setelah dua jam agak pegal dikit, agak pegal dikit," ujarnya.

Presiden mengaku sudah cukup lama tak disuntik vaksin. Yang terakhir sebelum Covid-19, kata Jokowi, ia mendapat suntikan vaksin meningitis dan flu ketika hendak berhaji.

Apapun, Presiden Jokowi berharap, ke depan seluruh masyarakat Indonesia bersedia untuk divaksinasi. Sebab, hal ini merupakan upaya menghentikan pandemi. Toh ia meminta masyarakat bersabar karena vaksinasi dilakukan secara bertahap.

"Karena kan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti vaksin ini gratis," ujarnya.

Sementara ini, peresmian program sudah berlangsung. Dinamika di lapangan akan kita lihat kemudian. Termasuk hasilnya tentu saja. ●



menyuntikkannya. Pertamanya saja agak gemeteran," kata dia.

Jokowi pun menanggapi kegugupan Pak Dokter. "Ya ada sedikit rasa

liau dokter Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar," kata dia.

Sejumlah perwakilan kalangan tu-
rut serta bersama Presiden menerima



PPKM BERSANDING DENGAN VAKSINASI SINOVAC

Dua hari sebelum Presiden Joko Widodo menerima suntikan vaksinasi Covid-19, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali mulai Senin, 11 Januari 2021. Kebijakan ini akan berlaku selama dua pekan hingga 25 Januari 2021.

PPKM sebenarnya mirip dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini berlaku, tetapi dengan sejumlah ketentuan baru untuk membatasi aktivitas masyarakat. Selain itu, PPKM cakupannya lebih luas karena dilakukan secara simultan di Jawa-Bali, dengan prioritas sejumlah kota besar.

PPKM atau PSBB akan membatasi sejumlah kegiatan. Mulai dari bekerja, ibadah, sekolah, hingga wisata. Ketentuan pelaksanaan PSBB Jawa-Bali tersebut salah satunya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Aturan teknis PSBB Jawa-Bali tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 6 Januari 2021. Aturan terbaru tentang PSBB ini menginstruksikan kepala daerah di Jawa-Bali untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan virus corona.

Berikut sejumlah poin terkait pembatasan kegiatan/PSBB di Jawa-Bali:

- ▶ Membatasi tempat kerja perkantoran dengan hanya 25 persen karyawan yang bekerja di kantor, dan sisanya sebanyak 75 persen dan work from home (WFH).
- ▶ Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online.
- ▶ Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan

pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- ▶ Restoran tetap buka untuk melayani pesan-antar/dibawa pulang. Sedangkan untuk makan/minum di tempat hanya dibatasi hingga 25 persen dari kapasitas tempat duduk sesuai dengan jam operasional restoran.
- ▶ Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- ▶ Kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- ▶ Tempat ibadah tetap dibuka dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan/PSBB Jawa Bali tersebut meliputi provinsi/kabupaten/kota yang berisiko tinggi dalam penularan Covid-19. Kategori risiko tinggi tersebut adalah jika daerah memenuhi salah satu ketentuan berikut:

- ▶ Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional.
- ▶ Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional.
- ▶ Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional.
- ▶ Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupation room/BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Semoga PPKM yang bersanding dengan vaksinasi Covid-19 sukses hingga angka positif harian, angka aktif harian, maupun angka kematian harian berkurang drastis. Harap maklum, catatan resmi menyebut penularan sudah melampaui 10 ribu orang per hari pada pekan kedua Januari 2021. ●

DUKA LARA PENERBANGAN PESAWAT SRIWIJAYA

Jadwal penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ke Bandara Soepadio Pontianak, Kalimantan Barat tertunda hampir satu jam. Begitulah awal duka hingga pesawat yang baru terbang beberapa menit setelah lepas landas itu kandas.

Panca Widiya Nursanti, seorang guru sekolah menengah pertama di Pontianak, berencana kembali setelah berlibur di kota asalnya Tegal, Jawa Tengah. Di Pontianak, suaminya Rafiq Yusuf Al Idrus menceritakan kontak terakhirnya dengannya. "Saya berencana dengan mengatakan bahwa sesampainya di Pontianak kita akan makan sate bersama," ujar Rafiq mengenang.

"Dia menghubungi saya lewat WhatsApp pukul 2.05 sore sambil tertawa. Dia sudah naik pesawat dan dia bilang kondisi cuaca tidak bagus. Saya bilang, tolong banyak-banyak berdoa," ungkap Rafiq pula.

Kini bersama 61 penumpang yang terdaftar di manifest pesawat, Panca Widiya Nursanti masih dalam pencarian dan identifikasi. Mengangkut 62 penumpang dan awak kabin, Sriwijaya Air SJ182 semula dijadwalkan terbang pada pukul 13.25 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta.

Namun hujan deras menunda lepas landas. "Maka ada delay 30 menit saat

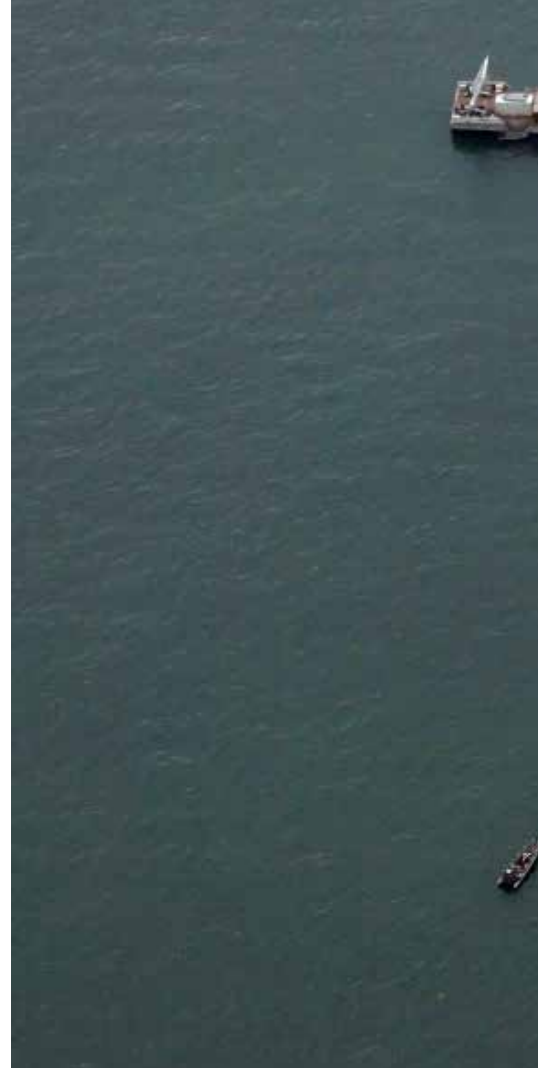
boarding," ungkap Dirut PT Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena dalam jumpa pers di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu, 9 Januari 2021, beberapa jam setelah pesawat dinyatakan jatuh.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kronologi jatuhnya pesawat secara lebih lengkap. "Pertama, Sriwijaya Air SJ 182 Soeta-Pontianak take off pada pukul 14.36 WIB," ucap Menhub Budi.

Namun pukul 14.37 WIB pesawat masih berada di ketinggian 1.700, kemudian diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki, dengan mengikuti standard instrumen. Selanjutnya pukul 14.40 WIB, Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat melainkan ke barat laut, oleh karenanya ditanya ATC untuk melaporkan arah pesawat.

"Tidak lama kemudian, dalam hitungan seconds, SJY 182 hilang dari radar. Manajer operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas, bandara tujuan, instansi terkait," jelas Menhub Budi.

Lantas semuanya menjadi jelas. Pesawat itu jatuh di perairan Kabupaten



Kepulauan Seribu. Tepatnya antara Pulau Tidung dan Pulau Laki.

Proses pencarian dan evakuasi pun berlangsung. Sedangkan kerabat dan keluarga penumpang terus menunggu dan berharap orang-orang tersasih



FOTO-FOTO: REUTERS

mereka selamat. "Selamat tinggal keluarga. Kami akan pulang sekarang," Ratih Windania memposting kalimat ini di akun Instagramnya dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta.

Ada gambar tiga anak yang sedang

tertawa gembira dan dua emoji menghembuskan ciuman. Pesan itu ia posting tepat sebelum pesawat Sriwijaya Air yang mereka tumpangi lepas landas.

Pihak berwenang mengatakan telah

menemukan puing-puing pesawat dan bagian tubuh korban pada Minggu petang, 10 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu, kawasan utara Ibu kota Jakarta, tempat pesawat Sriwijaya Air menghilang saat hujan.

Seperti puluhan kerabat penumpang lainnya, Irfansyah langsung bergegas menuju Soekarno-Hatta Jakarta pada Sabtu malam untuk menunggu kepastian nasib anggota keluarganya. "Doakan kami," tulis sang kakak yang bernama Irfansyah Riyanto di Instagram dengan foto keluarganya.

Pada Minggu petang itu, dia masih berharap mendapatkan kabar baik tentang saudara perempuan dan empat anggota keluarga lainnya yang ikut dalam penerbangan tersebut, termasuk orang tuanya. "Kami merasa tidak berdaya. Kami hanya bisa menunggu dan berharap segera mendapat informasi," kata Irfansyah kepada wartawan.

Irfansyah mengatakan, kerabatnya

Saya merasa masih belum percaya dan ini terjadi begitu cepat," ujar Irfansyah.

Pesawat tersebut menghilang dari layar radar beberapa menit setelah lepas landas dan mencapai ketinggian 10.900 kaki.

Dengan mengumpulkan sampel DNA dari anggota keluarga, pihak berwenang mengatakan telah melacak sinyal kemungkinan lokasi kotak hitam pesawat. Polisi juga meminta keluarga memberikan informasi untuk membantu mengidentifikasi jenazah seperti rekaman gigi dan sampel DNA.

Di rumah sakit, kakak dari kopilot Diego Mamahit mengatakan dia juga telah dimintai sampel darah. "Saya yakin adik saya selamat, ini hanya un-

kar baik," kata salah satu anggota keluarga Afwan yang merupakan seorang muslim taat.

Presiden Joko Widodo pun menyampaikan simpati atas musibah yang menimpa para korban. "Kita melakukan upaya terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan para korban dan kita semua berdoa agar mereka dapat ditemukan," tutur Jokowi.

Toh harapan ada korban selamat semakin menyusut. Hingga Senin, 11 Hingga Tim Disaster Victim Identification (DVI, identifikasi korban bencana) Polri berhasil mengidentifikasi anggota tubuh dari satu orang korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartomo mengatakan, korban pertama yang berhasil diidentifikasi yakni atas nama Okky Bisma, 29. "Ini kita bisa identifikasi satu korban yang mengalami kecelakaan," kata Rusdi.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Kapus Inafis Polri Brigjen Pol Hudi Suryanto menjelaskan, potongan tubuh yang teridentifikasi berupa tangan korban. Pihaknya berhasil mengidentifikasi potongan tubuh tersebut dari sidik jari korban. Lalu, melakukan pencocokan dengan alat serta data E-KTP dan manifes penerbangan.

Sedangkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, akan fokus melakukan pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Dia akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk cepat menyelesaikan pencarian korban tersebut.

"Tadi kami mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan upaya pemerintah akan memaksimalkan pencarian," katanya saat konferensi pers di Posko Crisis Center Sriwijaya Air SJ 182, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin, 11 Januari 2021. Para keluarga itu, rupanya datang dari berbagai tempat Antara lain Pontianak, Jakarta, Tegal, Bandung, dan Sungailiat.

Tentu banyak yang berharap kisah seperti ini tak berulang. Memastikan keselamatan penerbangan adalah syarat utamanya. • Irma



FOTO: AP

itu pada awalnya berniat terbang dengan pesawat sebelumnya yang diope-rasikan oleh Sriwijaya, yakni NAM Air.

Namun ia tidak tahu pasti mengapa rencana ini berubah. Kakak perempuan dan kedua anaknya ini baru saja selesai menikmati masa liburan selama tiga minggu, dan tengah menem-puh perjalanan pulang sejauh 740 km ke Pontianak.

"Saya yang mengantarkan mereka ke bandara, membantu proses check-in dan membawa barang bawaan ...

tuk prosedur polisi," ujar Chris Mamahit penuh harap.

"Diego orang baik, kami masih yakin Diego selamat."

Di profil LinkedIn-nya, Diego Ma-hamit menulis "Saya sangat suka terbang." Diego Mamahit dan sang pilot pesawat, Afwan, punya pengalaman menerbangkan pesawat komersial selama hampir dua dekade.

Sedangkan Afwan sebelumnya adalah seorang pilot angkatan udara. "Kami keluarga masih mengharapkan

PERMOHONAN DOA DAN DUKUNGAN PENDIRI SRIWIJAYA AIR

Nama Chandra Lie pasti melekat dengan Sriwijaya Air. Pengusaha kelahiran Pangkalpinang, Bangka Belitung ini memasuki bisnis penerbangan dengan mengelola sebuah pesawat atas kepercayaan koleganya. Jadilah pengusaha yang semula sukses mengembangkan bisnis garmen itu mengelola pesawat komersial pertamanya.

Memasuki usaha penerbangan bukanlah pekerjaan mudah bagi Chandra. Terlebih di awal 2000-an. Juga karena bisnisnya di usaha garmen tetap jalan. Praktis dia tetap membagi tenaga dan pikirannya di kedua bisnis itu.

Merasa semakin terpanggil menekuni bisnis penerbangan, Chandra mengajak anggota keluarganya seperti Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim membuat maskapai sendiri. Dengan bentuk kepemilikan usaha adalah 100 persen swasta murni, mereka memberanikan diri mengambil armada sendiri satu pesawat Boeing 737-200 pada 10 November 2003.

Pesawat itu mereka beri nama Sriwijaya Air dan berhasil melakukan penerbangan perdana dengan rute Jakarta-Pangkalpinang (PP), Jakarta-Palembang (PP), Jakarta-Jambi (PP) dan Jakarta-Pontianak (PP).

Berawal hanya memiliki satu armada jenis Boeing 737-200, bisnis Sriwijaya Air langsung melesat di tengah geliat bisnis maskapai penerbangan nasional. Tak lama kemudian perusahaan ini mengelola 15 unit pesawat tipe Boeing. Baru empat tahun mengudara, Sriwijaya Air meraih penghargaan keselamatan penerbangan dari Boeing pada tahun 2007, yaitu Boeing International Award for Safety and Maintenance of Aircraft.

Belakangan bisnis penerbangan nasional tampak oleng. Bersamaan dengan sebagian besar maskapai penerbangan Indonesia lainnya, Sriwijaya Air (termasuk anak perusahaan Sriwijaya Air, NAM Air) berada dalam daftar maskapai penerbangan yang dilarang di Uni Eropa karena alasan keamanan pada Desember 2014.

Khusus Sriwijaya Air, pada 8 November 2019. Kerjasama Operasional dengan Garuda Indonesia terhenti lantaran urusan pembayaran peralatan ground service. Wabah Covid-19 tentulah berdampak pada industri penerbangan penumpang. Kini musibah pesawat SJ 182 menambah beban Sriwijaya Air.

Apakah maskapai ini masih dapat bertahan? "Mohon dukungan dan doanya. Kami sangat sedih dan terpukul atas kejadian ini," kata Chandra Lie. • Irma





Ir Budi Gunadi Sadikin ChFC CLU

KESEHATAN PULIH DULU, BARU EKONOMI MENYUSUL

Menjadi bankir bisa. Memimpin holding BUMN Pertambangan sanggup juga. Sekarang malah menjadi Menteri Kesehatan, meskipun bukan seorang dokter. Dialah Budi Gunadi Sadikin, figur yang low profile, high performance. Tampilan sederhana, namun kinerjanya meyakinkan.

Sebagai Menteri Kesehatan, ia menegaskan aspek kesehatan ada di depan ekonomi. Jika kesehatan membaik, maka ekonomi akan mengikuti.

"Nomor satu ini jelas, Pak Presiden jelas, bahwa yang di depan sektor kesehatan. Jadi kesehatan harus pulih dulu baru ekonomi. Karena apapun yang kita lakukan, pandeminya pandemi kesehatan. Kita harus dorong itu (kesehatan) supaya pulih dulu, baru ekonomi menyusul," kata Budi Gunadi Sadikin pada 1 Oktober 2020 lalu.

namun *high performance*. Sederhana dalam tampilan, namun luar biasa dalam kinerja. Boleh jadi, masih banyak yang penasaran bertanya, siapa sebenarnya BGS ini?

Begitulah, hingga para wakil rakyat pun ingin mendalami profil Budi Gunadi Sadikin, sehari sebelum peresmian vaksinasi masal di Istana Negara. Pada Selasa, 12 Januari 2020 itu BGS pun hadir menemui para wakil rakyat dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor kesehatan ketenagakerjaan, dan kepen-

dang yang berjauhan dengan rekam jejaknya selama ini.

"Supaya akrab, kenalin lima menit aja Pak Menteri. Jadi kalau udah, top, kami yakin Kemenkes akan berubah dari yang sebelumnya," ungkap Saleh.

Maka BGS pun buka-bukaan tentang dirinya. Budi berkisah, mengenyam pendidikan di Kota Bogor, Jawa Barat, dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Setelah lulus SMA, ia berkuliah di kampus berlogo Ganesha, Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan fisika.



Toh Menteri Kesehatan pertama yang bukan dokter ini bukan sekadar *lips service* atau omdo, omong doang. Ucapannya itu ia wujudkan dalam bentuk program vaksinasi masal gratis untuk Indonesia dengan penyuntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu, 13 Januari 2020.

Nah, meski memiliki rekam jejak cemerlang sejauh ini, Budi Gunadi Sadikin memang tampak *low profile*

dudukan.

Adalah anggota Komisi IX DPR yang terkenal vokal, Saleh Partaonan Daulay, meminta Budi memperkenalkan diri secara rinci. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengemukakan, banyak yang meragukan latar belakang Budi yang lulusan bidang fisika nuklir Institut Teknologi Bandung dan rekam jejaknya sebagai bankir. Namun kemudian malah menjadi Menteri Kesehatan, bi-

Lulus dari kampus *in harmonia progressio* itu, Budi bekerja di International Business Machine (IBM) di Jepang. Setahun di Jepang, Budi kembali ke Tanah Air dan bekerja di IBM Indonesia selama lima tahun.

Nah, ketika bos Budi di IBM, I Gusti Made Mantra, pindah ke Bank Bali, ia menjadi anak buah yang diajak serta. Made Mantra memang pernah menjadi Direktur Utama Bank Bali yang beru-

• INFO PROFIL

bah menjadi Bank Permata pasca krisis moneter 1998.

"Itu pertama kali saya masuk ke perbankan. Saya bergeser. Saat krisis Bank Bali itu saya rasakan," ungkapnya.

Dari Bank Bali, Budi masuk ke ABN

moneter 1998.

Nah, Budi pun melanjutkan kisah-nya ketika menjadi bankir. Ketika di Danamon, rupanya Dirut Emirsyah Satar dekat dengan Robby Djohan, bankir yang pernah menjadi Direktur Utama

ketemu Pak Emirsyah Satar, Pak Emir dekat dengan Pak Robby Djohan, Pak Robby dekat dengan Pak Agus Martowardojo, akhirnya saya diajak ke Mandiri oleh Pak Agus," ucap Budi.

Budi mengaku, Bank Mandiri adalah tempatnya bekerja paling lama, hingga sepuluh tahun. Ia memulai karirnya di bank BUMN itu sebagai direktur yang memimpin kantor-kantor cabang hingga menjadi direktur utama. Menurut Budi, pengalamannya selama di Mandiri membuatnya berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Saya terima kasih di Mandiri bisa mengunjungi semua cabang. Saya melihat seluruh Bank Mandiri di Indonesia. Saya pensiun karena memang sudah dua kali jabatan," ungkapnya mengenang.

Selesai di Bank Mandiri, lanjut Budi, Rini Soemarno yang kala itu menjabat Menteri BUMN, meminta anak Bogor ini membantu Presiden Joko Widodo mengakuisisi PT Freeport Indonesia. Dia pun masuk menjadi Staf Khusus Menteri BUMN selama enam bulan untuk menyusun strategi akuisisi perusahaan tambang tembaga di Papua itu.

Akuisisi berlangsung dengan membentuk holding pertambangan PT Inalum dan Budi pun menjadi direktur utamanya. Sukses akuisisi pada 2018, Budi tetap menjabat Dirut PT Inalum.

Nah, pasca Pilpres 2019, kabinet berganti. Rini Soemarno tak lagi menjadi Menteri BUMN. Erick Thohir menjadi penggantinya. Bagaimana nasib Budi? Ternyata terus bertahan. Malah saat pembentukan Kabinet Indonesia Maju, Budi ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN I mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir.

Rupanya tugas dari Erick adalah mengurus BUMN farmasi. Maka, ketika Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020, BGS mengurus rumah sakit-rumah sakit milik perusahaan milik BUMN.

Memang, banyak BUMN yang tidak bergerak di bidang kesehatan memiliki rumah sakit. Katakanlah misalnya Rumah Sakit Pertamina yang induknya adalah perusahaan minyak dan gas. Kemudian Rumah Sakit Pelni, perusahaan yang bisnis intinya adalah transportasi laut. Belum lagi RS milik BUMN perkebunan atau BUMN pengelola



Amro, bank yang berpusat Belanda. Ia kemudian berpindah lagi ke Danamon karena teman-temannya di Singapura mengajaknya. Di Danamon ia bertemu dengan Emirsyah Satar yang tercatat pernah menjadi Direktur Utama Danamon yang didirikan oleh Usman Admajaya namun ikut tergulung oleh krisis

Bank Niaga, Garuda Indonesia, dan Bank Mandiri.

Sedangkan Robby Djohan, kata Budi, dekat dengan Agus Martowardojo, alumni Belanda yang pernah menjabat Direktur Utama Bank Mandiri dan kemudian menjabat Gubernur Bank Indonesia. "Di sana (Danamon)

pelabuhan. Budi bilang, ada sekitar 70 rumah sakit milik perusahaan BUMN.

Alhasil, puluhan rumah sakit itu ia gabungkan dalam satu induk perusahaan (holding company). "Selesai dalam waktu satu tahun, sehingga dibentuk holding Indonesia Healthcare Corporation, itu holding BUMN 70 RS," ujarnya.

Budi mengatakan di situlah ia berhadapan dengan Covid-19. Ia mengaku banyak mengurus prosedur layanan perawatan di rumah sakit, pengadaan ventilator, dan pengadaan obat-obatan yang saat itu susah.

Menurut dia, Kementerian BUMN sampai menggunakan private jet ke Indonesia karena barang-barang itu tersedia di luar negeri, antara lain Jepang sehingga pemerintah juga harus bernegosiasi dengan raksasa bisnis seperti Fuji. "Kami (juga) sampai mengejar

“

Itu pertama kali saya masuk ke perbankan. Saya bergeser. Saat krisis Bank Bali itu saya rasakan.

Elon Musk (pendiri perusahaan mobil listrik Tesla dan salah satu orang terkaya di dunia) untuk ventilator, tapi nggak dapat," ungkapnya.

Budi tampaknya ingin menjelaskan bahwa dunia kesehatan bukanlah ranah baru dalam karirnya. "Itu pengalaman-pengalaman saya berkecimpung di sistem kesehatan. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa ke sini (menjadi Menteri Kesehatan)," tandas Budi yang memegang sertifikat Chartered Life Insurance, sertifikat underwriter asuransi jiwa dengan keterampilan hitung-hitungan tingkat tinggi.

Rekam jejaknya sudah memadai untuk menangani kebijakan kesehatan nasional. Meyakinkan, Jadi, selamat bertugas dan semoga sukses Pak BGS!!! ●

BGS PERNAH SEDIH JUGA

Sebenarnya banyak lagi kisah Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang lebih manusiawi. Teman-teman kecilnya bisa lebih banyak bercerita.

BGS memang cerdas, pernah menjadi murid teladan. Bisa berdiri di depan kelas mengajari teman-temannya untuk menjawab soal yang sulit dari guru: matematika, fisika, kimia. Tak mengherankan jika ia masuk jurusan fisika di ITB Bandung. Banyak lagi kisah-kisah lama yang bisa menjadi kenangan bersama alumni SMA Regina Pacis Bogor itu.

Lahir dari pasangan Sadikin Sumintawikarta dan Widowati Rusmiputra, Budi adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya pernah menjadi Direktur Kebun Raya Bogor yang luasnya sekitar 80 hektare. Ibundanya yang kelahiran Slawi, Tegal, Jawa Tengah, kata BGS, adalah ibu rumah tangga biasa.

Di Rapat Kerja dengan Anggota Komisi IX DPR pada Selasa, 12 Januari 2021 itu Budi pun berkisah tentang orang tuanya. "Ayah saya namanya Sadikin Sumintawikarta, nggak ada hubungannya dengan Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jakarta)," kata Budi disambut tawa para anggota Komisi IX DPR.

Sang ayah lahir di lingkungan keluarga guru agama di Desa Bayongbong, Garut, Jawa Barat. Sadikin Sumintawikarta kemudian bekerja di Departemen Pertanian bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (1974-1984).

Toh tak selalu kisah sukses dan bahagia yang menyertai perjalanan hidup Budi Gunadi Sadikin. Di balik rekam jejak cemerlang selama ini, ia pernah juga mengalami cobaan. Antara lain, ketika sudah duduk menjadi petinggi Bank Mandiri, kedua orang tuanya mengalami kanker hingga stadium akhir dan merenggut kebahagiaannya.

Budi mengatakan kedua orang tuanya meninggal dalam waktu berselang 14 hari, saat ia bekerja di Bank Mandiri. "Ayah saya cancer myeloma, ibu saya kena cancer paru," ungkapnya.

Hikmahnya, BGS pasti akan lebih hirau soal kesehatan. "Saya merasakan sekali cancer itu adalah salah satu penyakit yang banyak merenggut nyawa," ucapnya.

Kini amanah sebagai Menteri Kesehatan berada di pundaknya: Menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan pribadi, keluarga, dan seluruh rakyat Indonesia. ●





NYALA BARA DI TENGAH WABAH CORONA

Saat virus corona masih jadi tanda tanya kapan mereda, bisnis batu bara nasional tampak menyala-nyala. Sejumlah kebijakan menunjukkan batu bara menjadi andalan untuk pemasukan devisa manakala kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri melonggar.

Membuka awal 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menekan keputusan kenaikan harga batu bara acuan (HBA) Januari menjadi 75,84 dolar AS per ton. Dengan begitu, terjadi kenaikan sekitar 16,19 dolar per ton atau 27,14 persen dari HBA Desember 2020 yang tercatat

59,65 dolar per ton.

HBA Januari 2021 ini akan menjadi patokan penentuan harga batu bara pada titik serah penjualan secara Freight on Board (FOB Vessel). Mak-sudnya, inilah harga patokan saat sudah berada di atas kapal angkut di pelabuhan asal. Beleid ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No-

mor 2 K/MB.01/MEM.B/2021 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan Untuk Bulan Januari Tahun 2021.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyampaikan, pemulihan pasar terutama di Tiongkok, menjadi faktor utama kenaikan komoditas batu bara. "Setelah hampir setahun adanya keterbatasan aktivitas ekonomi, pasar mulai bergerak pulih terutama di Tiongkok," kata Agung, Senin, 4 Januari 2021.

Menurut dia, Tiongkok berperan penting dalam mempengaruhi harga batu bara karena Negeri Panda itu



merupakan pasar utama bagi Indonesia setelah India. "Apalagi saat ini terjadi ketegangan hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan Australia. Sentimen ini yang makin memperkuat," jelasnya.

Dengan kenaikan ini, pergerakan HBA bergerak menuju level psikologis setelah sepanjang tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 lebih banyak mengalami pelemahan ke level terendah. "Rata-rata HBA pada 2020 hanya sebesar 58,17 dolar per ton dan menjadi yang terendah sejak 2015," tandas Agung.

Agung merinci, harga batu bara dibuka pada angka 65,93 dolar per ton pada Januari 2020. Sempat menguat sebesar 0,28 persen di angka 67,08 dolar per ton pada bulan Maret dibanding Februari yang sebesar 66,89 dolar per ton.

Namun HBA merosot pada April (65,77 dolar per ton), Mei (61,11 dolar per ton), Juni (52,98 dolar per ton), Juli (52,16 dolar per ton) dan Agustus (50,34 dolar per ton). "Puncaknya ada di bulan September 2020, saat harganya hanya 49,42 dolar per ton," ungkap Agung.

Harga Batu bara kembali pulih (rebound) dalam tiga bulan terakhir 2020. Pada Oktober (51 dolar per ton), November (55,71 dolar per ton) dan Desember (59,65 dolar per ton). "Supply dan demand tetap menjadi faktor perubahan (harga) utama di luar Covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali," jelasnya.

Faktor pembentuk penawaran batu bara sejauh ini biasanya mengikuti perkembangan season (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sedangkan permintaannya akan mengikuti kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Beriringan dengan kebijakan menaikkan HBA, Pemerintah memberikan relaksasi sanksi alias pelanngaran bagi perusahaan batu bara yang belum memenuhi alokasi dalam negeri (domestic market obligation/DMO) pada 2020 lalu. Relaksasi berupa pembebasan

kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan penjualan DMO itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021.

Pembebasan kewajiban ini berlaku untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tahap Operasi Produksi. Sedangkan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan pemerintah memberikan relaksasi tersebut dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19. "Kebijakan relaksasi ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional," kata Sujatmiko, Rabu, 6 Januari 2020.

Ia menjelaskan, kewajiban DMO batu bara ditetapkan sebesar 25 persen dari tingkat produksi. Namun, pandemi Covid-19 memukul roda perekonomian dan berimbas pada penyerapan batu bara. Alhasil, kebutuhan dalam negeri juga tidak mencapai 25 persen

dari total produksi batu bara nasional. Dia mengungkapkan DMO di 2020 ditetapkan sebesar 155 juta ton.

Namun realisasi DMO hingga akhir tahun lalu hanya mencapai 132 juta ton. "Meski target tidak tercapai tapi kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi," ujarnya.

Harap maklum, dengan realisasi DMO 132 juta ton pada 2020 berarti terjadi penurunan penyerapan domestik dibandingkan dengan angka pada 2019 yang mencapai 138,42 juta ton memang mengalami penurunan sekitar 4,6 persen.

Jadi, kata Sujatmiko, pemerintah

relaksasi sanksi DMO mengingat kebutuhan batu bara dalam negeri telah terpenuhi.

Di sisi lain, dengan adanya pembebasan sanksi tersebut kondisi keuangan perusahaan tidak semakin terbebani di tengah kondisi pandemi covid-19. "APBI mengapresiasi Menteri ESDM yang membebaskan sanksi kompensasi keuangan dalam hal kewajiban DMO 2020," kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia.

Sedangkan Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira memastikan bahwa pihaknya memenuhi ketentuan

si sanksi dari pemerintah sangat diapresiasi," kata Adrian.

Sebenarnya, sambung Adrian, penjualan batu bara pada tahun lalu tetap diprioritaskan untuk pasar domestik karena cenderung lebih stabil ketimbang pasar global. Namun, kapasitas pasar batu bara domestik masih terbatas. "Produsen membutuhkan kestabilan demand untuk sustain the operations," sambungnya.

Pegakuan serupa datang dari Head of Corporate Communication PT Indika Energy Tbk (INDY) Ricky Fernando. Menurut Ricky, hingga September 2020 saja, anak usaha INDY, PT Kideco Jaya Agung, telah menjual 7,4 juta ton batu bara ke pasar domestik dari 23,9 juta ton batu bara yang diproduksi.

“

Permintaan dan harga naik, sedangkan daya serap dalam negeri malah merosot. Pilihannya ekspor tentu saja.

"Sehingga bisa memenuhi kewajiban DMO sebesar kurang lebih 30 persen," ungkap Ricky.

Yang belum banyak dipahami, DMO adalah kebijakan untuk melindungi cadangan batu bara nasional. Tingginya jumlah ekspor batu bara Indonesia tidak sebanding dengan cadangan tersisa dibandingkan dengan negara lain. Dari total 891 milyar ton cadangan batu bara dunia, Indonesia hanya memiliki sekitar 30 miliar ton atau sekitar 3,1 persen cadangan batu bara dunia menurut data BP Statistical Review 2016. Bandingkan saja dengan cadangan batu bara Amerika Serikat (26 persen), Rusia (17 persen), China (12 persen), Australia (delapan persen) dan India (enam persen).

Namun, sekali lagi, ekspor batu bara tetap menjadi pilihan. Produk ekspor lainnya belum sanggup memenuhi kebutuhan devisa. ●



memberi kesempatan bagi pelaku bisnis batu bara untuk mengekspor kuota DMO yang tidak terserap di dalam negeri. Hanya saja dia belum bisa membeberkan total ekspor maupun realisasi produksi sepanjang tahun lalu. "Kalau ada kelebihan (kuota DMO) diizinkan ekspor tanpa ada pinalti atau sanksi," ujarnya.

Ya iyalah. Permintaan dan harga naik, sedangkan daya serap dalam negeri malah merosot. Pilihannya ekspor tentu saja.

Karuan saja para pebisnis batu bara menyambut baik kebijakan pelonggaran sanksi DMO. Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengaku telah melayangkan surat kepada Menteri ESDM, meminta

terkait DMO ini. Dia berharap, pemerintah tetap memberikan keputusan yang terbaik terkait DMO guna mendukung iklim investasi di sektor pertambangan. "Supaya sektor ini dapat terus berkontribusi bagi penerimaan dan kemajuan negara," ungkap Nadira.

Sementara Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga menilai pembebasan sanksi tersebut merupakan keputusan bijaksana pemerintah. Alasannya, tahun lalu merupakan kondisi abnormal saat demand dan harga batu bara anjlok, namun produsen tetap harus memproduksi untuk bisa bertahan.

"Jadi 2020 itu sangat berat untuk semua industri, termasuk di batu bara. Dalam survival mode seperti ini relaksa-

BUKIT ASAM SIAP DONGKRAK PRODUKSI

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah tentu akan patuh pada kebijakan wajib pasokan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation, DMO). Malah perusahaan yang memiliki lahan tambang utama di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini, memproyeksikan, baik permintaan domestik maupun ekspor akan sama-sama naik pada 2021.

Alhasil, PTBA optimistik produksi batu bara 2021 akan meningkat seiring dengan adanya potensi peningkatan permintaan batu bara. Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie C. mengakui permintaan batu bara diproyeksikan mengalami pemulihan pada tahun ini. Baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya potensi peningkatan permintaan ini, perseroan memperkirakan produksi batu bara tahun ini juga mengalami peningkatan. "Untuk produksi tentu akan meningkat seiring dengan peningkatan permintaan," ujarnya

Produksi batu bara PTBA sampai dengan kuartal III/2020 mencapai 19,4 juta ton. Realisasi tersebut setara dengan 77 persen dari target tahun ini yang telah disesuaikan menjadi 25,1 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengatakan bahwa realisasi produksi hingga September 2020 itu menurun 10 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan disebabkan oleh lemahnya permintaan batu bara pada semester pertama 2020, yakni ketika masa awal pandemi Covid-19 merebak.

Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi global, PTBA juga optimistik harga komoditas batu bara tahun ini akan terus meningkat. Memang, komoditas batu bara mengawali 2020 dengan positif setelah harga batu bara acuan (HBA) Januari 2020 naik ke level 75,84 dolar AS per ton atau 27,14 persen lebih tinggi dibandingkan Desember 2020 yang tercatat 59,65 dolar per ton.

Soal DMO? Lantaran BUMN, PTBA tak masalah dengan kebijakan pasar domestik itu. Pada 2020 lalu, misalnya, 55 persen produksi PTBA diserap oleh pasar dalam negeri.

Jumlah itu jauh melebihi ketentuan persentase minimal DMO yang sebesar 25 persen. "PTBA sebagai BUMN memprioritaskan kebutuhan batu bara dalam negeri. Sejalan dengan itu, PTBA mendukung kebijakan pemerintah dalam adanya kewajiban DMO," tandas Andwie. •



DARI PATIMBAN KE SUMATERA DAN KALIMANTAN

Tanpa embel-embel tol laut, Badan Usaha Milik Negara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka sejumlah rute penyeberangan jarak jauh alias long distance ferry (LDF).

Dari Pelabuhan baru Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tersedia layanan ke Sumatera dan Kalimantan pergi-pulang.

Untuk layanan dari Patimban ke Sumatera dan Kalimantan, ada tiga titik tujuannya. Satu di Sumatera, rute Patimban-Panjang, Lampung, pergi pulang. Dua lagi ke Kalimantan: Patimban-Pontianak, Kalimantan Barat, dan Patimban-Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Yang melayani tiga lintasan ini adalah KMP Ferrindo 5, salah satu kapal kelolaan PT ASDP Indonesia Ferry. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati mengatakan, pengoperasian tahap awal lintasan LDF dari Pelabuhan Patimban, Subang menuju Pelabuhan Panjang, Lampung ini merupakan layanan keempat ASDP setelah LDF Surabaya-Lembar, Jakarta-Surabaya, dan Ketapang-Lembar.

"Pembukaan lintasan ini, menjadi salah satu alternatif rute bagi jalur angkutan barang yang akan memperkuat sektor logistik di Pulau Jawa dan Su-

matara serta Pulau Kalimantan," ungkap Ira di sela peluncuran lintasan Patimban-Panjang, di Pelabuhan Patimban, Minggu, 10 Januari 2021. Menurut dia, selama ini jalur logistik Jawa dan Sumatera melalui penyeberangan terfokus di lintasan Merak-Bakauheni sehingga lintas penyeberangan baru ini dapat menjadi pilihan baru.

Kini, dengan adanya layanan melalui Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah, muncul harapan pertumbuhan ekonomi akan lebih terpacu. "Jadi, tidak hanya di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Lampung, tetapi juga secara nasional," sambungnya

Menurut perhitungan, lintasan LDF Patimban-Panjang sejauh 210 mil memerlukan waktu tempuh pelayaran selama 19 jam. Untuk lintas Patimban-Banjarmasin sejauh 444 mil, estimasi waktu tempuh 40 jam. Sedangkan lin-



tas Patimban-Pontianak berjarak 420 mil perkiraan waktu tempuhnya mencapai 38 jam.

KMP Ferrindo 5 memiliki spesifikasi teknis berukuran 3.566 Gross Ton, dengan panjang Kapal (LOA) 91,74 meter, dan lebar kapal 15,5 meter. Kapasitas angkutnya 156 orang penumpang dan 109 unit kendaraan campuran. "Pada pelayaran perdana Patimban-Panjang kali ini KMP Ferrindo 5 memuat 98 unit kendaraan kecil dan satu truk besar bermuatan 40 unit sepeda motor," ungkap Ira.

Kapal keluaran galangan Higaki Shipbuilding di Jepang ini memiliki mesin induk Hanshin dan mesin bantu Daihatsu yang mampu mencapai kecepatan hingga 13 knot. Sedangkan tangki induk bahan bakarnya dapat

jarmasin, yang akan berangkat dari Pelabuhan Patimban pada Jumat, 15 Januari 2021 pukul 14.00 WIB dan akan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu, 17 Januari 2021 pukul 11.00 WIB. Kemudian, kapal akan berangkat kembali dari Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu, 17 Januari pukul 20.00 WIB dan rencana akan tiba kembali di Pelabuhan Patimban pada Selasa, 19 Januari 2021 pukul 17.00 WIB.

Berikutnya, KMP Ferrindo 5 akan berlayar di lintas Patimban-Pontianak, berangkat pada Jumat, 22 Januari 2021 pukul 14.00 WIB dan akan tiba di Pelabuhan Pontianak pada Minggu, 24 Januari 2021 pukul 11.00 WIB. Kapal akan berlayar kembali dari Pelabuhan Pontianak pada Minggu, 24 Januari

ekonomi juga tumbuh lebih cepat. Mulai dengan kapal ro-ro, kami juga berupaya mencari kargo yang lain. Harapannya, nanti ini bisa kontinyu," kata Agus di Pelabuhan Patimban.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, pelayaran ferry jarak jauh ini akan membuka tambahan rute selain Patimban-Panjang, Patimban-Pontianak dan Patimban-Banjarmasin. Juga peluang bagi operator penyeberangan kargo swasta.

"Tidak menutup kemungkinan kalau kargonya meningkat, operator lain juga bisa ikut melayani di sini. Selain ASDP operator ro-ro kan banyak juga, nanti kawan-kawan Pelindo 3 sedang bicara dengan mereka supaya ini bisa terus berlanjut," ungkap Dirjen Agus.

“Pelabuhan Patimban ini baru. Tapi kami optimistik ini bisa membuat Patimban semakin lama makin hidup supaya ekonomi juga tumbuh lebih cepat.

menampung hingga 109 ton minyak.

Nah, layanan perdana penyeberangan Patimban-Panjang berangkat pada Minggu, 10 Januari 2021 pukul 13.00 WIB dari Pelabuhan Patimban dan estimasi tiba di Pelabuhan Panjang pada Senin, 11 Januari 2021 pukul 09.00 WIB. Lalu, kapal akan berangkat lagi dari Pelabuhan Panjang pada Senin, 11 Januari 2021 pukul 20.00 WIB dan estimasi tiba di Pelabuhan Patimban kembali pada Selasa, 12 Januari 21 pukul 06.00 WIB.

Selanjutnya, KMP Ferrindo 5 juga akan melayani lintas Patimban-Ban-

2021 pukul 20.00 WIB dan akan tiba kembali di Pelabuhan Patimban pada Selasa, 26 Januari 2021.

Pada kesempatan peresmian layanan penyeberangan Patimban-Panjang itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo mengatakan pihaknya optimistik pelayaran perdana ini akan mempercepat kemajuan Pelabuhan Patimban. Juga mengundang kegiatan ekonomi termasuk untuk warga sekitar.

"Pelabuhan Patimban ini baru. Tapi kami optimistik ini bisa membuat Patimban semakin lama makin hidup supaya

la mengaku saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Pelabuhan Patimban agar dapat segera melayani pengiriman peti kemas. Terkait hal tersebut Agus mengatakan nanti akan disediakan portable crane termasuk lebar alur. Ia berharap dengan begitu dalam waktu dekat Pelabuhan Patimban dapat segera melayani aktivitas ekspor-impor.

"Paling cepat pertengahan tahun ini, sebelum Juni. Tapi kita akan berusaha supaya dermaga kontainer ini mulai dioperasikan. Kami upayakan nanti ada crane, dan lain sebagainya. Saya berharap Insha Allah akhir bulan ini atau



awal bulan depan sudah ada kargo lain selain mobil,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, penetapan lintas Patimban - Panjang terutama bertujuan pula untuk mengurangi kemacetan dan beban jalan. Harap maklum, masalah volume kendaraan yang besar serta dimensi dan volume muatan kendaraan yang menyalahi ketentuan alias Over Dimension Over Load (ODOL) terasa meningkat. Belum lagi tingkat polusi udara dari emisi gas buang angkutan jalan.

“Yang kita harapkan ke depannya, rute dari Patimban ni dapat mengajak

menumbuhkan permintaan angkutan. Ia menilai penting juga untuk menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang untuk mencegah kendaraan ODOL serta melakukan pengaturan/rekayasa lalu lintas dalam pelabuhan dan menyediakan buffer zone.

“Kami ingin mendukung pertumbuhan sektor penyeberangan dengan munculnya lintas-lintas penyeberangan baru yang menjadi penghubung lintas penyeberangan utama. Khususnya antara sabuk selatan dan tengah,” ungkapnya. Oleh sebab itu ia mengingatkan pperator pelabuhan agar dapat menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dengan berkoordinasi

Harap maklum. Jawa Barat yang telah terpisah dari Banten memang sempat kehilangan Pelabuhan Merak, di ujung barat Jawa. Kini dengan Patimban beroperasi, Jawa Barat kembali memiliki pelabuhan yang justru lebih besar dari Tanjungpriok dan Merak.

Lantas berapa harga tiket penyeberangan dari Patimban? Belum jelas juga. Namun, sebagai perbandingan, Ferrindo 5 yang juga melayani LDF lintasan Jakarta-Surabaya dengan waktu tempuh 54 jam mengenakan tiket penumpang perorangan dewasa Rp75 ribu per penumpang. Sedangkan bayi dikenai tiket Rp 7.500 saja.

Untuk kendaraan golongan 1 Rp



asosiasi logistik untuk menggerakkan beberapa komoditas logistik yang dapat dibawa dari Jawa ke Pontianak dan Banjarmasin. Dengan adanya peresmian pelayaran perdana rute Patimban- Panjang ini semoga semakin memperlancar distribusi logistik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sekitarnya karena Pelabuhan Patimban memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat juga secara nasional,” jelas Dirjen Budi.

Dalam pelayaran perdana ini, Dirjen Budi berharap pula agar operator pelabuhan dapat memberikan pelayanan prima dengan menjaga ketepatan jadwal keberangkatan dan sandar kapal serta kecepatan pelayaran untuk

dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pengelola Hulu Migas serta menjamin ketersediaan air tawar.

“Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi, saya juga meminta agar disediakan fasilitas kesehatan. Juga komitmen penuh dalam penerapan protokol kesehatan baik di pelabuhan maupun di kapal,” kata Budi.

Dengan kehadiran lintas penyeberangan perdana Patimban-Panjang, Dirjen Budi berharap lintas penyeberangan ini dapat mendorong pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya seperti industri dan perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Lampung dan sekitarnya. “Juga memberikan multiplier effect pada perekonomian di Jawa Barat dan Lampung,” tandasnya.

“
KMP Ferrindo 5 memiliki spesifikasi teknis berukuran 3.566 Gross Ton, dengan panjang Kapal (LOA) 91,74 meter, dan lebar kapal 15,5 meter.

125.000, golongan II Rp 215.000, golongan III Rp 425.000, golongan IV penumpang Rp 1.495.000, golongan IV barang Rp 1.360.000, golongan V penumpang Rp 2.860.000, golongan V barang Rp 2.390.000, golongan VI penumpang Rp 4.845.000, golongan VI barang Rp 3.955.000, golongan VII Rp 4.985.000, golongan VIII Rp 7.445.000, dan golongan IX Rp 11.155.000.

Melihat jarak tempuh dari Patimban ke Sumatera dan Kalimantan paling lama 40 jam, seharusnya harga tiketnya lebih murah. Namun, entahlah, karena pada pertengahan tahun lalu ASDP baru saja menaikkan harga tiket penumpang.

Apapun, untuk yang memerlukan dan berminat melayari jalur penyeberangan Patimban ke Sumatera dan Kalimantan pergi-pulang, selamat menyeberang! ●



TERNYATA PELINDO III YANG JADI OPERATOR SEMENTARA PATIMBAN

Di acara peresmian layanan penyeberangan Patimban ke Sumatera dan Kalimantan pergi-pulang, hadir antara lain Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Udin Saefudin Noer. Ini di luar kelaziman sebenarnya. Mengapa?

Badan Usaha Milik Negara PT Pelindo III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Pelabuhan Patimban berada di Jawa Barat yang biasanya menjadi cakupan operasi PT Pelindo II, pengelola Pelabuhan di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.

Ternyata operator sementara Pelabuhan Patimban memang resmi berasal dari PT Pelindo III (Persero). General Manager Patimban, Sandy Syahrial Alam, juga personel dari PT Terminal Petikemas Surabaya (TPKS), anak usaha Pelindo III.

Sandy diperkenalkan sebagai GM Pelabuhan Patimban pada Rabu, 7 Januari 2021 dalam agenda public expose Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di depan seluruh pemangku kepentingan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Commercial and Business Development Manager PT Terminal

Petikemas Surabaya.

Tentu saja Sandy sudah berpengalaman mengurus pelabuhan di Surabaya. "Perbedaan Pelabuhan Patimban dan kali ini saya kelola ada dua: Sekarang brown port, Patimban green port. Bedanya mengurus brown project dan green ini, kalau brown project ekosistem sudah ada, mengubah kebiasaan menjadi masalahnya. Kami juga di Surabaya melakukan gate automation. Mengubah kebiasaan jadi tantangannya," kata Sandy.

Lebih lanjut dia menerangkan, ketika berbicara pelabuhan yang berupa green project seperti Pelabuhan Patimban, tantangan utama pengembangannya adalah pembentukan sistem dan standard operational procedure (SOP). GM yang baru diperkenalkan ini memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pelayaran selama 14 tahun dan setelah itu masuk industri pelabuhan selama sembilan tahun.

"Saya hadapi industri eksklusif sehingga orang-orangnya itu lagi, itu lagi. Walaupun kita pindah ke Patimban komunitasnya juga itu lagi-itu lagi," tandasnya.

Apapun, operator resmi Patimban kelak akan menunggu hasil lelang. Sekarang jalan dulu saja. Ramaikan juga tentunya. •



YANG MAU MERGER SAMA GOJEK SIAPA SEBENARNYA

Ada dua kabar tentang merger perusahaan perintis di bidang layanan Gojek. Dengan Grab yang lahan bisnisnya mirip, atau dengan Tokopedia, jasa layanan dengan platform jual-beli online.

Hanya perang urat syaraf atau sungguh, beredar kabar Grab meraih pendanaan lebih dari 300 juta dolar atau sekitar Rp 4,2 triliun dari konsorsium yang dipimpin oleh Hanwha Asset Management Korea Selatan. Isu ini muncul saat Gojek dikabarkan mengkaji merger dengan Tokopedia, setelah sebelumnya dirumorkan bersama Grab.

"Lini keuangan Grab yakni Grab Financial Group baru saja meraih pendanaan US\$ 300 juta," demikian kata sumber The Information dikutip dari e27 pada Jumat, 8 Januari 2021. Imp-

likasinya, posisi tawar Grab pun menja-di naik karena tambahan duit pendanaan itu.

Grab Financial Group di bidang keuangan ini baru berdiri pada 2018. Perusahaan ini menyediakan layanan investasi mikro, pembayaran, asuransi, serta pinjaman untuk pedagang, konsumen, dan pengemudi. Anak usaha Grab itu disebut-sebut mencari pendanaan sejak awal 2020. Saat itu, kabarnya dana segar akan digunakan untuk memperkuat merek, sehingga unit bisnis Grab ini bisa beroperasi secara mandiri.

Kabar tersebut muncul di saat be-

redar kabar Gojek tengah mengkaji merger dengan Tokopedia. Ini setelah sebelumnya decacorn (perusahaan perintis dengan valuasi antara 10-100 miliar dolar AS) asal Indonesia itu disebut-sebut berdiskusi rutin dengan Grab terkait konsolidasi sejak pertengahan 2020 lalu.

Gojek dan Grab disebut-sebut sepakat untuk membentuk entitas gabungan pada Desember lalu. Namun, sumber Bloomberg menyampaikan bahwa pembicaraan kesepakatan antara kedua decacorn menemui jalan buntu.

Sebelumnya DealStreet Asia melaporkan, merger akan mencakup semua layanan Grab dan Gojek, mulai dari layanan transportasi, pengiriman makanan dan paket, hingga ke pembayaran digital dan layanan keuangan. Penggabungan operasi ini akan melahirkan perusahaan baru.

Namun belum ada kesepakatan komposisi pemegang sahamnya.

Grab menawarkan saham 30 persen namun Gojek dan pemegang sahamnya ingin lebih besar karena tinggi penetrasi perusahaan di Indonesia, yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara.

Hal yang belum mencapai kata sepakat lainnya adalah brand di Indonesia. Rencananya, entitas gabungan ini akan menggunakan merek Grab di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, hal ini karena Grab memiliki operasi yang lebih luas. Grab yang hadir di delapan negara Asia Tenggara, sementara Gojek hanya di lima negara.

Dalam laporan yang diungkapkan oleh DealStreetAsia, dijelaskan Grab lebih suka untuk memakai brand nama gabungan, sementara Gojek lebih suka untuk menggunakan brandnya sendiri yang sudah dikenal banyak masyarakat di Indonesia.

Saat ini, kata sumber DealStreetAsia, Gojek sedang berusaha untuk membuat regulator Indonesia dengan cara menghentikan, atau menghapus brand Grab di Indonesia, seperti dikutip pada awal Desember 2020 lalu. Sayangnya, saat diminta konfirmasi kepada Chief of Corporate Affairs Gojek, Nila Marita menolak mengomentari rumor yang beredar tersebut.

"Beberapa layanan kami bahkan telah mencatatkan kontribusi margin positif. Kami terus memprioritaskan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna dan mitra kami di seluruh tempat kami beroperasi," ungkap Nila.

Juru Bicara Grab Indonesia juga menolak mengomentari rumor yang beredar di pasar. Sedangkan CEO Grab Anthony Tan dikabarkan terus menolak tekanan dari SoftBank Group Corp untuk menyerahkan sebagian kendali atas entitas gabungan kepada Gojek. Sedangkan CEO SoftBank Masayoshi Son dikabarkan kehilangan kesabaran akibat lamanya diskusi merger kedua decacorn ini.

"Sekarang Son mendukung merger antara Gojek dan Tokopedia," demikian kata sumber Bloomberg yang dikutip pada 5 Januari 2021. SoftBank merupakan investor Grab maupun Tokopedia.

Bloomberg memperkirakan, valuasi

gabungan Gojek dan Grab mencapai US\$ 25 miliar. Sedangkan Gojek dengan Tokopedia, valuasinya diprediksi US\$ 18 miliar.

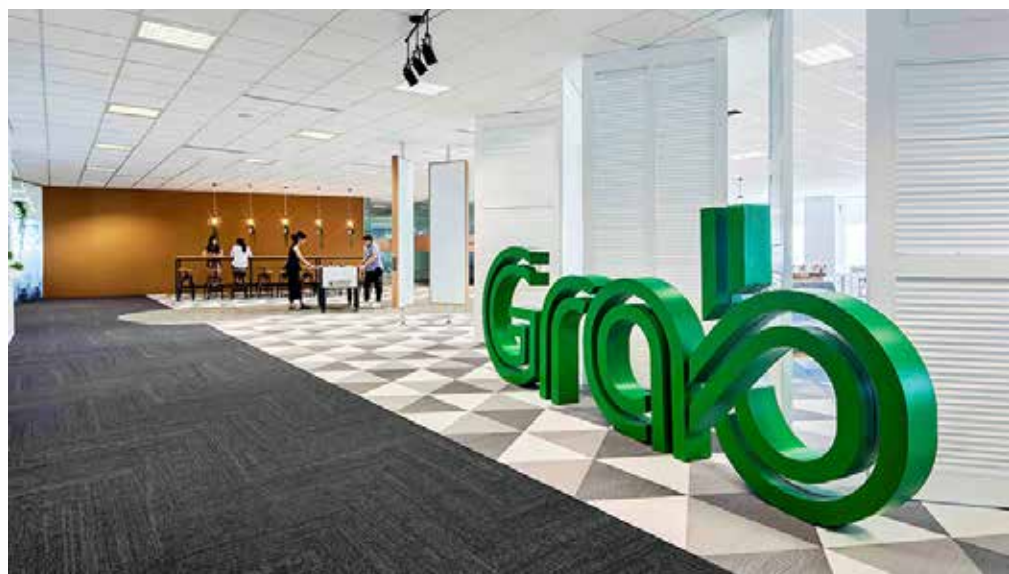
Sebagai decacorn, valuasi Gojek lebih dari US\$ 10 miliar. Sedangkan Tokopedia mendapatkan dana segar dari Google dan Temasek pada akhir tahun lalu, sehingga valuasinya disebut-sebut mendekati skala decacorn.

Dari e27 muncul kabar bahwa Grab dan Tokopedia telah melampaui tahapan pendanaan seri H. Ini artinya, ruang untuk putaran membuka peng-

cukup untuk valuasi yang lebih tinggi pada tahap IPO," kata Managing Partner Morphosis Capital Partners yang berbasis di Singapura, Sergei Filippov, dikutip dari e27.

Tokopedia telah mengumpulkan US\$ 2,8 miliar dalam beberapa putaran, sehingga valuasinya sekitar US\$ 7 miliar-US\$ 8 miliar saat ini. Artinya, nilai investasi investor menjadi 2,5 hingga 2,75 kali lipat.

Sedangkan Grab sudah mengumpulkan US\$ 10,1 miliar, dengan valuasi sekitar US\$ 15 miliar. Ini artinya, nilai



galangan berikutnya menjadi lebih kecil, selain menawarkan saham perdana atau IPO. "Namun, jika dibandingkan dengan Grab yang menghimpun US\$ 10,1 miliar hingga saat ini, Tokopedia dengan US\$ 2,8 miliar terlihat jauh lebih gesit dan menyisakan ruang yang

investasi meningkat 1,48x. "Inilah mengapa saya yakin potensi merger Tokopedia dan Gojek lebih memiliki naluri bisnis dan memberikan nilai pasar yang lebih baik," ujar Filippov.

Tapi bisnis bukan cuma hitung-hitungan. Kita tunggu saja akhir ceritanya.



INTERAKTIF - Salah seorang pelaku usaha sedang membuat konten untuk disebarakan melalui media sosial.

DIGITALISASI UKM DI MASA PANDEMI

► Nyata atau Hanya Utopia Belaka?

Pandemi Covid-19 nyaris membuat lumpuh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Banyak usaha gulung tikar. Karyawan mengalami PHK. Hingga alih profesi demi tetap bertahan hidup.

Termasuk pada sektor usaha kecil menengah (UKM) yang paling merasakan dampak negatif dari pandemi tersebut. Ketidaktahuan dari risiko terburuk akibat virus Corona tersebut, membuat sejumlah pelaku UKM pun terpaksa harus mengubah sistem kerja, hingga cara berjualan demi usahanya tetap bertahan.

Pemerintah sebenarnya tidak ting-

gal diam demi menyelamatkan UKM di Indonesia. Stimulus pun diberikan berupa bantuan modal Rp 2,4 juta pun dikucurkan kepada 12 juta pelaku usaha.

Anggaran yang dipersiapkan tidak sedikit, senilai Rp 116,32 triliun. Hingga akhir Desember 2020, 96,7 persen atau Rp 114,81 triliun diberikan untuk mengembalikan semangat para pelaku UKM.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, di tengah pandemi ini kewirausahaan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selama mampu beradaptasi dan bertransformasi. Hal ini karena proporsi UKM mendominasi populasi pelaku usaha di Indonesia hingga 99 persen.

Untuk itu ujar dia, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong inovasi, digitalisasi, dan kepastian badan hukum bagi pelaku UMKM melalui penguatan kelembagaan agar berperan lebih strategis dalam perekonomian nasional. Sehingga dapat lebih mudah dalam mengakses pembiayaan.

Aspek pembiayaan dititikberatkan karena sesuai data Bank Indonesia pada 2019, hanya sekitar 20 persen UMKM, yang telah terkoneksi pembiayaan formal.

Teten menegaskan upaya mendorong digitalisasi koperasi dan

UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan proses bisnis, dan perluasan akses pasar. Sementara dari sisi penguatan modal, pemerintah merancang BPUM sebagai program bantuan bagi para pelaku usaha mikro.

Desain BPUM bukan dalam bentuk pinjaman, karena pemerintah menyadari krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19, telah memukul dunia usaha. Tak terkecuali para pelaku usaha mikro.

Senada, disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputan III KSP Edy Priyono yang menyebut bahwa bantuan diharapkan dapat membuat para pelaku usaha bertahan di masa sulit.

"Bahkan kalau bisa berkembang menjadi lebih baik," ujar dia.

BPUM memang belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang berjumlah sekitar 60 juta. Namun, program tersebut bukan satu-satunya yang dite-

lurkan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam jangka panjang, usaha mikro perlu didorong untuk mengembangkan pasarnya, khususnya melalui pemanfaatan platform digital.

"Platform digital di masa pandemi ternyata menjadi salah satu solusi, dan juga berdampak positif dalam jangka panjang," ujar Edy Priyono.

Dengan begitu optimisme di wajah pelaku usaha untuk dapat membangkitkan arus ekonomi di level terbawah akan tetap terjaga baik.

Namun, dengan diterapkannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengkhawatirkan, akan semakin memberi dampak buruk bagi pelaku usaha mikro dan kecil menengah.

"UMKM baru mau bangkit dan pulih,

tapi Covid-19 tambah meningkat terutama di Jawa dan Bali menjadi red zone. PSBB ketat pasti berdampak lagi ke UMKM, dengan turunnya omset karena dibatasi lagi hanya 25 persen orang yang bisa ke kantor,” ujar Ikhsan.

Ia melanjutkan, banyaknya platform digital yang saat ini bisa membantu UMKM berjualan, tidak terlalu berpengaruh. Sebab menurutnya, berjualan lewat digital tidak maksimal dalam melayani pelanggan. Hanya 15-20 persen

pemerintah memperketat PSBB karena angka Covid-19 terus naik, namun di sisi lain berdampak signifikan terhadap ekonomi. “Maka saran kita, seharusnya tetap diberlakukan PSBB transisi namun ada pengawasan. Sebab, masyarakat Indonesia tidak cukup jika hanya imbauan protokol kesehatan,” kata dia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menilai kebijakan pembatasan kegiatan kontraproduktif.

dan pertumbuhan penjualan ritel, meskipun masyarakat semakin familiar dengan PSBB,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta W Kamdani.

Dunia usaha, kata dia, mengerti saat ini pengetatan PSBB diperlukan, karena penyebaran Covid-19 yang belum berakhir. Hanya saja diharapkan, pemerintah bisa membatasi dampaknya ke aktivitas ekonomi. “Kami lihat PSBB pun tidak efektif kalau disiplin



MENINGKAT DRASTIS - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi pabrik processing and packing center (PCC) salah satu start-up TANIHUB di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

dari total omset yang didapat ujar dia berasal dari platform digital. Selain itu, dari 64 juta jumlah UMKM, baru sekitar 6 sampai 7 juta yang bisa masuk digital. Sehingga tidak bisa dipukul rata semua UMKM dapat mengatasi dampak PSBB melalui bisnis berbasis digital.

Dirinya mengakui, kondisi saat ini memang serba salah. Di satu sisi,

Pasalnya, pembatasan seperti dulu lewat PSBB ketat akan menurunkan permintaan domestik. “Dari pengalaman dua PSBB sebelumnya kita sudah lihat confidence konsumsi masyarakat dan demand domestik langsung turun begitu PSBB diberlakukan kembali. Ini terlihat jelas dalam berbagai indikator seperti indeks keyakinan konsumen

protokol kesehatan di masyarakat sendiri semakin kendur.

Maka itu, dampak pengendaliannya hanya jangka pendek dan tidak sebanding dengan disrupsi yang terjadi pada kegiatan ekonomi,” tuturnya. Apalagi, kata dia, saat ini sebenarnya waktu sangat potensial untuk mengejar pemulihan. Di antaranya

dengan meningkatkan kinerja usaha, ekspor dan investasi, karena pasar global mulai pulih.

Sementara itu, seorang pakar Digital Marketing dari Purwadhika Digital Technology School, Andin Rahmana meyakini ada peluang yang bisa diraih para pelaku UKM melalui platform digital jika dilakukan dengan tepat.

Melalui akun Twitter-nya @andinrahmana, dia kerap membagikan cara-cara kepada pelaku usaha untuk



Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun

memulai bisnis secara digital. Dia menyarankan setiap usaha, harus memiliki website sendiri.

"Sangat bagus kita memanfaatkan sosial media dan marketplace, tapi namanya juga numpang, selalu ada resiko tiba-tiba kena suspend atau kendala teknis lainnya. Kita aktifkan ketiganya. Jadi kalau kenapa-kenapa, kita tetap punya

website sendiri yang infonya lengkap tentang produk," tulis Andin.

Website ujanrya sangat penting untuk para pelaku usaha. Sebab, dengan begitu pelanggan dapat dengan mudah mencari produk atau validitas tempat usaha melalui mesin pencari seperti Google. Hal tersebut terang dia, membuat bisnis yang dijalankan lebih kredibel. Sehingga membuat independensi pun terjaga, dan tidak bergantung pada orang lain.

Sosial media pun disarankan dia, bukan untuk tempat berjualan secara langsung (hard selling). Seperti pada namanya, sosial media harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni bersosialisasi.

"Kebanyakan dari kita fokusnya jualan terus. Jadinya nggak ada alasan orang untuk like, comment, share, apalagi follow. Coba kenali dulu audiens kita siapa, dan mereka sukanya

“
Performa artinya engagement bagus, dan sentimennya bagus. Jadi lebih kebayang untuk kita bikin konten

apa. Petakan sesuai demografi, geografi, psikografi. Jadi kita nggak bisa sasar semua orang," sarannya.

Dengan mengetahui audiens tersebut, maka akan memengaruhi pelaku usaha dalam pembuatan konten di media sosial.

Andin juga menyarankan agar para pelaku usaha yang baru terjun di media sosial untuk berjualan, untuk mengikuti langkah amati, tiru, modifikasi, dari merk-merk yang performanya sangat baik.

"Performa artinya engagement bagus, dan sentimennya bagus. Jadi lebih kebayang untuk kita bikin konten," jelas dia.

Selain itu, kunci keberhasilan para pelaku usaha untuk dapat mening-

TINGKAT USAHA YANG TERDAMPAK PANDEMI	
Usaha Kecil Menengah	: 84 %
Usaha Menengah Besar	: 82%

SEKTOR USAHA PALING TERDAMPAK SAAT PANDEMI	
Akomodasi dan Makan/Minum	: 92,47 %
Jasa lainnya	: 90,9 %
Transportasi dan Pergudangan	: 90,34 %
Konstruksi	: 87,94 %
Industri Pengolahan	: 85,98 %
Perdagangan	: 84,6 %

DAMPAK PANDEMI TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH	
Terdampak Negatif	: 82,9 %
Terdampak Positif	: 5,9 %
Tidak Terdampak	: 11,2 %

METODE BERJUALAN UKM SAAT PANDEMI	
Online	: 21,4 %
Offline	: 30,1 %
Offline dan Online	: 48,5 %

SALURAN BERJUALAN	
Toko fisik milik sendiri	: 66,5 %
Media sosial	: 62,1 %
Marketplace/E-Commerce	: 26,2 %
Toko fisik milik orang lain	: 17,5 %
Digital marketing	: 12,6%
Sales agent	: 10,2 %
Distributor	: 6,3 %
Tengkulak/Pengepul	: 3,4 %
Lainnya (brosur, reseller, dsb)	: 2,4 %

katkan pasar di platform digital adalah pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Dia mencontohkan agar para pelanggan yang sudah berbelanja untuk diminta timbal-balik. Hal ini, akan meningkatkan kepercayaan kepada calon konsumen yang hendak membeli produk pemilik bisnis.

Selain itu, dengan timbal-balik, jika ada sentimen negatif, makan dapat segera diselesaikan. Karena jika tidak dapat dituntaskan, akan memberikan jejak digital, yang berpengaruh pada performa suatu merk.

"Minimal kalau dibaca sama orang lain, kita sudah beritikad baik menden- garkan dan melakukan perbaikan," terang dia.

Terakhir, menurut dia adalah mengukur segala hal yang telah maupun akan dikerjakan. Termasuk melakukan evaluasi terhadap performa bisnis yang dijalankan secara digital. ●



► Jembatan Musi 6

IKON BARU SUMATERA SELATAN

Palembang dan Sumatera Selatan memiliki ikon baru: Jembatan Musi 6. Semoga saja bertahan sesuai dengan proyeksi, minimal 50 tahun penggunaan.

Meski sebagian wajahnya tertutup masker, sorot mata gembira Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru masih tampak jelas. Malam itu ia menghadiri acara peresmian Jembatan Musi 6 bersama istrinya, Ketua Tim Penggerak PKK, Febrita Lustia.

Ya, Rabu malam, 30 Desember 2020 itu berlangsung peresmian jembatan ini. Jembatan Musi 6, yang menghubungkan kawasan Kertapati di Seberang Ulu dan kawasan Tanggo Buntung di Seberang Ilir di Ibu Kota Sumatera Selatan itu.

Sejak sebelum masa kemerdekaan, tata ruang Kota Palembang yang terbelah Sungai Musi terbagi atas kawasan

Seberang Ulu di sisi selatan Musi dan Seberang Ilir di sisi utara. Kawasan Seberang Ilir berkembang lebih dulu. Pengembangan baru semakin mengarah ke kawasan Seberang Ulu.

"Jembatan Musi 6 juga dapat mendorong pemerataan pembangunan baik di kawasan Seberang Ulu maupun Seberang Ilir agar menjadi lebih cepat," kata dia.

Jembatan Musi 6 menjadi yang keempat membentang di atas Sungai Musi. Sebelumnya telah ada Jembatan Ampera, Jembatan Musi 2, dan Jembatan Musi 4. Sebenarnya ada satu jembatan lagi, Jembatan Ogan-Kertapati di atas Sungai Ogan, anak Sungai Musi.



"Ini sebagai kado untuk masyarakat di akhir tahun. Ini uang masyarakat Sumsel harus kita jaga sama-sama. Kita juga berterima kasih kepada semua pihak. Semoga semua lancar sampai akhirnya setelah uji beban bisa dipergunakan," ungkap Deru malam itu.

Pilihan acara di malam hari agaknya memang sengaja lantaran Jembatan Musi 6 berhiaskan lampu warna-warni yang menjadi aksesoris. Tak mengherankan jika jembatan ini akan menjadi ikon baru di Palembang.

Turut hadir dalam acara itu Komandan Resort Militer Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Filda Malari CTMP. Tampak pula Wali Kota Palembang H Harnojoyo, FKPD Provinsi Sumsel, dan anggota DPRD Provisi Sumsel.

"Jembatan ini dibangun dengan uang rakyat dan yang bertanggung jawab harus kita semua, satu baut pun harus dipertanggungjawabkan, kalau tidak begitu umur jembatan ini tidak akan sampai 50 tahun," ujarnya saat peresmian jembatan tambahan yang diharapkan dapat mengurangi beban

jembatan Ampera yang dibangun dari biaya pampasan Perang Dunia II dari Jepang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Provinsi Sumsel, Dharma Budhy megkonfirmasi soal proyeksi 50 tahun usia jembatan ini. Ia menjelaskan Jembatan Musi 6 telah melalui uji tes beban oleh Komite keselamatan jalan dan terowongan dan hasilnya baik dalam hal konstruksi, sehingga penggunaannya minimal dapat mencapai 50 tahun.

Sebelumnya Dinas PUBM-TR Provinsi Sumsel melakukan proses loading test atau uji beban Jembatan Musi 6 pada Selasa, 22 Desember 2020. Uji beban tersebut berlangsung dengan menjejerkan setidaknya 24 truk.

"Yang melaksanakan uji beban tentu saja ahlinya, yakni KKKJTJ (Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan) dari Jakarta," ujar Darma Budhy. Menurut dia uji beban menggunakan 24 truk dengan kapasitas masing-masing 40 ton.

Pada bagian tengah jembatan pun telah dipasang elektrik yang dapat dipantau menggunakan komputer, sehingga saat ada pergerakan kend-

araan akan terbaca. Budi menjelaskan, hasil dari proses tersebut baru keluar sepekan hingga dua pekan ke depan. Nantinya, yang keluar berupa sertifikasi laik fungsi.

"Insya Allah pada 30 Desember 2020 nanti kita resmikan (Jembatan Musi 6). Itu sudah kita laporkan ke Gubernur Sumsel. Kita juga rencananya memilih akan meresmikan pada malam hari, karna jembatan ini kan dikenal dengan ikon keindahan lampunya," ungkapnya.

Dengan peresmian jembatan itu, ia berharap warga Palembang juga mendapat hiburan baru. "Kita buat lampu-lampu yang ada di jembatan semenarik mungkin. Ya, seperti akan dibentuk huruf warna-warni dan sebagainya," kata Kadis PUBM-TR ini.

Jembatan Musi 6 dibangun sejak 2015 dan menelan biaya Rp548 miliar yang bersumber dari APBD Sumatera Selatan. Jembatan tersebut memiliki dua ruas jalan dengan lebar jembatan 11,5 meter, masing-masing lebar 8,5 meter ditambah trotoar lebar 1,5 meter. Bentang total jembatan sepanjang 925 meter ini berhiaskan 1.527 lampu penerangan.

Pada rangka jembatan yang menyerupai busur ke atas itu juga diperindah dengan permainan lampu warna-warni (art light) sehingga menjadi pemandangan menarik saat malam hari. Jembatan ini memiliki ketinggian terhadap permukaan air Sungai Musi hingga 13 meter dengan kapasitas muatan sumbu delapan ton.

Gubernur Herman Deru menjelaskan penambahan jembatan di Kota Palembang sangat penting karena lalu lintas di wilayah tersebut sudah terlalu padat sementara jalan-jalan yang ada terbelah oleh Sungai Musi. "Diharapkan jembatan ini tidak hanya menjadi sarana penghubung, tapi juga menarik perhatian karena indah dan terjaga. Untuk itu semua pihak harus menjaga dan merawat jembatan ini," sambungnya.

Semula Jembatan Musi 6 dibangun untuk persiapan Asian Games 2018 tetapi tertunda akibat hambatan pembebasan lahan, sehingga Gubernur HD mengapresiasi Pemkot Palembang dan warga yang telah membantu mengatasi kendala tersebut. Selesaiannya pembangunan Jembatan Musi 6, kata HD, adalah buah kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak.

"Jembatan ini dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya, mengurangi kemacetan terutama dalam kota Palembang yang semakin hari semakin padat. Kendaraan luar kota tidak akan masuk ke dalam Kota Palembang," kata HD.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kewajiban Pemprov Sumsel terkait infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel di akhir tahun 2020 ini hampir dikatakan tuntas. Selanjutnya, dalam hal tersedianya kebutuhan masyarakat diperlukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayahnya.

"Untuk sementara setelah peresmian malam ini, Jembatan Musi 6 ini akan ditutup untuk umum hingga 5 Januari 2021. Untuk mengantisipasi terbentuknya cluster baru Covid-19 di malam Tahun Baru 2021 yang dipastikan ada penumpukan masyarakat di area ini," ujar Herman Deru.

Jembatan Musi 6 masih menjalani

tahap uji coba sehingga hanya kendaraan berbobot ringan yang boleh melintasnya, agar tidak merusak jembatan yang belum selesai sepenuhnya. Kepala Bidang Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel M Affandi di Palembang, Jumat, mengatakan, walaupun sudah dibuka secara resmi untuk masyarakat tapi sebenarnya status jembatan tersebut masih tahap uji coba.

"Hingga kini Pemprov Sumsel masih melakukan penyelesaian di sepanjang jalan dan jembatan," kata M Affandi di Palembang, Jumat, 8 Januari 2021. Ia menjelaskan uji coba yang dilakukan yakni uji coba lalu lintas kendaraan sehingga kendaraan berbobot berat seperti truk dan bus masih dilarang untuk melintas.

Masa uji coba ini diperkirakan sekitar tiga pekan, sambil Pemprov Sumsel menunggu keluarnya sertifikat dari Kementerian PU agar kendaraan bertonase berat bisa melewati Jembatan Musi 6 ini. "Kami juga masih melakukan perbaikan di kiri dan kanan jalan. Perbaikan ini hanya perbaikan ringan seperti memasang sambungan di batu alam," kata dia.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya beserta dengan jajaran terkait sedang melakukan evaluasi dari lalu lintas di Jembatan Musi 6 ini. Evaluasi mencakup pula pembukaan dua arah baik dari Seberang Ulu maupun Seberang Ilir Palembang, dengan ketentuan mobil roda empat dengan kapasitas ringan saja.

"Ini merupakan tahap evaluasi, karena masih banyak rambu lalu lintas yang belum lengkap. Nantinya akan dilengkapi seiring dengan evaluasi yang ada. Kami juga akan coba memasang CCTV jika memang diperlukan," kata dia.

Sedangkan Kasubdit I Unit Dikyaksa Polrestabes Palembang Ipda Sopyan mengatakan akan menurunkan sebanyak 40 personel, yang dibagi dalam dua shift di dua lokasi. "Sebanyak 10 personel di seberang Ulu dan 10 personel lagi di sebelah Ilir jembatan. Selain itu nantinya akan ada petugas tambahan dari Polsek terdekat," ungkapnya. ●





DARI 2 DAN 4 LOMPAT LANGSUNG KE MUSI 6

Warga Palembang sudah banyak yang mengetahui. Di kotanya kini ada empat jembatan yang membentang di atas Sungai Musi yang membelah Ibu Kota Provinsi Sumsel itu. Tambah satu dengan Jembatan Ogan-Kertapati di atas Sungai Ogan, salah satu anak Sungai Musi.

Yang disebut Musi 1 sebenarnya adalah Jembatan Ampera, mulai dibangun pada 1962 dengan biaya pampasan Perang Duia II dari Jepang. Jembatan Ampera mulai berfungsi pada 1965.

Kemudian Musi 2 yang berfungsi pada 1994 dan duplikatnya menyusul berfungsi pada 2015. Jembatan ini menghubungkan kawasan Kertapati di Seberang Ulu dan kawasan Gandus di Seberang Ilir.

Selanjutnya Jembatan ketiga adalah Musi 4. Jembatan ini menghubungkan Jalan Slamet Riyadi di kawasan Seberang Ilir dan Jalan KH Azhari di kawasan Seberang Ulu yang mulai berfungsi pada 2019 lalu. Terakhir Jembatan Musi 6 yang peresmianya menandai tutup tahun 2020 dan pembukaan 2021.

Jika sedikit jeli saja, akan muncul pertanyaan di mana Jembatan Musi 3 dan Musi 5? Gubernur Sumsel Herman Deru punya jawaban.

Menurut dia, Jembatan Musi 3 mempunyai konsep underwater (dibawah sungai) di jalan lingkaran luar menghubungkan lingkaran timur ke barat. Sedangkan Jembatan Musi 5 lagi berjalan pembangunannya masuk dalam tol Palembang-Kayu Agung-Betung (Kapal Betung).

Gubernur menjelaskan. Jembatan musu 3 dan musu 5 sedang dalam perencanaan yang konsepnya tinggal menunggu persetujuan Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR.

Jembatan Musi 3 mempunyai konsep underwater (di bawah sungai) menghubungkan jalan lingkaran luar timur dan barat. Sedangkan Jembatan Musi 5 lagi berjalan pembangunannya masuk dalam tol Palembang Kayu Agung Betung (Kapal Betung).

"Kita bantu Wali Kota mempercepat pembangunan infrastruktur. Usulkan saja jalan yang mana yang harus perlu di overlay jalan yang menuju akses penduduk. Jika pemerintah kota tidak cukup anggarannya," tandas Gubernur HD.

Soal anggaran yang dikemukakan Gubernur HD ini memang sangat berpengaruh luas. Paling tidak menyangkut biaya pembebasan dan ganti-untung lahan di lokasi.

Dari pengalaman pembangunan jembatan-jembatan sebelumnya, pembebasan lahan untuk membangun jembatan memang kerap menjadi kendala. Pada gilirannya, anggaran pula yang membuat penentuan lokasi jembatan memakan waktu.

Jadi, masih perlu waktu menunggu Jembatan Musi 3. Sedangkan untuk Musi 5, karena berada di ruas tol Kapal Betung, kabarnya mulai beroperasi pada 2022. Tahun depan, perkembangan dua jembatan ini kita saksikan bersama sama. •



BENCHMARK INSENTIF BERAS: SUMSEL MELAJU KE KUALITAS

Menjelang dua tahun pelaksanaan program sejak 2019 lalu, pemberian insentif (tunjangan) beras bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumsel terus berlanjut. Kuantitas jelas naik, kualitas premium yang hendaknya merata.

Program Gubernur Sumsel H Herman Deru ini tak pelak menjadi benchmark atau standard sekaligus contoh kontekstual bagi kepala daerah lainnya. Terlebih saat isu ketahanan pangan nasional menjadi perhatian di tingkat nasional maupun global.

Lebih dari sekadar pemberian insentif, Gubernur HD juga memonitor terus kualitas beras yang tersalur dalam program ini agar tetap terjamin dan memenuhi syarat kelayakan pangan. Setelah penyaluran insentif beras pada 2019 meningkat hingga 300 persen pada 2021, langkah Gubernur HD berikutnya adalah menjaga kualitas beras yang tersalur untuk para ASN, honorer, yang pada gilirannya juga akan menjangkau para anggota keluarganya.

Saat menerima audiensi Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sumsel-Bangka Belitang Ali Ahmad Najih Am-

sari Aan di ruang tamu Gubernuran Palembang, pada Selasa, 12 Januari 2021, HD mengatakan agar Bulog melakukan cross check (pemeriksaan silang) berulang proses pendistribusian beras ke pegawai. Ia ingin beras yang sampai ke tangan pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel dan keluarganya berkualitas sama tinggi, merata di setiap daerah.

"Kemarin sempat ada laporan dari beberapa daerah. Jenis berasnya agak berbeda-beda antara satu daerah dan yang lainnya. Tolong ini dicek lagi pastikan betul kualitas insentif beras itu kualitasnya merata," ujar Gubernur HD yang nama lengkap Herman Deru merupakan singkatan dari laher di zaman Orde Baru itu.

Menurut HD, program itu merupakan inisiatifnya secara murni agar beras hasil produksi para petani di seluruh Sumsel dapat terserap maksimal oleh



pegawai melalui Bulog. Tujuan utama program ini, sambungnya, adalah sebagai bukti bahwa Pemprov berbuat nyata terhadap penyerapan beras yang sudah diproduksi petani Sumsel.

"Makanya saya minta hindari pasokan beras dari daerah lain. Karena dengan cara ini bisa menjadi stimulus bagi petani dan mereka merasa dihargai bisa dihargai," tegas Gubernur HD yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Karo Ekonomi Setda Provinsi Sumsel Afrian Joni, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Summan Asra Supriyono.

HD menegaskan program ini baru satu-satunya di Indonesia. Jadi, ia berharap kebijakan stimulus ekonomi pangan dari Pemprov ini menjadi stimulus bagi petani dan semakin mensejahterakan mereka.

Mengenai pengadaan beras ASN, Kadivreg Perum Bulog Sumsel dan Babel Ali Ahmad Najih Amsari Aan mengakui, sepanjang 2020 lalu, pengadaan beras ASN program murni Gubernur HD mengalami peningkatan cukup drastis. "Pada 2019 penyerapan beras untuk program insentif beras Gubernur HD ini baru 1.100 ton. Tahun 2020 alokasinya menjadi 3500 ton

Jadi naik 300 persen karena ada OPD yang mengajukan penambahan," ungkap Ali yang dalam kesempatan kali ini didampingi Wakil Kadivreg Rachmat Syahdjoni Putra.

Kadivreg Ali juga mengungkapkan bahwa stok beras di Sumsel aman sampai enam bulan ke depan. Demikian halnya mengenai harga, lanjut Ali, saat ini secara umum relatif stabil. Bahkan menurutnya harga beras cenderung turun.

Sedangkan pada 2021 ini Bulog juga akan banyak melayani kegiatan komersial memenuhi kebutuhan pasar seperti daging sapi maupun kerbau. Mereka bahkan sudah menyiapkan stok sejak tahun baru di gudang Perintis Kemerdekaan. "Selama Covid ada juga Bansos yang kami salurkan ke masyarakat," jelasnya.

Yang jelas, langkah penyaluran beras bagi ASN dan keluarganya di Sumsel dan pada gilirannya juga meluas ke masyarakat merupakan bentuk nyata perhatian Gubernur HD terhadap petani yang kerap kali dihadapkan dengan harga gabah dan beras yang tidak menguntungkan.

Oleh sebab itu, kata dia, Pemprov Pemprov Sumsel melalui Bulog mem-

beli beras produksi petani dengan harga yang wajar. Selanjutnya beras tersebut dibagikan pada ASN di lingkungan Pemprov secara cuma-cuma sebagai insentif tambahan.

"Jangan sampai petani merasa digenot produksinya, tapi kita tidak memperhatikan pemasaran hasilnya. Nah sekarang beras petani, kita beli melalui Bulog. Selanjutnya beras itu, kita bagikan pada pegawai. Harapan kita petani senang, ASN senang," ujarnya di awal-awal peluncuran program ini pada 2019.

Sejak awal pula Gubernur HD meminta Perum Bulog membeli beras dari petani di Provinsi Sumsel. Kurang layak membeli beras dari luar daerah. Terlebih lagi, Sumsel adalah wilayah swasembada (dapat mencukupi kebutuhan sendiri) untuk permintaan warga di provinsi yang pada 2020 ini tercatat berpenduduk belum sampai sembilan juta jiwa ini, dibandingkan dengan DKI Jakarta pada periode sama dengan yang sudah melampaui 10 juta.

Nah, Gubernur HD juga sejak awal menekankan Bulog harus memperhatikan mutu beras sesuai dengan standard yang telah disepakati. Selain itu pemda juga meminta label kemasan beras un-

tuk ASN tercantum logo Pemprov Sumsel, serta tidak diperkenankan diperjualbelikan di pasaran. "Saya tidak mau mutunya di luar standard. Kontrak kami berasnya premium. Quality control kita lakukan bersama," ujarnya.

Gubernur HD menegaskan program insentif beras tidak memotong uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang selama ini sudah ada, karena murni insentif atau bonus yang diberikan oleh Gubernur sebagai apresiasi kepada ASN dan perhatian khusus kepada petani. Kla itu juga ia juga langsung mengintruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait membuat edaran ke 17 Bupati/Walikota di Provinsi Sumsel, terutama daerah penghasil beras untuk melihat ketersediaan stok beras yang ada di daerah masing-masing.

di lingkungan Pemprov Sumsel mendapatkan insentif beras sebesar 10 kg per bulan dan untuk honorer sebesar 5 kg per bulan.

Secara keseluruhan, Sumsel adalah bejana, jika belum bisa menyebutnya sebagai lumbung beras nasional. Dari 10 provinsi dengan produksi beras tertinggi, Sumsel duduk di urutan lima besar. Data BPS pada 2020 yang menghimpun produksi riil 2019 untuk padi, gabah, dan beras nasional menunjukkan gambaran daerah produsen beras nasional berikut:

1. Jawa Tengah, luas panen 1,6 juta hektar hasilkan 9,6 juta ton GKG, setara 5,5 juta ton beras.
2. Jawa Timur, luas panen 1,7 juta hektar hasilkan 9,5 juta ton GKG, setara 5,4 juta ton beras.
3. Jawa Barat, luas panen 1,5 juta

hasilkan 1,7 juta ton GKG, setara 983.572 ton beras.

9. Sumatra Barat, luas panen 311.671 hektar hasilkan 1,4 juta ton GKG, setara 850.794 ton beras.
10. Banten, luas tanam panen 303.731 hektar hasilkan 1,47 juta ton GKG, setara 843.627 ton beras.

Untuk 2020, di tengah wabah Covid-19 yang belum mereda ini, menurut data resmi Badan Pusat Statistik, produksi beras Sumsel masih akan naik 2,69 juta ton gabah kering giling (GKG). Masih naik hampir empat persen dari angka 2019. Sentra produksi beras Sumsel terutama berlokasi di Kabupat-

“

Saya minta di sini, kita juga harus bersepakat untuk disiplin, disiplin distribusi artinya Bulog juga harus siap ada cadangan jangan sampai terseok-seok dalam hal waktu distribusi kepada ASN dan honorer



"Saya minta di sini, kita juga harus bersepakat untuk disiplin, disiplin distribusi artinya Bulog juga harus siap ada cadangan jangan sampai terseok-seok dalam hal waktu distribusi kepada ASN dan honorer," katanya.

Sejauh ini, penerima insentif tambahan berupa beras tercatat menjangkau 30.269 personel. Rinciannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) 16.040 orang dan untuk honorer 14.229 orang. Bagi ASN suami/istri/janda/duda yang bekerja di lingkungan Pemprov Sumsel mendapatkan beras sebesar 20 kg per bulan. Sedangkan ASN yang belum menikah

hektar hasilkan lebih 9 juta ton GKG, setara 5,2 juta ton beras.

4. Sulawesi Selatan, luas panen lebih 1 juta hektar hasilkan padi 5,05 juta ton GKG, setara 2,8 juta ton beras.
5. Sumatera Selatan, luas panen 539.316 hektar hasilkan 2,6 juta ton GKG, setara 1,4 juta ton beras.
6. Lampung, luas panen 464.103 hektar hasilkan 2,1 juta ton GKG, setara 1,2 juta ton beras.
7. Sumatra Utara, luas panen 413.141 hektar hasilkan 2,07 juta ton GKG, setara 1,1 juta ton beras.
8. Aceh, luas panen 310.012 hektar

en Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur. Yang terakhir ini adalah daerah asal Gubernur Herman Deru, tempat ia pernah menjadi Bupati selama dua periode.

Dengan segenap kekuatan pangannya, Gubernur Herman Deru pun menerima Pin Emas dari Kementerian Pertanian RI pada 12 Desember 2020. Jadi, bukan hanya ASN dan honorer, melainkan segenap warga Sumsel sudah sepatutnya pantang kelaparan dengan beras premium sebagai standar kualitas. ●



PIN EMAS UNTUK GUBERNUR HD

Memang pantas Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meraih Pin Emas dari Kementerian Pertanian RI. Ia menguatkan posisi Sumatera Selatan sebagai bejana beras nasional, duduk di deretan lima besar Provinsi Penghasil Beras Nasional 2019, sesuatu yang telah ia rintis sejak menjadi Bupati di Ogan Komering Ulu Timur dulu.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerapkan metode Kerangka Sampling Area (KSA) menunjukkan Sumsel pada 2019 menghasilkan 2,6 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 1,4 juta ton beras, dengan luas panennya 539.316 hektar. Sementara data KSA dari BPS mencatat produksi nasional 2019 mencapai 31,31 juta ton beras. Hingga akhir Desember 2019 tercapai surplus berupa stok 5,90 juta ton.

Pin Emas diterima Gubernur Herman Deru bersamaan dengan acara pembukaan Pelatihan dan Pembekalan bagi 1.000 tenaga pendamping penyuluh pertanian, POPT dan PBT. Pin Emas disematkan oleh Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (PPP) Pusluhan, Joko Samiyono mewakili Kementerian Pertanian RI.

Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi mengharapkan penyuluh di seluruh Sumsel, untuk semakin giat mengawal dan mendampingi petani. Harapannya, dapat mendukung Sumsel mempertahankan capaiannya, bahkan layak naik peringkat asalkan para penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian

selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) terus berupaya meningkatkan kinerjanya.

"Peningkatan produksi di 10 provinsi tentu atas sinergi Kementan dan pemerintah daerah serta dukungan pihak-pihak terkait. Kementan melakukan berbagai terobosan seperti mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemanfaatan lahan rawa serta percepatan olah lahan dan tanam," kata Dedi Nursyamsi.

Dia menambahkan, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan peningkatan kapasitas produksi beras, dengan percepatan tanam padi Musim Tanam II pada Oktober 2020 hingga Maret 2021 (MT II Okmar) seluas 5,6 juta hektar didukung optimalisasi lahan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan komitmen Gubernur HD adalah merealisasikan rekrutmen 1.000 tenaga pendamping penyuluh selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT). "Meningkatkan hasil produksi pertanian, sulit dicapai tanpa pembekalan bagi penyuluh pendamping petani. Pemprov merekrut seribu penyuluh baru untuk mengawal petani berproduksi," tandas Gubernur Herman Deru saat membuka pelatihan di Desa Peracak, Kecamatan Matapura, OKU.

Nak apo lagi oi... •



BERHARAP SENGKETA LAHAN DI JAMBI SIRNA

Provinsi Jambi tercakup sebagai penerima surat keputusan (SK) untuk Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia dari Presiden Joko Widodo di awal 2021 ini. Untuk Jambi, Presiden menyerahkan 64 SK Hutan Sosial dengan luas 32.500,92 hektare, bagi 9.424 Kepala Keluarga.

Secara kesleuruhan, Presiden menyerahkan sebanyak 2.929 SK Hutan Sosial yang mencakup lahan seluas 3.442.460,20 hektare bagi 651.568 kepala keluarga di seluruh Tanah Air, 35 SK Hutan Adat yang mencakup lahan seluas 37.526 hektare, dan 58 SK TORA yang mencakup lahan seluas 72.074,81 hektare untuk 17 provinsi.

Kepala Negara menginginkan acara penyerahan SK kepada masyarakat ini bukan sekadar bersifat seremonial belaka. Untuk selanjutnya, kata Presiden, harus dapat dipastikan bahwa SK tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima dan pengelola lahan hutan yang diberikan pemerintah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan.

"Ini akan saya ikuti, cek terus, untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif. Tidak kemudian ditelantarkan, tetapi terus dikembangkan sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi masyarakat. Tujuannya ke situ," ujarnya dalam acara yang berlangsung pada Kamis, 7



Januari 2021 didampingi sejumlah anggota kabinet, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Khusus untuk Jambi, Gubernur Dr Drs H Fachri Umar MHum dan masyarakat penerima SK di Provinsi Jambi hadir untuk menerima SK dari Presiden secara virtual, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Hadir pula pada kesempatan tersebut Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir.Muhammad Said, MM dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari.

Hasmon Ovezar mewakili KTH Karang Jaya, Desa Sungai Karang serta Sugiyo dan Miswanto mewakili KTH Wana Mitra Lestari, Desa Napal Putih turut hadir dalam penyerahan secara

virtual oleh Presiden RI didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersebut. Kedua KTH mendapatkan SK Pengakuan dan Perlindungan (Kulin) Kemitraan Kehutanan (KK) yang diserahkan oleh Gubernur Jambi pada 24 Juli 2020 lalu atas kemitraan dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WW).

Sedangkan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Muhammad Said dalam sesi wawancara menyatakan SK ini dikeluarkan agar masyarakat dapat mengelola hutan untuk kesejahteraan. "Di Jambi ini ada 64 SK yang diterbitkan untuk hutan sosial. Secara nasional, Provinsi Jambi memiliki hutan adat yang terbanyak, dan ada beberapa yang masih dalam proses, dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Merangin," ujar Muhammad Said.

Muhammad Said menjelaskan, tujuan diterbitkannya SK ini salah satunya adalah untuk mengurangi konflik antara masyarakat dan perusahaan. "Dengan adanya SK ini diharapkan akan mengurangi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat berjalan bersama, sehingga masyarakat punya legalitas untuk mengelola. Di Provinsi Jambi ada 333 Ha lebih, dan masih ada 133 ribu lebih potensi yang akan terus diberikan hak legalitasnya kepada masyarakat, dan izin yang sudah diterbitkan 414 izin untuk 34.974 KK," ungkap Muhammad Said.

Sugiyo, Ketua KTH Wana Mitra Lestari mengungkapkan ia bersama kelompoknya merasa terbantu dengan adanya kemitraan dengan PT LAJ yang berlangsung sejak September 2019. "Kami mengembangkan program pertanian terpadu untuk ketercukupan pangan petani melalui tanaman sayur mayur dan perikanan," ungkapnya.

Salah satu hal yang menarik, Sugiyo melanjutkan, model pertanian terpadu yang dikembangkan tidak saja memadukan lebih dari dua jenis tanaman dan perikanan. Namun mengutamakan cara bercocok tanam yang memperhatikan lingkungan dengan mengutamakan penggunaan pupuk organik. Petani juga dilatih memanfaatkan sumber daya dan limbah yang ada di sekitar untuk dijadikan pupuk seperti kotoran hewan, sisa sampah rumah tangga, dedaunan dan lain-lain.

yang juga merupakan Ketua Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) menyebutkan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi kemitraan kehutanan yang dijalankan oleh perusahaan seperti yang dilakukan PT LAJ dan PT WW. "Hal ini juga menjadi salah satu resolusi konflik yang nyata bagi perusahaan dan petani yang berada di dalam konsesi perusahaan. Selain itu, contoh baik ini juga harus dicontoh oleh perusahaan lain dalam upaya resolusi konflik," tandasnya.

melalui pengelolaan ini.

Namun, tidak hanya sebatas itu, pengelolaan juga dapat dilakukan misalnya dengan menempuh jalan usaha ekowisata. Nantinya, masyarakat dapat membangun kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta pembelajaran dan pendidikan.

"Saya sudah melihat desa-desa di beberapa provinsi dan kabupaten/



Sementara itu Jan Jacobus Blaauw, Direktur Utama PT Royal Lestari Utama (induk usaha PT. LAJ & PT. WW), mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen membangun perusahaan karet alam yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan sosial, diantaranya melalui kemitraan dengan masyarakat. "Apalagi mendapat dukungan pemerintah dan petani, agar kegiatan yang dilakukan dapat berkelanjutan," katanya.

Kadishut Jambi, Akhmad Bestari,

Penyerahan SK yang merupakan bagian dari kebijakan redistribusi aset dan reforma agraria tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjadi salah satu jawaban bagi banyaknya sengketa agraria. Menurut Presiden, dewasa ini banyak sekali potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan lahan hutan secara legal tersebut. Masing-masing daerah, misalnya, memiliki komoditas produktif unggulannya tersendiri yang dapat dikembangkan

kota sudah masuk ke sana, ke ekowisata, dan laku, menguntungkan, serta memberikan hasil," kata Presiden. Adapun bentuk pengelolaan yang akan ditempuh oleh penerima SK, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran terkait untuk memberikan kemudahan bagi mereka terhadap akses permodalan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Kepala negara juga memandang diperlukan adanya pendampingan yang baik kepada mereka terkait dengan edukasi manajemen

usaha beserta penerapan teknologi.

"Saya kira kalau cara-cara ini dilakukan kita akan bisa memetik keuntungan besarnya pada suatu waktu nanti," ucapnya. Oleh sebab itu, Presiden memberikan tugas bagi jajaran untuk dapat melahirkan terobosan kebijakan yang saling terkonsolidasi antara kementerian, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah agar kebijakan yang ditempuh pemerintah ini benar-benar mampu memenuhi tujuan awalnya.

Tujuan awalnya, ya itu tadi, memberikan dampak signifikan bagi pemerataan ekonomi dan keadilan ekonomi rakyat tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya. "Hutannya bisa dipelihara, tapi keuntungan juga bisa didapat oleh rakyat," tandasnya.

Khusus untuk Jambi, program ini memang sangat mendesak dan relevan. Provinsi ini merupakan salah satu titik-panas (*hotspot*) sengketa agraria yang menjadi sorotan internasional. Antara lain konflik agraria yang berlangsung antara perusahaan minyak sawit PT Erasakti Wira Forestama (EWF) berhadapan dengan penduduk dan kelompok petani setempat di Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Persoalan ini menjadi kompleks karena Erasakti merupakan pemasok bagi raksasa agribisnis pangan Amerika Serikat Archer Daniels Midland (ADM) yang berpusat di Chicago, Illinois dan juga memegang sebagian saham perusahaan Wilmar Internasional, juga satu raksasa pangan lainnya, Bunge, yang berpusat di St Louis, Missouri sehingga menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat internasional seperti Global Witness yang berkantor di Washington, AS, dan London, Inggris.

Laporan Global Witness yang terbit pada Desember 2020 menyoroti kasus Erasakti Wira Forestama di Jambi dalam kaitannya dengan raksasa agribisnis global ADM dan Bunge itu. Terlebih kedua raksasa agribisnis ini juga bertaut dengan produsen pangan siap saji seperti Coca-Cola Company, General Mills, Kellogg's, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, dan Unilever yang mengharuskan pemasok bahan baku mereka hirau pada hak asasi manusia. ●



PEMAIN GLOBAL DI PEDALAMAN INDONESIA

Secara terang-terangan, lembaga swadaya masyarakat Global Witness menuding raksasa agribisnis Amerika Serikat Archer Daniels Midland (ADM) dan juga Bunge membeli minyak sawit dari pabrik di Indonesia yang secara terbuka terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, konflik agraria, serta perusakan lingkungan. ADM dan Bunge adalah pemain utama dalam industri minyak sawit global yang sanggup menampung pasokan dari 800-1.000 pabrik minyak kelapa sawit di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sedangkan ADM adalah pemegang saham penting di Wilmar International Limited, pedagang minyak sawit terbesar di dunia, sementara Bunge memiliki 70 persen saham di raksasa industri IOI Lodders Crocklaan.

Dalam laporan yang terbit pada Desember 2020, LSM Global Witness berbasis di London menemukan bahwa 129 dari 330 pemasok ADM dan Bunge sampel investigasi ternyata terlibat dalam pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah, mengkriminalisasi atau menyerang para pembela HAM, dan atau menyebabkan kerusakan lingkungan serius. "Hampir 40 persen dari pabrik kelapa sawit yang menjadi sampel terlibat tuduhan yang meyakinkan, namun hampir tidak satu pun dari tuduhan ini yang diselidiki atau ditangani oleh kedua perusahaan," kata Ali Hines, juru kampanye senior di Global Witness.

Global Witness mengidentifikasi 658 pabrik yang menjual minyak sawit ke ADM dan Bunge, dan memilih untuk melihat 330 di antaranya dipilih secara acak melalui pencarian internet menggunakan kata kunci untuk dugaan pelanggaran hak atas tanah dan atau konflik terkait antara anggota masyarakat dan perusahaan pabrik. Muncul kemudian temuan sepanjang lima tahun terakhir, antara lain bahwa 17 persen pabrik memiliki konflik aktif dan berkelanjutan pada 2019 dan 2020. Sembilan dari perselisihan ini telah berlangsung selama satu dekade atau lebih dan menjadi subyek dari banyak kasus. laporan media.

Selain itu, 26 persen pabrik yang dijadikan sampel dituduh oleh masyarakat setempat telah mengambil alih lahan mereka. Dalam delapan kasus ini, secara terang-terangan muncul pengakuan bahwa masyarakat telah terusir dari tanah mereka. Menurut Global Witness, jumlah kasus penggusuran yang tak dilaporkan bahkan mungkin lebih tinggi.

Alhasil, investigasi Global Witness menyimpulkan, hampir 2 dari 5 sampel pabrik yang memasok ADM dan Bunge terlibat dalam pelanggaran hak masyarakat dan hak masyarakat adat atas tanah; gagal dalam menegakkan hak-hak pembela HAM untuk beroperasi secara bebas dan aman; dan/atau gagal mencegah atau mengurangi dampak merugikan untuk masyarakat setempat dan lingkungan mereka. ●



PEREMPUAN, BUPATI, DAN JEMBATAN TERJORA

Meskipun perempuan, Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Dr Hj Anna Muawanah yang pernah menjadi Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa sangat hirau pada proyek Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (Terjora).

Jembatan itu akhirnya membentang melalui kerja sama pembiayaan dengan kabupaten tetangga.

Maklum sajalah, Jembatan Terjora ini akan menjadi penunjang pengembangan kawasan di wilayah Bojonegoro, terutama di Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho. Menurut Bupati Anna, Desa Luwihaji, seberang timur Bengawan Solo, di Bojonegoro, merupakan salah satu wilayah yang selama ini terpencil dan terisolasi sehingga akses ekonomi dan juga air bersih sangat sulit terjangkau jika musim kemarau.

Di mata Ibu Bupati, Jembatan Terjora yang menghubungkan secara langsung antara Kecamatan Ngraho Desa Luwihaji Kabupaten Bojonegoro Jawa

Timur dan Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah, memang sangat vital. "Pembangunan jembatan ini akan menunjukkan kontribusi besar pemerintah sekaligus perhatian penuh di bidang infrastruktur untuk meningkatkan sarana kerja sehingga target pembangunan dapat terwujud. Dengan prasarana fisik jembatan sebagai faktor penunjang, pengembangan suatu wilayah akan lebih terpacu," ungkap Anna.

Untuk itu, Ibu Bupati juga tak sungkan mengeluarkan biaya lebih besar untuk membangun bagian wilayahnya yang relatif lebih terbelakang dibandingkan dengan kawasan lain di ka-

bupatennya. Maka dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro 2020 pun keluar sebanyak Rp97,632 miliar untuk mewujudkan jembatan ini. Sedangkan Kabupaten Blora yang menjadi mitra pembiayaan mengeluarkan biaya APBD 2020 senilai Rp8,251 miliar.

Alhasil, membentanglah Jembatan Terjora dengan panjang 412 meter dan lebar tujuh meter. Kontraktor pelaksana PT Dwi Ponggo Seto dari Yogyakarta. Dalam proyek ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUPR) berperan dalam melaku-



kan loading test atau uji beban dan uji kelayakan operasi jembatan.

Sekadar info saja, Kepala Dinas PU Bina Marga dan PR Bojonegoro adalah kaum hawa juga seperti Ibu Bupati. Namanya Retno Wulandari ST

Loading test berlangsung pada pada 1 Juli 2020, hanya satu bulan setelah pembangunan Jembatan Tenjora mulai. Loading test dilakukan oleh tim penguji dari Graha Survei Indonesia (GSI) untuk mengetahui berapa batas beban kendaraan yang bisa melalui jembatan tersebut. Lolos sudah. Lolos uji beban, pembangunan jembatan terus berlanjut.

Hingga dua bulan sebelum peresmian, Bu Anna tampaknya masih was-was Jembatan Tenjora bakal mangkrak. Maka ia pun memastikan bahwa tahap akhir (finishing) proyek ini berjalan mulus. Ia pun mengunjungi lokasi proyek Jembatan Tenjora pada Senin, 2 November 2020. Kala itu proyek itu masih bernama Lume (Luwihaji-Medalem) singkatan dua desa yang terhubung di sisi timur dan barat Bengawan Solo.

Kunjungan di awal musim penghujan ini memang bertujuan memastikan bahwa progres pembangunan jem-

batan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pertimbangannya, elevasi tinggi muka air Sungai Bengawan Solo sedang naik seiring datangnya musim penghujan saat ini. Boleh jadi, luapan air Bengawan Solo seperti syair lagu ciptaan Gesang itu, "meluap sampai jauh" akan menjadi kendala pembangunan jembatan Lume.

Bupati Anna datang bersama Kadis PUBM-PR Retno Wulandari. Turut mendampingi, antara lain Kepala Bidang (Kabid) Jembatan dan Peralatan, Dinas PUPR, Wardi AMd, Camat Ngraho, Syaiful. Mereka melihat sejauh mana kemajuan pengerjaan proyek jembatan oleh kontraktor pelaksananya.

"Kami ingin memastikan kondisi pembangunan Jembatan Lume berjalan sesuai rencana, karena saat ini memasuki musim penghujan, yang tentunya tinggi muka air sungai Bengawan Solo meningkat. Apakah kondisi tersebut berdampak pada proses pembangunan Jembatan Lume," tutur Bupati Anna saat itu.

Sedangkan Kadis Retno mengatakan, laporan terakhir bulan sebelumnya, proyek Lume sudah mencapai 60 persen tersebut, meliputi pemasangan

gelagar baja dan pemasangan lantai jalan. Ia pun berharap pengerjaan jembatan itu, sesuai dengan target yang telah ditentukan. "Kita berharap pengerjaan tersebut bisa rampung pada akhir tahun dan bisa beroperasi pada awal tahun 2021 mendatang," ujarnya.

Dalam proyek ini, Retno mengingatkan agar kontraktor pelaksana dapat mempercepat pembangunan. Alasannya, beberapa wilayah di bantaran Sungai Bengawan Solo sudah memasuki musim penghujan, bahkan dengan intensitas yang cukup tinggi dan berdampak terhadap volume air. "Mengingat curah hujan sudah cukup tinggi intensitasnya di beberapa wilayah, kami mengintruksikan percepatan pekerjaan. Namun, juga tetap harus memperhatikan metode kerja, kualitas dan kuantitas," ungkapnya

Nah, Kabid Jembatan dan Peralatan, Dinas PUPR Kabupaten Bojonegoro, Wardi AMd menjelaskan bahwa meskipun kondisi tinggi muka air Bengawan Solo saat ini berangsur naik, dampaknya tak terlalu signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan Jembatan Lume ini. "Alhamdulillah proses pembangunan tetap berjalan normal

seperti harapan kita bersama,” kata Wardi.

Dua bulan menjelang peresmian itu, Wardi juga melaporkan tahap pembangunan Jembatan Lume sudah mencapai 80 persen, meliputi pemasangan rangka baja. “Dari sisi barat, wilayah Blora, sudah terpasang satu segmen. Demikian juga di sisi timur, wilayah Ngraho, Bojonegoro, juga sudah terpasang satu segmen. Proses pemasangan rangka baja akan digen-jot,” ujar Wardi.

Wardi juga memohon doa restu war-

gan kemajuan proyek Jembatan Lume ini. Subki menjelaskan, jembatan ini dibangun dalam waktu yang cukup singkat yaitu selama enam bulan sembilan hari.

Menurut dia, kehadiran Jembatan Lume ini dapat menjadi pemicu kemajuan ekonomi dan akses sosial antara Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro. Selama ini, kata dia, warga Blora Selatan ketika ingin ke Ngraho dan Ngawi ataupun sebaliknya harus berputar puluhan kilometer melewati Kecamatan Cepu. Alternatifnya, meng-

han kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih. “Jadi, susah banget air bersih di sana. Rumah pun sebagian terbuat dari bilik. Meski ada rumah bagus, tapi tidak ada akses air bersihnya. Kan tetap menjadi sulit untuk maju dan mengundang kalangan bisnis maupun investor,” kata dia.

Terlebih lagi, proyek Lume ini menerapkan konsep pembangunan kawasan, bertujuan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat di dua kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Blora sekaligus memacu perkembangan wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Timur secara bersamaan.

Tanda-tanda pembangunan kawasan itu juga terlihat di Blora yang tengah membenahi bandar udara di Kecamatan Ngloram. Menurut rencana, Bandara Ngloram akan beroperasi tahun ini sebagai pengumpan (spoke) yang melayani penerbangan tujuan Semarang, Balikpapan, Halim Perdanakusuma Jakarta, Malang, dan Banyuwangi.

Bandara Ngloram yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Jembatan Terjora sebelumnya milik PT Pertamina (Persero), kemudian diserahkan kepada pemerintah pada 2018 lalu. Bandara ini rencananya dibangun menjadi bandara komersial dengan landas pacu sepanjang 1.500 meter untuk mempercepat akses mobilisasi warga setempat dan membuka kantong-kantong ekonomi baru. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan Blora dan Bojonegoro yang dipisahkan oleh Bengawan Solo itu akan semakin terintegrasi.

Tak mengherankan jika acara peresmian Jembatan Lume pada Minggu, 3 Januari 2020 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut hadir. Malah dua menteri lain hadir di acara peresmian: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sudah selayaknya Ibu Bupati Anna tersenyum lega. Proyek Jembatan Lume sudah tuntas dan resmi beroperasi seiring pembukaan tahun 2021.

Tapi mengapa nama Jembatan Lume menjadi Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) Bu Anna? Kita sebut Jembatan Terjora saja, sama-sama kepanjangan Terusan Bojonegoro-Blora. ●



ga masyarakat Bojonegoro dan Blora, agar pembangunan jembatan Lume tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menemui hambatan, serta dapat selesai tepat waktu. “Tetap mohon doanya agar proses pembangunan selesai tepat waktu, pokoknya kita secara rutin melakukan pengawasan pembangunan jembatan ini,” kata Wardi.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Kementerian PUPR Achmad Subki ternyata mengikuti juga perkemban-

gunakan perahu menyeberangi Bengawan Solo.

Dengan adanya Jembatan Lume ini otomatis dapat memangkas waktu tempuh dari yang biasanya 2-3 jam, saat ini menjadi sekitar 30 menit saja. Subki menerangkan, di sekitar Jembatan Lume merupakan wilayah yang umumnya miskin dan kesulitan akses air bersih.

Karena itu, sambungnya, keberadaan jembatan sangat penting terutama dalam memudahkan pemenu-



3 MENTERI HADIR MERESMIKAN JEMBATAN TERJORA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (erjora) yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan Jawa Tengah (Jateng), Minggu, 3 Januari 2020. Rupanya pembangunan jembatan ini akan berdampak positif pula untuk konektivitas dengan Kabupaten Nagwi, Jawa Timur

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, berlanjut dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, dan Bupati Blora Djoko Nugroho. Sayang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhalangan lantaran masih menjalani isolasi mandiri di tengah wabah Covid-19

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam sambutannya mengatakan sejatinya rakyat itu pemikirannya tidak ada batas antarprovinsi. "Justru pemerintah yang pemikirannya ada batas. Jadi rakyat itu merasa tidak ada batas. Jadi oleh karena itu inisiatif yang menjembatani antar kabupaten, antar provinsi merupakan inisiatif yang luar biasa, yang harus kita dukung penuh," kata Mensesneg, putra kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Pratikno juga menyebut, bahwa Menteri PUPR mempunyai

sejarah panjang dengan Kecamatan Ngraho, Bojonegoro dan pernah tinggal di sana. Jadi, kata Mensesneg, sudah sepatutnya Menteri Basuki membantu meningkatkan konektivitas dan pemabangunan kawasan di sejumlah wilayah.

Menanggapi Pratikno, Menteri Basuki pun angkat bicara. Ia mengatakan, kehadiran Jembatan Terjora yang menghubungkan Desa Luwihaji di Kecamatan Ngraho, Bojonegoro dengan Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Blora diharapkan memacu kegiatan ekonomi di daerah sekitar dapat terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

"Kami merasa pengembangan wilayah tidak akan mungkin terjadi tanpa konektivitas. Hanya dengan konektivitas, kami percaya kawasan ini bisa menjadi kawasan yang tidak terisolir, dan bisa maju dengan sendirinya, terlebih dengan adanya kepala daerah yang aktif," kata Menteri Basuki memuji Bupati Anna dan Bupati Djoko.

Ia juga menyampaikan sangat mengapresiasi pembangunan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora yang dibangun atas prakarsa dua kabupaten, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. "Saya kira inisiatif pemerintah daerah seperti ini merupakan hal yang sangat bagus sekali dan kami akan mendukung," tutur Menteri Basuki.

Ayo, siapa lagi yang bisa bekerja sama seperti di proyek pembangunan Jembatan Terjora? Kita tunggu bersama-sama. ●

► Bupati Iti Octavia Jayabaya

PEREMPUAN PERKASA DARI KABUPATEN LEBAK

Sulit menyangkal bahwa Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya adalah perempuan perkasa. Bukan soal mudah mengelola kabupaten yang rawan bencana hidrometeorologi. Lebih dari itu, Ibu Bupati ini berhasil memajukan wilayahnya sehingga keluar dari status kabupaten tertinggal sejak 2019 lalu.

Saat giliran La Nina tiba, kabupatennya senantiasa harus siaga bencana. Harap maklum, La Nina, sebagai fenomena cuaca berupa penurunan suhu laut di kawasan khatulistiwa beriklim tropis di Samudera Pasifik, akan menyebabkan curah hujan di kawasan Nusantara lebih tinggi dari biasanya. Tambahan pula peningkatan kecepatan angin yang meningkat. Ringkasnya, La Nina adalah potensi bencana hidrometeorologi yang terkait dengan peningkatan kecepatan angin dan curah hujan tinggi.

Potensi bencana yang menyertai La Nina antara lain banjir, tanah longsor, genangan, banjir bandang, angin kencang, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem terutama hujan lebat disertai angin kencang serta kilat atau petir. Begitu pula potensi Kabupaten Lebak saat dampak La Nina kali ini diperkirakan berlangsung antara November 2020 hingga Maret 2021.

Namun, masih segar dalam ingatan, bencana banjir bandang melanda



kabupaten yang beribu kota di Rangkasbitung ini. Pada hari pertama tahun lalu, 1 Januari 2020, banjir bandang menerjang Lebak. Dampaknya, antara lain rusaknya 30 jembatan di kabupaten ini. "Amblasnya jalan juga menjadi suatu kendala. Ada sekitar 30 jembatan baik permanen, semi permanen dan jembatan gantung yang putus dan tidak berfungsi," ujarnya, Senin, 6 Januari 2020.

Bukan jembatan putus dan jalan amblas yang menjadi masalahnya. Bupati Iti lebih memikirkan keselamatan warga. Bayangkan saja sulitnya mengevakuasi warga terdampak banjir dan

mengunjungi wilayah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Adalah warga Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong yang ingin Bupati Iti kunjungi. Warga yang terdampak bencana hidrometeorologi itu sampai harus menyelamatkan diri dan mengungsi ke dataran tinggi Cibandung lantaran wilayah permukiman yang berada di sekitar sungai sudah tersapu banjir bandang.

Kampung Cigobang, Banjarsari itu berlokasi sekitar 50 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Lebak ke arah tenggara. Lokasinya relatif dekat dengan

gan Bupati Iti menyebar (viral) di media sosial, antara lain di akun Instagramnya @viajayabaya.

Dalam video itu tampak, meski perkasa, toh Bupati Iti tak sanggup membendung air atau kesedihan melihat warganya yang terkena musibah dan berusaha menyintas dari bencana. Sambil menangis Bupati memeluk satu persatu penyintas bencana yang bertahan di pegunungan.

Selanjutnya ia berusaha memotivasi warganya agar tetap bersabar atas musibah yang menimpa. "Sabar nyah kabehan nyah (sabar ya semuanya)," kata Iti sambil memeluk para korban.



menyalurkan bantuan untuk mereka manakala banyak jembatan putus dan jalur transportasi darat banyak yang amblas. Wilayah yang semula memiliki akses transportasi langsung menjadi kawasan terisolir.

Toh perempuan Bupati perkasa kelahiran 4 Oktober ini ternyata tak kehilangan akal. Ia gunakan helikopter untuk mengatasi kendala mendatangi warga terdampak banjir di wilayah kabupatennya. Pada Minggu, 5 Januari 2020 lalu misalnya, Ibu Bupati ini terbang menggunakan helikopter untuk

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, sekaligus perbatasan Kabupaten Lebak, Banten dengan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Maka, jadilah Bupati Iti terbang ke sana dengan helikopter. Tak lupa bantuan logistik ia siapkan dalam penerbangan itu.

Namun, sesampai di lokasi, ternyata bukan sekadar menyampaikan bantuan logistik yang ia serahkan. Lebih dari itu, ia juga menjemput warganya terutama bayi dan ibunya, serta sejumlah lansia menggunakan helikopter milik TNI. Tak pelak rekaman video kunjung-

Tiba-tiba seorang warga menghampiri Ibu Bupati, memberitahu bahwa di lokasi pengungsian ada seorang bayi dan beberapa lansia yang sedang sakit-sakitan. Tak berpikir panjang Iti pun berlari menghampiri bayi tersebut dan langsung menggendongnya.

Kemudian, Iti kembali ke helikopter dengan membawa sebanyak 13 orang terdiri dari 12 lansia dan satu bayi ke lokasi yang lebih aman di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Selanjutnya para korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan per-



awatan medis dan makanan untuk memulihkan kembali kondisi para korban.

"Apapun akan saya memperjuangkan untuk saudara-saudara kita di lokasi terdampak musibah ini. Doakan saya agar selalu mengabdikan diri untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Betapapun tidak mudah yang kita lewati yang kita bisa lewati ini bersama," ujar Iti dalam caption Instagramnya.

Sebenarnya bukan sekali ini saja Bupati Lebak ini viral di media sosial. Setelah video banjir bandang itu, pada Februari 2020, misalnya, tindakannya memarahi sejumlah sopir truk pengangkut tanah merah yang merusak jalan dan jembatan. Istilahnya *over dimension overload (ODOL)*, melebihi kapasitas dan daya angkut.

"Jembatan aing rusak ku daraira, jalan rusak, ngenah bae (jembatan saya rusak sama kalian, jalan rusak, enak saja)," kata Iti dengan logat Sunda-Banten yang khas.

Dalam akun Instagramnya @viajaya-baya, Bupati Iti mengatakan, truk-truk yang mengangkut tanah merah terse-

but merugikan Kabupaten Lebak karena merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang dibangun oleh uang negara. Iti mengklaim, sudah berulang kali mengingatkan dan sudah berkali-kali berupaya menertibkan truk ODOL pengangkut tanah merah itu. Namun mereka tetap membandel.

Selain memarahi sopir truk, Bupati Iti juga menyambangi dua lokasi penggalian tanah merah di kawasan Curugbitung. Di sana, bupati kembali meluapkan kemarahannya ke sopir dan petugas di penggalian. Terlebih tanah yang diangkut oleh truk di dua lokasi tersebut dibawa ke luar Kabupaten Lebak. Alhasil, kunci kontak puluhan kendaraan dan alat berat pendukung aktivitas penggalian tanah pun ia sita.

"Tidak ada cara lain, kami amankan kunci-kunci mobil angkutan dan alat beratnya, apabila masih punya itikad baik, silahkan datang temui saya," tantang Iti dalam keterangan di akun Instagramnya.

Biasanya, rekaman video Bupati Iti yang viral adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan keberanian

dan keperasaannya sebagai Bupati. Iti sendiri mengaku aktif di media sosial agar tidak gagap teknologi. Kontennya pun, kata dia, sebagian besar merupakan kegiatan pribadi dan keluarga.

Bupati Iti mulai aktif di Instagram dengan akun @viajayabaya. Pengikutnya pada awal 2021 ini hampir mencapai 69 ribu follower. Sejak dibuat hingga sekarang, Iti mengaku tidak punya tim khusus untuk menangani Instagram pribadinya ini.

"Dikelola sendiri, gak punya tim khusus untuk medsos, akun Instagram saya tidak terkonsep. Untuk posting juga gimana mood saya saja, kalau nemu hal bagus dan kata-katanya cocok baru posting," kata Iti.

Dengan mengelola sendiri, ia langsung dapat melihat reaksi terhadap apa yang ia muat di akun Instagramnya. "Yang nyinyir ada juga. Namanya hidup, tidak semua suka sama saya," ungkapnya.

Tapi agaknya, sebagian besar warga Lebak lebih menyukai memiliki Bupati seperti Bu Iti ini. Setidaknya, ia telah dua kali terpilih sebagai Bupati di kabu-

patennya. Mulai menjadi Bupati pada 2014 menggantikan ayahnya, Mulyadi Jayabaya (Bupati periode 2003-2013), Iri Octavia baru akan mengakhiri periode keduanya pada 2024 mendatang.

Nah, di periode kedua pemerintahannya, Bupati Iri juga menorehkan prestasi berhasil membawa Lebak keluar dari status kabupaten tertinggal. Tak urung, kabar baik itu ia unggah pula di akun Instagram. "Kemarin, tepat di Penghujung Juli 2019, Kami mendapat kabar membahagiakan, bahwasanya melalui KepMen 79 Tahun 2019, Kabupaten Lebak termasuk dalam 62 Kabupaten Tertinggal yang terentaskan dalam rentang 2015 - 2019," tulis Iri di akun Instagramnya sambil membagikan surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kamis, 1 Agustus 2019.

Untuk keluar dari status kabupaten tertinggal, syaratnya antara lain memajukan kawasan pedesaan di wilayah masing-masing berdasarkan kriteria Indeks Desa Membangun (IDM). Untuk Lebak, perbandingan dapat dilihat dari jumlah desa dengan berbagai status dari 2015-2019. Desa sangat tertinggal yang semula 28 berkurang menjadi 15 desa, tertinggal berkurang dari 229 menjadi 180 desa, yang berkembang meluas dari 76 menjadi 131 desa, dan yang maju naik dari tujuh menjadi 14 desa.

Namun kata Bupati Iri, capaian tersebut bukan akhir dari perjuangan masyarakat Lebak. Menurut dia masih banyak yang harus Kabupaten Lebak kerjakan. "Kekurangan di sana sini merupakan keniscayaan yang harus kita upayakan dan kita entaskan," ujarnya

Nah, saat wabah Covid-19 belum juga mereda, Bupati Iri menjaga akun Instagramnya untuk tetap interaktif dengan warganya. Antara lain untuk imbauan agar tetap di rumah saja, hingga buka endorse gratis untuk membantu UKM lokal.

"Saya lakukan promo di akun pribadi, katanya laku kalau saya posting, gratis saja, tujuannya bantu UMKM, semoga saja banyak yang beli, apalagi saat pandemi seperti sekarang," tandas Bupati yang pernah menjadi Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini. ●

SANJUNGAN SBY UNTUK IRI OCTAVIA JAYABAYA

Rupanya sepak-terjang Iri Octavia Jayabaya mendapat perhatian bukan saja dari warga biasa. Malah boleh dibilang, dampak politisnya pun terasa. Terlebih Bupati Iri adalah politisi yang juga menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten.

Mudah memahaminya jika Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga pendiri Partai Demokrat, sampai harus melayangkan surat khusus berisi apresiasi, malah sanjungan, untuk Bupati Iri. Ini memang terkait dengan rekaman video yang viral ketika Bupati Lebak itu mengunjungi warga penyintas banjir bandang di wilayahnya.

Surat terbuka dari SBY itu juga dipublikasikan di situs resmi Partai Demokrat, demokrat.or.id, sejak Kamis, 9 Januari 2020. Berikut kutipannya:

Dari : SBY

Kepada : Bu Iri Jayabaya

Saya mengikuti cara-cara Ibu Iri Jayabaya sebagai seorang Bupati dalam menangani bencana banjir di Lebak. Saya bersyukur dan bangga karena cara-cara seperti itulah yang harus dilakukan seorang pemimpin. Juga diharapkan oleh rakyat.

Tidak mudah menyalahkan, tidak hanya bicara tapi melaksanakan aksi nyata di lapangan.

Ada 2 karakter pemimpin yang baik dalam menghadapi bencana atau krisis yang mengakibatkan kesulitan/penderitaan rakyat. Pertama, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk secara langsung mengatasi dan menyelesaikan musibah atau krisis itu.

Yang kedua, dia memiliki rasa empati yang tinggi (deep sense of empathy) terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan yang mendalam.

Teruslah berbuat untuk rakyat Lebak dengan cara menyelesaikan dampak dari bencana banjir ini hingga tuntas.

Sekali lagi saya suka dan bangga memiliki kader Demokrat yang menjadi pemimpin rakyat seperti Ibu Iri. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun Ibu Iri dalam mengemban tugas dan amanah rakyat.

Salam. ●



SATU DEKADE MEMBANGUN KOTAWARINGIN TIMUR

► Supian Hadi Sampaikan Kado Terakhir untuk Warganya

Sudah 10 tahun Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Supian Hadi mengabdikan untuk masyarakat. Jabatannya sebagai orang nomor satu di kabupaten ini berakhir pada Februari 2021.

Banyak sekali kinerja positif Supian Hadi sebagai Bupati Kotawaringin Timur yang beribu kota di Sampit, Kalimantan Tengah. Pria kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatan, 21 Februari 1976 tersebut meningkatkan sejumlah aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur.

Semua pencapaian tersebut dapat terlihat melalui data pen-

capaian kinerja pada 2020 lalu. Dalam bidang pendidikan misalnya, tingkat kelulusan sekolah dasar dan madrasah ibtidayyah mencapai 100 persen. Sementara untuk angka kelulusan sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah mencapai 99,8 persen.

Pada aspek kesehatan, di antaranya yakni cakupan balita gizi buruk atau stunting, yang mendapatkan perawatan sebesar 100 persen. Sementara cakupan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah dengue juga 100 persen.

Urusan infrastruktur, atau pekerjaan umum dan penataan ruang, Supian

Hadi bersama wakilnya M Taufiq Mukri, berhasil meningkatkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 50,85 persen, dari keseluruhan kabupaten yang berjumlah 2.024,06 Kilometer.

Namun, ia tak berhenti sampai di situ. Di sisa jabatannya yang tinggal menghitung hari, dia masih berambisi untuk membuka jalan-jalan penghubung antardesa.

"Pada 2021 ini rencananya akan kembali membuka jalan-jalan baru menuju semua desa se-Kotim," ucap Supian ketika diwawancarai INFO INDONESIA awal Januari 2021.





KERJA KERAS - Bupati Supian Hadi dan Wakil Bupati M Taufiq Mukri bersalaman pada saat HUT Kabupaten Kotim pada 7 Januari 2021.

Kemudian untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, persentase rumah tidak layak huni turun drastis menjadi 0,11 persen dari jumlah 73.487 unit.

Pada urusan trantibum linmas yaitu di antaranya gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100 persen. Pelayanan dana penyelamatan serta evakuasi korban bencana juga full 100 persen.

Sementara itu, pada urusan sosial, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah sebesar 100 persen.

Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebesar 100 persen.

Pada urusan tenaga kerja, persentase perselisihan hubungan indus-

trial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama, oleh mediator hubungan industrial sebesar 85,71 persen.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu di antaranya korban kekerasan perempuan yang terlayani 100 persen, dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 21 orang, serta masih banyak kinerja dari berbagai aspek yang berhasil dicapai.

Masuk ke bidang ekonomi, potensi perikanan kini melejit drastis. Pada 2020 lalu, produksi perikanan menjadi 20.439,32 ton. Naik dibandingkan 2019 yang hanya 19.412,60 ton

Sedangkan pada urusan pariwisata, adanya peningkatan kunjungan wisata pada 2019 sebanyak 240.392 orang atau sebesar 240,292 persen, jika dibandingkan 2018. Namun, sayangnya pada 2020 ini dikarenakan pandemi Covid-19, terjadi penurunan

angka kunjungan wisatawan ke Kotim.

Selanjutnya di sektor pertanian, yaitu di antaranya kontribusi pertanian terhadap PDRB sebesar 19,71 persen. Sedangkan perindustrian yaitu di antaranya presentase, jumlah hasil peman-tauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan sebesar 100 persen. Terakhir di sektor perdagangan, kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,19 persen.

"Jika diperhatikan data tersebut maka capaian kinerja Pemkab dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan saya harapkan kinerja pada Kotim ke depan harus lebih baik dan meningkat lagi," harap dia.

Bahkan baru-baru ini, dia bersama jajarannya telah meresmikan gedung baru RSUD dr Murjani Sampit, pada Kamis, 7 Januari 2021. Rumah sakit yang mewah dan memiliki fasilitas

• INFO KOTAWARINGIN

lengkap, itu bagaikan kado terakhir kepada masyarakat di Kotim.

Peresmian rumah sakit yang ditandai dengan prosesi gunting pita, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut, sekaligus memperingati hari jadi ke-68

ehatan yang sangat baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa terjamin pelayanan kesehatannya," jelas Supian.

Menurutnya, RSUD dr Murjani Sampit ini bisa dikatakan salah satu rumah sakit, termewah di Kalimantan Tengah.

tan yang maksimal dapat dilakukan di sini," ujar dia.

Ia mengakui bahwa selama ini, sektor kesehatan adalah salah satu hal yang sangat diprioritaskan. Sehingga dia sangat bersungguh-sungguh untuk mengubah wajah RSUD dr Murjani Sampit menjadi lebih baik.

"Saya harapkan ke depan tidak ada lagi keluhan bahwa rumah sakit banjir, pelayanannya tidak maksimal, tidak baik. Saya ingin mendengar komentar positif dari masyarakat tentang rumah sakit, dan mulai dari pembangunan wajah baru rumah sakit inilah perubahannya," ujarnya.

Supian ingin semua pihak yang terlibat di rumah sakit tersebut, berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan baik untuk masyarakat.

Semua itu dilakukan demi mewujudkan pelayanan rumah sakit yang baik, ramah, dan dicintai masyarakatnya. Tentu hal tersebut ujar dia, harus dilakukan dengan hati dan kesungguhan demi seluruh masyarakat Kotim.

Untuk itu tongkat estafet kepemimpinan yang kini berganti kepada Halikinnor dan Irawati sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, mampu menjawab tantangan tersebut.

Pencapaian yang diraih oleh Supian Hadi bersama M Taufiq Mukri tersebut, merupakan barometer pemimpin mengabdikan kepada masyarakatnya.

Supian Hadi pun berpesan agar Bumi Habaring Hurung-sebutan Kabupaten Kotim-harus lebih pesat lagi pembangunannya selama kepemimpinan Halikinnor dan juga Irawati.

"Seorang bupati dikatakan berhasil jika penggantinya nanti, adalah orang yang bisa membawa Kotim lebih maju, dibandingkan dengan masa kepemimpinan SAHATI (Supian Hadi-M Taufiq Mukri, Red)," ujarnya belum lama ini.

Untuk itu dirinya menaruh harapan besar, kepada kepala daerah terpilih. Agar komitmen terhadap visi, misi dan program prioritas yang diusung.

"Visi, misi serta program yang diusung harus benar-benar komitmen untuk dijalankan, apalagi mereka mendapat amanah untuk memimpin kabupaten ini nantinya," pesan pria 44



KEBERAGAMAN - Empat tempat ibadah yang dari empat agama berbeda berdiri di satu areal lokasi di Antang Kalang, Kabupaten Kotim, Kalteng. (tampak Masjid)



Wihara.

Kabupaten Kotawaringin Timur ke-68 yang dilaksanakan Stadion 29 November.

"Ini salah satu janji saya kepada masyarakat. Semoga rumah sakit ini akan memberikan pelayanan kes-

Di harapkan pemerintahan berikutnya dapat melengkapi seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanannya.

"Harapan saya seluruh dokter spesialis ada dan lengkap di RSUD dr Murjani, sehingga pelayanan keseha-

tahun tersebut.

Terlebih, di masa peralihan kepemimpinan ini Kotim dan khususnya Indonesia hingga masyarakat global diterpa pandemi Covid-19. Yang nyaris membuat sendi-sendi kehidupan lumpuh.

Untuk itu dibutuhkan komitmen, serta pemimpin yang mampu bekerja di bawah tekanan berat. Sebab, belum jelas pandemi ini usai.

"Anggaran banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga banyak program kerja yang tertunda, saya harap kepala daerah terpilih dapat melanjutkannya," tandasnya.

Supian Hadi pun berharap program maupun pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dapat dilanjutkan oleh penggantinya.

10 tahun tentu bukan waktu singkat. Namun, juga tak bisa dibilang lama. Terlebih untuk mengurus suatu daerah, dengan segala keterbatasan.

Tentu di era kepemimpinan Supian Hadi dan M Taufiq Mukri menjabat sebagai bupati, masih banyak kekuangan yang perlu diperbaiki. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson yang menyatakan sudah cukup baik, terutama sebelum pandemi Covid-19.

"Tidak hanya dari sisi pembangunan fisik tetapi juga pertumbuhan ekonomi terus membaik sebelum wabah Covid-19. Saya menilai pembangunan selama kepemimpinan SAHATI ini sudah cukup baik," ujarnya, Rabu 13 Januari 2021.

Bahkan pembangunan yang signifikan tersebut memberikan sumbangsih sangat besar untuk kemajuan daerah. Terutama kemajuan di bidang penataan kota sangat terlihat.

"Sektor wisata mulai bangkit dan mulai dilirik menjadi sebuah sektor jasa yang menghasilkan rupiah. Di sektor pelayanan kesehatan juga ada pembangunan RSUD Murjani, serta dibangunnya proyek jalan dalam kota yang mana membuka areal permukiman baru," ungapnya.

Tapi seiring jalannya kemajuan tersebut, ternyata Supian Hadi dan M Taufiq Mukri mampu menjaga keberagaman yang ada di Kotim. Hal itu ujar

dia sangat penting untuk dilakukan, mengingat kabupaten tersebut memiliki sejarah kelam, dari konflik horizontal di masyarakat.

"Keberagaman daerah juga terjaga, walaupun sempat terjadi gesekan. Namun karena kesigapan dari kepala

menjadi nilai tambah, dalam visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, selain itu juga di kawasan seberang sudah ada jalan yang menghubungkan Cempaga ke Pulau Hanaut. Sehingga dapat membuka keteringgalan daerah yang terisolasi.



Gereja Eka Sinta.



Gereja Keluarga Kudus.

daerah bersama dengan FKPD persoalan itu bisa diselesaikan," sebut Rinie.

Pembukaan wilayah terluar, tertinggal, dan terisolasi pun juga berhasil dilakukan pasangan bupati dan wakil bupati tersebut. Hal tersebut ucap Rinie

"Pasalnya selama puluhan tahun masyarakat seberang merindukan daerah mereka bisa diakses jalur darat dan kini sudah ada jalan meskipun masih belum sampai ke tahap pengaspalan," kata Rinie. •



RESHUFFLE KABINET MENYELAMATKAN EKONOMI & KESEHATAN

Setidaknya dua kali sudah isu pergantian personel alias reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju berembus: Juli dan Agustus 2020. Akhirnya terjadi juga pada akhir tahun.

Terpaksa atau tidak, terjadi kekosongan dua jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju akibat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu dinihari, 25 November 2020 dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dua pekan sesudahnya, Minggu dinihari, 6 Desember 2020. Menteri KKP menjadi tersangka gratifikasi terkait ekspor benih lobster, sedangkan Menteri Sosial menjadi tersangka korupsi bantuan sosial.

Tak sampai sebulan kemudian, Selasa petang, 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan

pengganti dua menteri yang menjadi tahanan KPK sekaligus perombakan kabinetnya. Bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kepala Negara memperkenalkan enam figur menteri di beranda Istana Merdeka, Jakarta.

"Pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju," ujarnya.

Keenam figur tersebut ialah Tri Rismaharini, Sandiaga Salahuddin Uno, Budi Gunadi Sadikin, Yaqut Cholil Qoumas, Sakti Wahyu Trenggono, dan Muhammad Lutfi. Keenamnya hadir



secara langsung saat Presiden memberikan keterangan.

Tri Rismaharini ialah Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo memberikan tanggung jawab kepada Risma untuk memimpin Kementerian Sosial.

"Beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial," ucapnya memperkenalkan figur yang akrab disapa Ibu Risma tersebut.

Figur lainnya, Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga diketahui juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2005-2008. Presiden memberikan amanah kepada Sandiaga untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Dulu beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Hipmi. Saat

ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Presiden.

Kemudian, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN. "Sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Sebelumnya Budi Gunadi Sadikin juga telah malang melintang dalam sejumlah posisi seperti Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium. Budi juga bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut memperkenalkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai calon anggota Kabinet Indonesia Maju. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

"Beliau adalah tokoh muslim Ketua PP GP Ansor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama," ucap Presiden.

Selanjutnya ialah Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Kepala Negara menugaskannya untuk mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. "Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

Terakhir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, turut diperkenalkan Presiden Joko Widodo. Kali ini, Kepala Negara akan memberikan tanggung jawab kepada Lutfi untuk memimpin Kementerian Perdagangan.

"Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Seka-

rang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan,” tandasnya.

Alhasil, pelantikan enam menteri itu berlangsung di Istana Negara Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada Rabu pagi, 23 Desember 2020. Keenam menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

bagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

Presiden Joko Widodo pun mengamobil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024: “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan

dirinci ke dalam banyak kegiatan seperti bagaimana cara berhubungan antarumat beragama, hubungan interumat beragama, bahkan juga soal pandemi Covid-19. “Kita lihat nanti pasti akan ada terobosan-terobosan Kementerian Agama,” ucapnya.

Kemudian, Budi Gunadi Sadikin, yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan memaparkan bahwa ia beserta jajaran di kementeriannya akan berupaya keras menangani masalah Covid-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Targetnya antara lain agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera, agar semua pengusaha UMKM bisa segera



Bersamaan dengan itu, Kepala Negara juga melantik lima wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Yang menjadi Wakil Menteri adalah Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan; Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan; Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian; dan Pahala Nugraha Mansury se-

akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan

Selepas pelantikan, keenam menteri memaparkan program kerja yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat kepada publik. Yaquut Cholil Qoumas, yang dilantik sebagai Menteri Agama, menjelaskan bahwa program kerja kementerian yang dipimpinnya akan berlandaskan pada semangat bahwa agama merupakan inspirasi, bukan aspirasi.

Semangat tersebut nantinya dapat

“
Presiden memberikan amanah kepada Sandiaga untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

kembali membuka tokonya, agar semua keluarga kita bisa segera kembali bersilaturahmi, dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa kembali hidup secara normal selayaknya sebelum pandemi.

“Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa baik itu asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota madya, serta seluruh teman-teman. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar yang tidak mungkin kami harus lakukan sendiri. Kami harus lakukan secara inklusif, bergotong royong, dan bersama-sama,” ungkapnya.

Sedangkan Tri Rismaharini, yang dalam kesempatan tersebut dilantik sebagai Menteri Sosial mengemukakan bahwa dalam waktu dekat ini kementeriannya akan segera merealisasikan bantuan sosial bagi masyarakat ter-

dampak pandemi pada triwulan keempat tahun ini dan awal tahun mendatang. Tak hanya itu, bantuan-bantuan tersebut kini juga diarahkan untuk dapat memberdayakan dan berimplikasi atau memiliki dampak langsung yang terukur bagi masyarakat. Sejumlah mekanisme tentu harus dikembangkan dan dihadirkan oleh kementeriannya.

"Kami tidak bisa sendiri tentunya. Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah, utamanya adalah perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-per-

baru untuk tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang sehat," ujarnya.

Di sektor kelautan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya laut yang begitu melimpah. Apabila dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Untuk itu, Sakti Wahyu Trenggono yang kali ini dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan ekosistem laut Indonesia agar dapat berjalan baik dan tidak rusak. Namun, di sisi lain, po-

rasi.

"Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Sandi.

Untuk diketahui, keenam anggota baru Kabinet Indonesia Maju tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan



masalah di daerahnya," kata Risma.

Muhammad Lutfi, yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan setelah sebelumnya dipercaya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat mengatakan bahwa saat ini perekonomian berada pada titik terlemah. Untuk itu, sesuai dengan tugas kementeriannya, ia hendak memastikan bahwa produk-produk Indonesia memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan dapat diekspor di pasar dunia.

"(Ekspor) ini adalah bagian dari perbaikan ekonomi nasional dan berharap bisa menjadi daya ungkit

tensi kelautan nasional juga harus dapat memberikan kesejahteraan yang besar bagi bangsa.

"Saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua. Mana yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita hentikan," ucapnya.

Terakhir, Sandiaga Salahuddin Uno, yang dilantik Presiden sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tiga gagasan utama untuk membangkitkan pariwisata nasional setelah sebelumnya terpuruk akibat pandemi. Ketiganya ialah inovasi, adaptasi, dan kolabo-

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Setelah pelantikan ini mereka akan bersegera untuk menjalankan amanah Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan membantu pemulihan negara dari dampak pandemi Covid-19.

Selamat bertugas untuk para Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang baru dan terima kasih untuk Menteri lama yang sudah mengakhiri tugasnya. Semoga sisa waktu antara 2021-2024 akan lebih baik untuk Indonesia. ●



NELAYAN TEMUKAN DRONE SELAM, PRABOWO TERKESAN DIAM

Temuan drone selam oleh nelayan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, adalah gambaran tentang kehidupan tradisional berdampingan dengan Revolusi Industri 4.0 yang sudah melangkah jauh lebih dari sekadar teknologi informasi dan komunikasi karena berimplikasi pertahanan dan keamanan nasional: ancaman sekaligus tantangan. Mengapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkesan diam?

Memang ironi. Saeruddin, 60, nelayan tradisional di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang menemukan drone selam itu. Salah satu bentuk fisik teknologi mutakhir hasil Revolusi Industri 4.0 berdampingan dengan kehidupan tradisional. Bahkan untuk menyebutnya sebagai drone selam saja begitu banyak yang belum paham.

Ada yang menyebutnya pesawat nirawak, kendaraan bawah laut tak bernama (UUV unnamed underwater vehicle). Namun, intinya adalah kendaraan otonom yang bergerak sesuai dengan program kendalinya: di darat, laut, maupun udara, mungkin juga dapat menembus perut bumi jika sudah tersedia programnya.

Saeruddin mengaku sejak awal tidak pernah tahu benda yang dia te-

mukan, terutama saat pertama kali melihatnya. Dia hanya mengandalkan firasat bila benda yang ia lihat di laut Selayar pada Sabtu, 26 Desember 2020 itu bukanlah benda biasa. Toh ternyata tak berbahaya pula untuk mengangkatnya dari lokasi temuan.

"Tapi tetap saya tidak tahu. Saya cuma tahu itu benda bukan benda biasa dan tidak meletus. Cuma itu saja toh," ucapnya dengan aksen khas warga lokal pada Senin, 4 Januari 2020.

Tidak meletus adalah gambaran bahaya bagi nelayan tradisional seperti Saeruddin. Namun, dengan memahami teknologi kendaraan bawah laut yang dapat bergerak sendiri itu, spektrum potensi bahaya dapat meluas mengikuti fungsi pengendaliannya.

Produk Revolusi Industri 4.0 berbentuk media sosial pula yang mem-



Benda yang diyakini sebagai drone kapal selam China tersebut ditemukan oleh nelayan Indonesia, di dekat Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan.

bantu banyak dalam menyebarkan informasi tentang temuan drone selam di perairan Selayar ini. Karena berada di lingkup kekinian dan sama-sama produk Revolusi Industri 4.0, media sosial akan lebih melibatkan mereka yang lebih paham mengenai drone selam temuan di perairan Selayar itu.

Akun twitter @Jatosin yang kerap mengulas soal intelijen pertahanan nasional Indonesia, misalnya, berkicau pada 29 Desember 2020 lalu. "A fisherman in Selayar Island, South Sulawesi, has found a UUV: Length: 225 cm, Tail: 18 cm, Wingspan: 50 cm, Trailing antenna: 93 cm. Very similar to China's 'Sea Wing' UUV, which, if it's true, raised many questions especially how it managed to be found deep inside our territory."

Tampak spektrum bahaya sudah melebar dari sekadar tak meletus seperti gambaran nelayan Saerudin dengan pandangan Jatosin yang melihatnya dari perspektif pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya kicauan Jatosin mengungkapkan pula contoh drone semacam itu yang ditemukan beberapa lokasi perairan Indonesia. Antara lain di dekat Kepulauan

Masalembu dan Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau-pulau ini, bersama dengan Kepulauan Selayar, terletak di dekat jalur laut yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia.

“
Ada yang menyebutnya pesawat nirawak, kendaraan bawah laut tak bernama (UUV unnamed underwater vehicle).

Dengan doktrin strategis 'Untaian Mutiara' dan penyebaran UUV pengintaian, Tiongkok telah lama meningkatkan kehadirannya di Samudra Hindia tempat Angkatan Laut India dominan, sementara kedua negara memang se-

dang terlibat ketegangan militer. Juga muncul pertanyaan apakah drone ini berfungsi memetakan rute bawah laut untuk kapal selam China? Masih belum jelas.

Namun, penggunaan teknologi drone selam setidaknya sudah ada sejak awal masa perang dingin antara Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dengan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya) pasca Perang Dunia II pada 1945 hingga 1991 saat Uni Soviet bubar menjadi beberapa negara. Dari catatan DSPComm, Amerika Serikat telah membuat kendaraan bawah laut tanpa awak pada 1957.

Saat itu teknologi drone bawah laut UUV dikembangkan oleh para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dari MIT pula, AS kemudian mampu mengembangkan UUV menjadi AUV (Autonomous Underwater Vehicle) yang bergerak dengan kendali jarak jauh pada 1970.

UUV merupakan kendaraan bawah laut yang masih perlu kendali dari jarak tertentu. Sedangkan AUV dapat dikontrol dari tempat peluncuran pertamanya, termasuk pangkalan militer.

Sedangkan menurut laman Naval news, UUV Sea Wing yang memiliki sayap dikenal sebagai drone dengan tipe glider (penjelajah). Tipe ini bergerak dengan mekanisme yang disebut variable-buoyancy propulsion. Semacam mekanisme balon menggelembung dan mengempis dengan medium minyak bertekanan. Karena mekanisme itu, drone akan menyelama sebelum naik ke permukaan lagi. Proses itu menyebabkan drone bergerak

bersejarah dan berharga di dalam laut.

Melalui akun FB-nya, alumni Institut Teknologi Sepuluh November ini menyarankan beberapa langkah antisipasi agar benda itu bisa diteliti dengan metode digital forensik. Mulai dari memindahkan, men-jammer frekuensi agar tidak dikontrol dari jauh oleh pemiliknya hingga membongkar jeroannya untuk mengesktraksi data yang tersimpan.

Dia mengingatkan beberapa teknologi canggih dari Israel, US dan

onomous underwater vehicle atau AUV) yang dibuat untuk penelitian parameter oseanografi jangka panjang. Bentuk seaglider biasanya mirip rudal, dengan dua sayap di bagian belakang atau tengah.

Dengan perubahan pada sayap dan daya apung yang ditenagai baterai, pergerakan seaglider dapat dikontrol dari jauh. Seaglider bisa bergerak di air dengan pola seperti gigi gergaji. Alat ini sekaligus dapat menerima perintah dan mengirim data via telem-



Saeruddin nelayan menemukan drone di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

menjelajah. Kendalinya dibantu sayap. Dalam perjalanan itu drone mengumpulkan data.

Pakar TIK Gunaris Shidiq menduga bisa jadi wahana itu adalah Littoral Battle Space Sensing-Glider yang fungsinya mengumpulkan data oseanografi dan kapasitas baterai Lithiumnya bisa beroperasi selama 30 hari nonstop. Penggunaanya dapat mengumpulkan informasi tentang jumlah ikan, bentuk-bentuk relung, peta relief laut, lekukan garis pantai, arus laut, terumbu karang, obstacle (hambatan), benda-benda

Swedia, memiliki kemampuan self destruction jika RTH (Return To Home/ke-mampuan drone untuk secara otomatis bergerak kembali ke titik berangkat) tidak berfungsi. "Perusakan ini pada seluruh sistem menggunakan peledak dan ada yang sebagian saja terutama pada media rekam (erase, formatting, dll)," tulisnya di laman Facebook-nya.

Sedangkan publikasi resmi Konsberg, perusahaan global produsen teknologi kelautan, pertahanan dan dirgantara, seaglider adalah kendaraan bawah air nirawak otomatis (au-

etri satelit. Pengendalian alat ini bisa dilakukan berdasarkan kombinasi data GPS, global positioning system.

Konsberg juga menjelaskan, seaglider bisa beroperasi hingga 10 bulan sehingga ia merupakan alat yang layak untuk kegiatan pemantauan kondisi laut. Seaglider bisa mengumpulkan data dengan sensor eksternal yang mampu memindai kondisi laut, sifat air hingga lingkungannya.

Selain berguna untuk kegiatan riset oseanografi biologis maupun fisika dan kimiawi, seaglider pun layak dipa-

kai untuk aktivitas intelijen, pengintaian, hingga penelitian lingkungan dan perikanan.

Nah, untuk temuan drone selam di Selayar itu, penjelasan resmi Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan, benda tersebut bernama seaglider yang memiliki kecanggihan dalam operasinya. Biasanya alat tersebut digunakan untuk keperluan survei dan data oseanograf atau bawah laut, karena seaglider merupakan alat perekam data bawah laut dan dapat diakses dari manapun.

"Alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data oseanografi di laut, di bawah lautan. Ini bisa diakses melalui website oleh semua yang bisa mengakses data," kata Yudo Margono, saat konferensi pers di Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidrosal) TNI AL, Ancol,

“
UUV merupakan kendaraan bawah laut yang masih perlu kendali dari jarak tertentu.

Jakarta Utara, Senin, 4 Januari 2020.

Yudo mengatakan, industri manapun bisa menggunakan alat ini. Industri perikanan misalnya, alat ini digunakan untuk mencari ikan. Kemudian pada industri pertambangan biasa menggunakan alat ini untuk keperluan pengeboran. "Tergantung siapa yang memakai," kata dia.

Sesuai namanya, underwater seaglider hanya bisa mendeteksi data-data benda di bawah laut saja. Termasuk kedalaman air laut, salinitas, arus, dan data-data lain yang berkaitan dengan laut. Seaglider ini lebih familiar digunakan untuk bisa mengarahkan kapal penangkap ikan. Sebab, kata Yudo, seaglider bisa dengan cepat mendeteksi organisme bawah laut seperti ikan-ikan.

"Data yang dikumpulkan dari underwater seaglider yaitu, oksigen untuk

mengetahui kadar oksigen di bawah laut, kemudian batimetri ini untuk keperluan industri," kata KSAL Yudo. Lalu, sambungnya, kemampuan acoustic recording ini untuk merekam keberadaan ikan dan hewan laut seperti lumba-lumba.

"Seaglider juga bisa untuk kegiatan industri perikanan, di mana kalau banyak plankton, maka tandanya banyak ikan, sehingga bisa mengarahkan kapal-kapalnya," sambung KSAL. Ia pun menegaskan, seaglider tidak bisa

milik atau negara pembuat drone, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih diam. Namun, melalui Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo menegaskan sejak awal dirinya telah berkomitmen untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi temuan seperti drone yang ditengarai milik Tiongkok ini.

"Mengenai penemuan drone laut di perairan Selayar- Sulawesi Selatan,



Drone di Selat Madura.

mendeteksi kapal selam ataupun kapal yang berada di atas permukaan air. "Hanya (mengambil) data-data bawah air," tegas Yudo.

Tambahan pula, berdasarkan hasil pendalaman TNI AL, drone selam temuan di Selayar ini tanpa tulisan negara pembuat. "Saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya. karena data-tanya maupun tulisan (nama perusahaan atau negara pembuat) di luarnya ini tidak ada," kata Yudo.

Boleh jadi karena hasil identifikasi TNI AL itu belum menyimpulkan pe-

Kementerian Pertahanan mengajak publik tidak berpolemik yang kontraproduktif," ungkap Dahnil. Menurut dia, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI khususnya Angkatan Laut toh telah menangani permasalahan ini.

Apapun, drone selam adalah salah satu wujud fisik Revolusi Industri 4.0 berbasis TIK. Meski Saeruddin penemunya tetap nelayan tradisional, sudah saatnya Indonesia juga mengejar ketinggalan teknologi yang berimplikasi pada pertahanan dan keamanan nasional. •



Agripinna Prima Rahmanto Putra.

8 PEBULU TANGKIS NASIONAL JADI KORBAN MAFIA JUDI

Ini persoalan sangat serius. Pengaturan hasil pertandingan terkait perjudian terorganisasi telah merambah atlet bulu tangkis nasional di sejumlah turnamen internasional. Alhasil, Badminton World Federation (BWF), organisasi pengelola olah raga bulu tangkis dunia, menjatuhkan sanksi kepada delapan pemain nasional. Induk olah raga bulu tangkis PBSI menegaskan, mereka bukan pemain Pelatnas.

Apa hendak dikata. Bukti-bukti telah tersedia. Delapan pebulu tangkis nasional Indonesia mendapat sanksi mulai dari larangan terlibat di dunia bulu tangkis seumur hidup hingga larangan bermain selama periode tertentu plus denda uang atas kesalahan yang

mereka perbuat.

Karena menyangkut perjudian terorganisasi, boleh jadi ada yang akan menyebutnya sebagai bandar atau mafia judi. Terlebih, BWF menyebut ada seorang warga Malaysia, yang mewakili merek peralatan bulu tangkis sponsor pemain internasional, juga terkena

larangan seumur hidup setelah dinyatakan bersalah menawarkan uang kepada pemain internasional untuk memanipulasi pertandingan.

"Unit Integritas BWF telah menyelidiki individu tersebut selama beberapa tahun," kata BWF dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 8 Januari 2020..



Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna.

Karena sifat pelanggaran dan akses dan pengaruh orang ini terhadap pemain yang disponsori perusahaannya, lanjut pernyataan BWF, "Panel Dengar Pendapat Independen menengguhkan individu tersebut dari aktivitas terkait bulu tangkis selama seumur hidup."

Mengenai para pemain Indonesia, BWF menyebutkan Panel Dengar Pendapat Independent menjatuhkan putusan pada 20 Desember lalu. Para pemain itu masih berkesempatan mengajukan banding atas keputusan tersebut di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam waktu 21 hari.

"Tiga dari mereka ditemukan telah berkoordinasi dan mengatur orang lain agar terlibat dalam perilaku tersebut dan telah diskors dari semua kegiatan terkait bulu tangkis seumur hidup," kata BWF.

Ketiga pebulu tangkis Indonesia ini

adalah Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, dan Androw Yunanto. Merekalah yang mendapat sanksi penangguhan keterlibatan dalam kegiatan terkait bulu tangkis seumur hidup mereka.

Sedangkan lima pemain lain mendapat hukuman bervariasi. Sekartaji Putri, misalnya, mendapat sanksi penangguhan keterlibatan dalam kegiatan terkait bulu tangkis selama 12 tahun. Tambahannya, Sekartaji harus membayar denda senilai 12 ribu dolar AS.

Sedangkan Mia Mawardi mendapat sanksi penangguhan keterlibatan dalam kegiatan terkait bulu tangkis selama 10 tahun dengan denda senilai 10 ribu dolar AS. Sanksi yang sama berlaku untuk Fadilla Afni.

Sedangkan Aditiya Dwiantoro, mendapat sanksi penangguhan keterlibatan dalam kegiatan terkait bulu tangkis selama tujuh tahun. Tamba-

hannya, denda senilai tujuh ribu dolar AS.

Pemain yang paling ringan sanksinya adalah Agripinna Prima Rahmanto Putra. Ia mendapat sanksi penangguhan keterlibatan dalam kegiatan terkait bulu tangkis selama enam tahun. Tambahan hukumannya adalah denda tiga ribu dolar AS.

Sanksi untuk delapan pemain ini mulai berlaku sejak 18 Januari 2020 saat BWF memberlakukan penangguhan sementara untuk menyelidiki kasus delapan pemain itu. Kasus apa sebenarnya? Ya itu tadi, pengaturan hasil pertandingan yang terkait perjudian terorganisasi.

BWF mulai menyelidiki kasus ini pada September 2017. Awalnya adalah salah seorang pemain yang berperan sebagai whistleblower (WB, pelapor pelanggaran). Pemain WB ini

menceritakan pendekatan dari Hendra untuk memanipulasi pertandingan di New Zealand Open pada Agustus 2017.

WB akhirnya menginformasikan bahwa Hendra telah melakukan pendekatan serupa dalam kaitannya dengan Scottish Open pada November 2015, dan AS Terbuka pada Juli 2017. Alhasil, penyelidikan mengungkapkan sejumlah kasus pengaturan pertandingan antara 2014 hingga 2019.

Putri.

Dari 8 pemain yang terlibat, nama Agrippina Prima Rahmanto Putra menjadi yang paling disorot. Dia pernah menjadi tandem Marcus Fernaldi Gideon (yang sekarang berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo) dan meraih prestasi pada era 2011-2012. Duet keduanya berhasil menjuarai ajang Singapura Internasional 2011 dan Iran Fajr Internasional 2012.

Nah, Agrippina pun langsung mem-

dian dia basa-basi lalu meminta nomor saya. Langsung saya kasih karena sepertinya dia kenal sama saya," ucap Agrippina yang mengaku berpikiran positif terhadap orang yang baru dikenalnya.

Agrippina kemudian menyebut di malam hari, Hendra menghubungi dirinya. "Malamnya dia chat saya. Dia menawarkan, 'Besok lu ketemu ini, mau tidak mengalah?' Alhamdulillahnya masih bisa saya tolak."



Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI, Broto Happy Wondomisnowo.

Panel Independen beberapa kali mewawancarai HT antara lain di Australia pada 7 Desember 2018. Selain wawancara dengan HT, panel menginterogasi Androw Yunanto dan Agrippina Prima Rahmanto Putra mulai 10 hingga 12 Oktober 2018.

Namun, untuk lima bulu tangkis lainnya, Panel Independen gagal melakukan wawancara. Mereka adalah Ivandi Danang, Mia Mawarti, Fadila Afni, Aditya Dwiartoro, dan Sekartaji

buat klarifikasi. Melalui akun Youtube-nya, eks partner Marcus Fernaldi Gideon itu menerangkan bahwa ia bukan terlibat dalam pengaturan skor.

Agrippina mengakui mengenal Hendra Tandjaya (HT) yang juga merupakan salah satu terdakwa kasus ini. Ia mengenal HT di Vietnam Open 2017.

"Saya pertama bertemu HT di Vietnam Open 2017, bertemu di GOR pertandingan. Saya tidak kenal dia. Setelah main di babak pertama, kemu-

"Ya iyalah kan saya kerja di bulu tangkis, masa saya langgar aturan bulu tangkis. Saya mau cari duit dimana?" tutur Agrippina.

Setelah momen itu, menurut Agrippina, Hendra tertangkap oleh BWF. Barang-barang milik Hendra digeledah, termasuk handphone dan dari situ terdapat chat Hendra dengan Agrippina, sehingga Agrippina terlibat dalam kasus ini.

"Jadi pas digeledah BWF, ternyata

di HPnya ada chat HT soal ajakan match fixing. Tetapi saya sudah konfirmasi ke BWF bahwa saya menolak match fixing, BWF juga sudah jelas bahwa saya menolak. Saya menolak match fixing,” ujar Agrippina.

Lama setelah momen tersebut, Agrippina kemudian dihubungi oleh pihak PBSI dan menyatakan bahwa ada perwakilan BWF yang ingin bertemu di Jakarta.

“Saya langsung datang karena merasa tidak ada apa-apa. Saya langsung diinterogasi BWF, ditanya soal hubungan dengan HT. Lalu saya jelaskan bahwa saya baru kenal, saya diajak match fixing tetapi saya tolak.”

“Pokoknya saya diinterogasi banyak, sekitar dua jam. Saya berpikir saya sudah kooperatif dengan BWF dan semua aman,” tutur Agrippina.

Atas dasar hal itu, Agrippina mengaku terkejut ketika berita beredar dan namanya terkait di dalamnya.

“Kenapa terlibat di berita tersebut? Menurut BWF, bukan bagian dari match fixingnya, tetapi kesalahan saya adalah tidak melaporkan orang itu [HT] mengajak match fixing.”

“Kesalahan saya, tidak melaporkan. Bagaimana melaporkan ya? Dia mengajak match fixing, saya tidak mau. Saya pikir hanya cukup sampai di situ saja, tak bakal sebesar ini,” ujar Agrippina.

Menyikapi berita dari BWF tersebut, PBSI melalui Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI, Broto Happy Wondomisnowo menegaskan bahwa delapan pemain yang dihukum BWF tersebut bukanlah pemain Pelatnas. “Bisa dipastikan, delapan pemain yang dihukum BWF tersebut adalah bukan pemain penghuni Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur,” tegas Broto Happy.

Ketika mereka melakukan tindakan yang mencederai sportivitas pada 2015 hingga 2017, kedelapan pemain tersebut juga tidak berstatus sebagai pemain tim nasional penghuni Pelatnas Cipayung. Selanjutnya, PBSI juga mengutuk perbuatan tercela tersebut yang telah mencederai nilai-nilai luhur olahraga yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap atlet, seperti sportivitas, fair play, respek, jujur dan adil. ●



SIAPA HENDRA TANDJAYA?

Dari penyelidikan Badminton World Federation, Hendra Tandjaya adalah pemain bulu tangkis yang menjadi aktor utama pengaturan hasil pertandingan dan terkait perjudian terorganisasi. Atlet putra kelahiran 20 Juli 1998 ini adalah spesialis ganda; putra dan campuran.

Menurut situs web resmi BWF, Hendra menjalani kariernya sepanjang 2014-2017. Turnamen mancanegara pertamanya adalah Jaya Raya Indonesia Junior International Challenge 2014.

Kala itu, Hendra bermain ganda putra dengan Rizal Ramdani. Pasangan itu tercatat hanya bermain sekali karena dikalahkan pasangan Giovani Dicky Oktavan/Gea Kamahamas 11-21, 10-21.

Sepanjang kariernya di ganda putra dan campuran, tak kurang Hendra berpasangan dengan 17 pemain berbeda. Tiga di antaranya adalah pebulu tangkis yang tersangkut match fixing: Androw Yunanto, Fadila Afni, Sekartaji Putri.

Rupanya Hendra memang bukan atlet berprestasi. Ia tercatat cuma pernah menang empat kali dari 21 laga ganda putra dan hanya menang tiga kali dari 19 laga ganda campuran.

Rankingnya pun boleh dinilang medioker. Paling bagus, ia merengkuh ranking 219 di ganda putra bersama Androw per 2 November 2017. Untuk di ganda campuran, ia paling tinggi mencapai urutan 128 dunia bersama Sekartaji (per 10 Agustus dan 7 September 2017).

Hendra tercatat pernah menghadapi dua pebulu tangkis Malaysia yang kini dikenal sebagai atlet top. Pertama adalah Ong Yew Sin yang sekarang menempati urutan 15 dunia nomor ganda putra. Pada kualifikasi Malaysia Open 2016, Hendra menghadapinya di nomor ganda campuran. Berpasangan dengan Rofahadah Supriadi Putri, ia dikalahkan Ong dan Peck Yen Wei 3-21, 7-21.

Lantas, ia tercatat pernah bertanding dengan Chan Peng Soon yang kini menempati urutan tujuh dunia di ganda campuran. Ia dan Sekartaji ditekuk Chan dan Cheah Yee See di 16 besar Australian Open 10-21, 5-21. Turnamen internasional terakhir seorang Hendra Tandjaya adalah New Zealand Open 2017. Ia dan Sekartaji disingkirkan pasangan Taiwan, Lu Chia Hung/Cheng Yu Chieh (8-21 dan 12-21), di babak 32 besar. ●



POLITIK TOILET DI TEMPAT PIKNIK

Apa yang salah dengan menyoal kualitas toilet dalam konteks pariwisata? Malah jika merasa tersinggung, boleh jadi ia kurang piknik. Toilet adalah tempat yang paling menjadi idaman ketika desakan buang air seni, apalagi buang air besar datang. Bukankah demikian bahkan ketika bersenang-senang di tempat wisata?

Tiba-tiba saja ranah pariwisata nasional tampak sibuk dengan urusan politik toilet. Politik toilet karena isunya terkait kebijakan (policy) pemerintah dalam memajukan sektor piknik ini.

Juga politik toilet karena isu ini muncul seiring pengangkatan mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masih politik toilet lantaran yang menyebut soal

toilet itu adalah Menteri Luhut Pandjaitan yang dalam Pemilihan Presiden 2019 berseberangan kubu dengan Menteri Sandi.

Jika melihat konteksnya, politik toilet ini viral dari video rekaman rapat

virtual yang tampil di situs Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memang menyebut toilet. Bahkan sebutannya adalah WC (water closet) dalam kaitannya untuk menunjang peningkatan kualitas lima destinasi wisata prioritas.

"Saya minta peningkatan kualitas destinasi pariwisata di lima destinasi super prioritas, yaitu Menparekraf (Sandiaga) agar meningkatkan alokasi anggaran ke 5 destinasi tersebut," ujar Luhut dalam rekaman video rapat virtual yang berlangsung Jumat, 8 Januari 2021 itu. Yang dimaksud lima destinasi wisata super prioritas itu adalah Danau Toba, Sumatera Utara; Likupang, Sulawesi Utara; Borobudur, Jawa Tengah; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Soal-soal kecil, seperti WC itu juga perlu diperbaiki. Jadi orang datang ke spot itu nggak kapok," sambung Luhut.

Jadi, sudah jelas bukan? Memang politik toilet: terkait kebijakan pemerintah yang mencakup kualitas sanitasi di destinasi wisata andalan Indonesia.

Selain soal sanitasi, Luhut juga meminta Sandiaga mendorong pelaku ekonomi di tiap destinasi wisata melakukan transaksi pembayaran digital dengan penerapan QR Code QRIS (Quick Response Indonesia Standard) Bank Indonesia. "Lalu untuk terus meningkatkan penerapan QRIS di lima destinasi," kata Luhut, "Pak Menparekraf saya dengar katanya sudah ketemu dan akan mendesain platform supaya sebanyak mungkin menggunakan digital payment jadi tanpa cash lagi?"

Soal lain Luhut juga meminta Sandi menekan pembangunan hotel selama masa pemulihan kedatangan wisatawan asing ke Indonesia. Luhut juga menginstruksikan fokus mengelola dan memperbaiki kualitas tempat-tempat wisata di Indonesia.

"Maka pembangunan hotel mungkin ini diminimumkan saja Pak Sandiaga Uno, tapi spot tourism-nya diperbaiki dengan kualitas di tempat itu," ujar Luhut.

Dia mencontohkan perbaikan kualitas yang bisa dilakukan misalnya adalah meningkatkan kualitas souvenir-souvenir di tempat wisata yang merupakan buatan dalam negeri. "Seperti souvenir, buatan-buatan dalam negeri, yang UMKM tapi kualitas bagus. Itu harus jadi perhatian kita," ujar Luhut.



Luhut menambahkan kemungkinan wisatawan asing belum banyak berminat mengunjungi Indonesia hingga dua tahun ke depan. Di samping itu, selama dua tahun ke depan dia mengatakan pemerintah akan fokus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik.

"Pemulihan wisatawan domestik

lebih cepat dari pada yang dari luar, karena kan di sana ada travelling distance yang jadi isu. Saya pikir ini masih butuh satu dua tahun," ungkap Luhut.

Sebagai salah satu tanggapannya, Menteri Sandi mengatakan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Toilet Nasional. Hal ini merupakan jawabannya atas permintaan Menko

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin WC di tempat wisata dibenahi kualitasnya.

Sandiaga mengatakan, program Satgas Toilet Nasional ini akan dia kerjakan dalam setahun ke depan. Dalam pelaksanaannya ia akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pentahelix pariwisata yaitu akademisi, bisnis,

• INFO WISATA

komunitas, pemerintah, dan media.

Apapun, isu politik toilet itu langsung menyebar. Sampai-sampai terbawa juga ke ranah legislatif dalam Rapat Kerja Menparekraf dengan Komisi X DPR pada Kamis, 14 Januari 2021. Di depan para wakil rakyat yang membidangi sektor pendidikan, olah raga, serta pariwisata dan ekonomi kreatif itu, Sandi mengungkapkan

Menurut dia, setiap meninjau tempat wisata, toilet merupakan tempat yang tidak bisa diwakili kunjungannya. Maka Sandiaga pasti akan melakukan pengecekan ke toilet.

"Masalah toilet, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi revolusi kita, revolusi mental dan revolusi pariwisata kita, saya beranggapan bermulanya itu dari toilet," ujar Sandiaga

bergabung. Bahkan istri dan ibunya pun ingin ikut serta juga.

Lebih dari sekadar soal sanitasi, Menteri Sandi juga menyinggung soal ekonomi toilet. Antara lain praktik toilet berbayar di beberapa tempat wisata.

Dia mengatakan ingin toilet di tempat wisata merupakan layanan gratis alias tanpa bayar. Dia sempat bergurau Indonesia sudah 75 tahun merdeka, namun ironi bahwa untuk menggunakan toilet saja harus membayar.

"Saya ada pemikiran begini, selama ini kan toilet harus bayar di tempat pariwisata. Masa kita sudah 75 tahun merdeka, pakai toilet harus bayar gitu?" kata Sandiaga.

Dia mengaku saat ini sedang menangani masalah itu dengan jajaran Kemenparekraf. Sandiaga mengatakan dia sedang menyusun rencana untuk membuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar toilet tidak berbayar di tempat wisata.

"Ini saya lagi ngomong sama Mba Wamen dan Bu Sesmen, apakah kita bisa punya program gitu di tempat wisata gitu kita kolaborasikan," ungkap Sandiaga.

Masih terkait sanitasi, Menparekraf Sandi juga mengaku kerap menden-
gar keluhan soal kebersihan di beberapa daerah wisata yang ada di Indonesia. Antara lain soal destinasi wisata yang pengelolaan sampahnya kurang baik. "Ini banyak juga keluhan daerah wisata itu banyak sampah, ada juga keluhan toilet kotor, dan lain sebagainya," ujar Sandiaga.

Mengatasi hal itu, dia mengatakan kini pihaknya punya program unggulan dengan nama BISA. "Kita punya program unggulan untuk pemulihan destinasi dengan gerakan BISA, yaitu bersih, indah, sehat, dan aman," kata Sandiaga.

Kualitas toilet di destinasi wisata utama, malah kalau bisa di semua destinasi adalah soal politik pariwisata kita. Kalau toilet gratis? Ekonomi politik pariwisata mungkin.

Nah, sambil menunggu wabah Covid-19 mereda, silakan menyusun itinerary dulu. Apaan tuh? Rincian perjalanan piknik, termasuk mempertimbangkan toilet di destinasi wisata kita. Yuk... ●



jargon-jargon politik pula.

Dia bilang, revolusi mental dan pariwisata akan dimulai dari kebersihan toilet. Saat membahas soal toilet di depan Komisi X DPR RI, Sandiaga juga menyebut kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini pun harus diterapkan pada toilet di seluruh tempat wisata di Indonesia.

dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR. "Toilet itu, adalah dua tiga tempat yang harus kita kunjungi dan tidak bisa diwakili," tandasnya.

Menurut dia, masyarakat pun cukup antusias dalam memperbaiki kualitas toilet. Dia bercerita saat dirinya mengatakan mau membuat Satgas Toilet Nasional banyak pihak yang ingin



TOILET: FAKTOR PENTING DESTINASI WISATA

Toilet yang menjadi pembahasan Menko Marinvest Luhut Pandjaitan dalam rapat virtual soal pariwisata pada Jumat, 8 Januari 2021 itu sebenarnya memiliki dasar kajian yang kuat terkait daya saing destinasi wisata. Kenyamanan toilet merupakan salah satu faktor pendukung yang ikut menentukan apakah suatu destinasi wisata akan menarik lebih banyak wisatawan atau sepi-sepi saja.

Analisis paling awal dan paling komprehensif tentang daya saing destinasi dari Crouch dan Ritchie pada akhir Abad XX dan awal Abad XXI yang menerapkan teori inti berlian (core diamond) Michael E Porter tentang keunggulan kompetitif dan komparatif sebuah negara. Dalam konteks pariwisata Crouch dan Ritchie menyebutkan bahwa daya saing ditentukan oleh empat jenis komponen:

- (1) sumber daya inti dan penarik termasuk iklim, situs budaya, acara khusus, dan superstruktur pariwisata, yang merupakan elemen utama daya tarik destinasi;
- (2) faktor pendukung dan sumber daya seperti infrastruktur dan aksesibilitas yang memungkinkan destinasi membangun industri pariwisata yang sukses;
- (3) manajemen destinasi, yang mencakup kegiatan organisasi manajemen destinasi untuk meningkatkan daya tarik sumber daya inti dan pendukung; dan (4) faktor penentu kualifikasi dan penguatan, yang didefinisikan sebagai kondisi situasional seperti kejahatan, kebijakan fiskal pemerintah, nilai tukar, yang berpotensi mempengaruhi daya saing secara negatif.

Selanjutnya, kompoen-komponen itu diperinci lagi antara lain dalam studi oleh Guy Assaker, Rob Hallak, Vincenzo

Esposito Vinzi and Peter O'Connor. Pada 2013, mereka menulis bersama sebuah artikel di jurnal ilmiah wisata mengemukakan model yang lebih empirik dan terukur mengenai keunggulan kompetitif destinasi wisata. Untuk infrastruktur pendukung destinasi, mereka menyebutkan alat ukur keunggulannya adalah fasilitas-fasilitas antara lain: (1) Ketersediaan televisi; (2) Ketersediaan komputer; (3) Ketersediaan jaringan internet; (4) Ketersediaan akses transportasi menuju destinasi; (5) Ketersediaan kendaraan menuju destinasi; (6) Ketersediaan berita dan informasi di wilayah destinasi; (7) Ketersediaan fasilitas sanitasi. Mudah memahami bahwa toilet berada di poin tujuh sebagai pendukung penting daya saing destinasi wisata.

Studi lebih baru, Lalita A. Manrai, Ajay K. Manrai, dan Stefanie Friedeborn mengurai model Tourism Attractions-Basics-Context (T-ABC) yang juga menekankan pentingnya soal toilet ini. Mereka mencontohkan, Bali yang sudah memiliki TA (Tourism Attraction) masih memerlukan TB dan TC. Faktor TB, dalam hal ini Bali telah membangun jalan tol Benoa (pelabuhan kapal pesiar) - Ngurah Rai (bandara) - Nusa Dua (destinasi wisata). "TA menjadi daya tarik untuk berkunjung, TB mendukung daya tarik itu," demikian antara lain kajiannya.

Namun kajian itu juga menyebut, sementara para wisatawan menginginkan pengalaman dalam budaya baru, mereka tak ingin kehilangan kenyamanan dan keamanan seperti berada di daerah asalnya. Pada titik inilah kualitas toilet menjadi vital sebagai faktor keunggulan di destinasi wisata.

Bali okelah. Bagaimana lima destinasi super prioritas yang disebut Luhut? Itu dia masalahnya. ●



PARIWISATA GLOBAL MUNDUR KE 30 TAHUN SILAM

Pariwisata adalah sektor yang paling parah terdampak Covid-19. Seperti apa gambarannya? UNWTO buka-bukaan data.

Data organisasi pariwisata dunia UNWTO mengungkapkan, antara lain, kedatangan internasional turun 72 persen selama sepuluh bulan pertama 2020. Penyebabnya tentu saja wabah yang memicu pembatasan perjalanan, kepercayaan konsumen yang rendah, dan perjuangan global untuk menahan virus COVID-19.

"Semuanya berkontribusi pada tahun terburuk dalam sejarah pariwisata," ungkap Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili dalam pernyataan akhir tahunnya.

Statistiknya antara lain, destinasi wisata hanya kedatangan 900 juta

lebih sedikit turis internasional antara Januari dan Oktober 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Ini berarti hilangnya pendapatan ekspor senilai 935 miliar dolar AS dari pariwisata internasional. Angka itu lebih dari 10 kali lipat kerugian akibat dampak krisis ekonomi global pada 2009.

Sejak awal krisis ini, kata Pololikashvili, UNWTO telah memberikan data tepercaya kepada pemerintah dan komunitas bisnis, menunjukkan dampak pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pariwisata global. "Sejak awal krisis ini, UNWTO telah memberikan data te-

percaya kepada kalangan pemerintah dan komunitas bisnis untuk menunjukkan dampak pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pariwisata global," ungkapnya.

Meskipun berita tentang vaksin meningkatkan kepercayaan para wisatawan, sambungnya jalan pemulihan masih panjang. "Oleh sebab itu, kami perlu meningkatkan upaya untuk membuka perbatasan dengan aman sambil mendukung pekerjaan dan bisnis pariwisata. Semakin jelas bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Sekjen UNWTO yang



berasal dari Georgia, negara pecahan Uni Soviet.

Berdasarkan bukti saat ini, UNWTO memperkirakan kedatangan internasional turun 70 persen menjadi 75 persen sepanjang 2020. Dalam kasus ini, pariwisata global akan kembali ke level 30 tahun yang lalu, dengan satu juta lebih sedikit kedatangan dan hilangnya sekitar 1,1 miliar dolar AS penerimaan pariwisata internasional. Penurunan besar-besaran pariwisata akibat pandemi ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 2 miliar dolar AS dalam Produk Domestik Bruto dunia.

Pembatasan perjalanan memang terus menjadi kendala utama pemulihan. UNWTO menyebut kawasan Asia dan Pasifik, yang pertama terkena dampak pandemi sekaligus dengan tingkat pembatasan perjalanan tertinggi hingga saat ini, mengalami penurunan kedatangan 82 persen dalam sepuluh bulan pertama 2020. Timur Tengah mencatat 73 persen penurunan, sementara Afrika mengalami penurunan 69 persen. Kedatangan internasional di Eropa dan Amerika

menurun 68 persen.

Eropa mencatat penurunan yang lebih kecil sebesar 72 persen dan 76 persen pada bulan September dan Oktober dibandingkan dengan

wilayah dunia lainnya, setelah pemulihan sejenak yang berlangsung singkat pada bulan-bulan puncak musim panas, Juli dan Agustus 2020. Ledakan ulang penularan virus di seluruh

Travel restrictions continue to weigh on the recovery

Monthly change (%), by region



Source: World Tourism Organization (UNWTO)
Data as collected by UNWTO, November 2020. Published: 17/12/2020

wilayah dunia kemudian menyebabkan pemberlakuan kembali beberapa bentuk pembatasan perjalanan. Namun, Eropa adalah wilayah di mana lebih banyak tujuan (91 persen per 1 November 2020) yang telah melonggarkan pembatasan tersebut, terutama di antara Negara Anggota Schengen.

langsung di China dan tujuan utama lainnya di wilayah tersebut. Sedangkan Amerika Serikat telah mengalami peningkatan bertahap sejak Juni dengan penurunan kedatangan internasional yang relatif lebih rendah hingga Oktober. Ini mencerminkan dibukanya kembali banyak destinasi di kawasan

mencabut pembatasan perjalanan manakala kondisi aman untuk dilakukan, sangatlah penting."

Menurut dia, pelonggaran ini tidak hanya sekadar membuka ulang destinasi pariwisata, tetapi juga memerlukan aturan yang jelas dan konsisten antarnegara agar membantu dalam membangun kembali kepercayaan dalam perjalanan internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen," sambung Pololikashvili.

UNWTO juga mencatat, permintaan tetap lemah secara keseluruhan meskipun ada sedikit perbaikan di beberapa kawasan destinasi. Toh data tentang pengeluaran pariwisata internasional terus mencerminkan permintaan sangat lemah untuk perjalanan ke luar negeri. Namun, beberapa pasar besar seperti Amerika Serikat, Jerman dan Prancis telah menunjukkan beberapa tanda pemulihan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, permintaan pariwisata domestik terus tumbuh di beberapa pasar, termasuk Tiongkok dan Rusia.

Ke depan, pengumuman vaksin dan dimulainya vaksinasi diharapkan secara bertahap meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada saat yang sama, semakin banyak tujuan yang melonggarkan atau mencabut pembatasan perjalanan. Menurut penelitian terbaru dari UNWTO, proporsi destinasi tertutup turun dari 82 persen pada akhir April 2020 menjadi 18 persen saja pada awal November 2020 - menurut persentase kedatangan internasional.

Skenario kelanjutan untuk 2021-2024 yang disajikan oleh badan khusus PBB ini untuk pariwisata menunjukkan rebound pada paruh kedua 2021. Meskipun demikian, kembali ke level 2019 dalam hal kedatangan internasional masih memerlukan waktu antara dua setengah hingga empat tahun.

Nah, UNWTO menggambarkan, jutaan orang telah melewati kesempatan untuk menjelajahi berbagai tempat dan merangkul budaya dan adat istiadat yang berbeda lantaran Covid-19 masih merajalela. Dunia juga kehilangan peluang pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung bisnis, memulai pemban-



Di ujung lain spektrum, Asia dan Pasifik terus mencatat penurunan hampir 100% pada September dan Oktober, mencerminkan penutupan perbatasan antarnegara terus ber-

itu, termasuk negara-negara berkembang kepulauan kecil di Karibia.

Sekretaris Jenderal Pololikashvili menambahkan, "Pendekatan terkoordinasi untuk meringankan dan

gunan, dan untuk melindungi serta melestarikan warisan atau peninggalan di negeri masing-masing.

Namun, dalam menghadapi penurunan sektor ini, pariwisata mengakhiri tahun dengan lebih bersatu dan pasti dari beberapa bulan sebelumnya. Komite Krisis Pariwisata Global UNWTO, yang dibentuk pada Maret segera setelah pandemi diumumkan, di akhir tahun bertemu untuk menutup 2020 yang memilukan untuk pariwisata dunia.

UNWTO menyebut komite dengan platform lintas sektor yang unik ini mengoordinasikan upaya internasional dan telah terbukti sangat penting dalam memandu tanggapan terhadap Covid-19 dan menginformasikan langkah-langkah serta perangkat untuk mengurangi dampaknya terhadap kegiatan dan bisnis piknik ini.

Terlepas dari perkembangan pandemi yang baru dan sedang berlangsung, Komite mengarah pada upaya mempercepat dimulainya kembali pariwisata, dengan selalu mempertimbangkan situasi terkini dari kesehatan global. Protokol perjalanan yang selaras dan konsisten sangat penting untuk memulihkan kepercayaan dalam perjalanan internasional dan membuat pariwisata bergerak kembali.

UNWTO juga berkomitmen mempertahankan momentum 2020 hingga tahun baru. Antara lain, selama beberapa bulan terakhir, badan ini telah membuat para pemimpin politik dan bisnis mendengarkan dan menjadikan pariwisata sebagai bagian dari rencana mereka.

"Kami telah menekankan relevansi pariwisata untuk hampir setiap bagian dari masyarakat kami, yang terakhir diperkuat melalui kemitraan kami dengan CNN dan diperkuat melalui kunjungan langsung tingkat tinggi ke Negara Anggota termasuk Portugal, Tunisia, Namibia, Brasil, Uruguay, Mesir, Italia, Prancis, Belgia, dan Arab Saudi," ungkap Sekjen Pololikashvili.

Pendekatan gabungan ini, kata dia, berkontribusi untuk memastikan pariwisata telah mendapatkan dukungan finansial dan niat baik politik yang sangat tinggi dan dihargai dengan pengakuan publik. Komisi Eropa telah

memimpin jalan dalam mengubah kata-kata yang menggembirakan menjadi tindakan tegas, terutama dengan dukungan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pariwisata pada masa genting ini.

Melalui kunjungan langsung ke para pemimpin di Amerika, Afrika dan Eropa, dan dengan menyambut Wakil Presiden Komisi Eropa, Margaritis Schinas, untuk menyampaikan pertemuan terbaru Komite Krisis Pariwisata Global, kami sekarang menyerukan kepada pemerintah untuk berbuat lebih banyak. Untuk menunjukkan bahwa perjalanan internasional yang aman tidak hanya mungkin tetapi, mengingat manfaat sosial dan ekonomi yang

perjalanan mereka. Bersamaan dengan ini, pembatasan perjalanan harus dikurangi atau dicabut dengan cara yang bertanggung jawab dan terkoordinasi segera setelah aman dan memungkinkan.

Langkah penting yang dilakukan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dan menolak diam, menjadi prekursor untuk mempersiapkan tahun baru. 2021 bisa menjadi tahun yang kritis untuk memulai kembali pariwisata, tetapi hanya jika kita melanjutkan jalur ini.

Fondasinya ada untuk ini menjadi titik balik. Ini adalah momen untuk mengarahkan sektor kami menuju keberlanjutan dan inklusivitas yang



hanya dapat diberikan oleh pariwisata, juga penting.

Tanpa ragu, berita tentang vaksin melawan virus COVID-19 memberi kita alasan untuk optimisme yang berhati-hati. Namun, dimulainya kembali pariwisata - dan jutaan orang yang bergantung padanya - tidak sabar menunggu vaksinasi massal menjadi kenyataan.

Sekarang saatnya untuk memikirkan kembali aturan karantina bagi wisatawan. Untuk merangkul inovasi dan solusi baru untuk menguji pelancong sebelum atau sesudah

lebih besar dan menyadari potensinya yang sangat besar untuk memberikan pembangunan dan perubahan yang berkelanjutan untuk semua. Kita tidak bisa menyia-nyia kesempatan ini.

"Sekarang, saat kita berhenti sejenak dan merenung, saya mengirimkan ucapan selamat dari Madrid. Di manapun Anda berada, dan bagaimanapun Anda merayakannya, saya berharap Anda semua mendapatkan periode perayaan yang aman dan tenang," ucap Pololikashvili dari markas UNWTO di Spanyol menyambut Tahun Baru 2021. •



► Tanpa Protokol Covid-19

PARA PESOHOR VIRAL DI MEDIA SOSIAL

Sejumlah pesohor hadir di acara yang kabarnya merupakan ulang tahun pengusaha Ricardo Gelael. Beberapa dari mereka malah memuat foto-foto kerumunan

dalam pesta yang disebut-sebut berlangsung di Home Gelael, kawasan Prapanca, Jakarta Selatan.

Memuatnya di akun media sosial masing-masing, padahal acara Rabu malam, 13 Januari 2021 itu justru berlangsung saat pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat (PPKM). Sedangkan PPKM mengharuskan warga untuk menghindari kerumunan. Jadi, banyak yang menyesalkan kelakuan para pesohor itu

Tak ayal, setelah semakin viral di media sosial, reaksi negatif terhadap mereka yang hadir di acara itu bermunculan. Beberapa yang hadir dan mendapat sorotan antara lain adalah Raffi Ahmad. Hadir bersama istrinya, Nagita Slavina, banyak yang menyesalkan kemunculan Raffi di acara itu lantaran pada siang hari sebelumnya, ia menjadi semacam duta atau model penerima suntikan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Istana Negara.

Di acara itu Presiden Jokowi yang pertama menerima vaksin justru mengingatkan agar setelah vaksinasi tetap harus menerapkan protokol kesehatan berupa mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Eh malamnya Raffi malah berkerumun. Tanpa masker pula.

Rumah Tangga Istana Negara lantas menegur Raffi. Sadar akan kekeliruan-nya, Raffi pun memohon maaf terutama kepada Presiden Joko Widodo.

"Permohonan maaf dan klarifikasi





Terkait peristiwa tadi malam. Di mana saya terlihat berkumpul dengan teman-teman tanpa memakai masker dan tanpa jaga jarak,” ujar Raffi dalam unggahan Instagram resminya @raffinagita, Kamis, 14 Januari 2020.

“Pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, Sekretariat Presiden, KPC PEN, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut,” ujarnya. Raffi jujur mengakui bahwa peristiwa datang ke pesta dan tidak menjaga jarak pada Rabu malam merupakan murni keteledorannya.

Dia pun mengaku salah atas tindakannya itu. Ke depannya, Raffi berjanji akan lebih menaati protokol kesehatan, terutama menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

“Saya juga berharap teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia agar terus menjalankan protokol kesehatan, meskipun vaksinasi sedang berjalan. Vaksin dan protokol kesehatan adalah satu kesatuan,” kata Raffi.

Ayah satu anak ini pun menyampaikan terima kasih untuk warganet dan masyarakat yang sudah mengingatkan kekeliruannya. “Saya harap kita terus saling koreksi demi kesehatan



kita, orang-orang yang kita sayangi dan buat Indonesia,” ucapnya.

Pesohor lain yang memposting acara di Prapanca itu adalah Anya Geraldine. Namun, ia sudah menghapus unggahan foto ini setelah menuai reaksi keras dari netizen.

Toh tangkapan layar (screen shot) postingan Anya sudah terlalu viral. Terlihat dari tangkapan layar itu Anya berfoto dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Sean Gelael, dan Gading Marten. Tak seorangpun dari kelima orang ini yang mengenakan masker dan menjaga jarak.

Di bawahnya, terdapat tulisan, “Bener-bener @raffinagita1717 abis dikasih vaksin langsung nongkrong ga ada protokol kesehatan. Buang-buang jatah vaksin aja beb.” Entah tulisan Anya sendiri atau tambahan dari netizen, masih belum jelas.

Toh, bukan hanya pesohor di dunia seni yang hadir di acara itu. Komisaris Utama Pertama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tampak mengenakan masker.

Artis Aurelie mengunggah foto Ahok sedang bernyanyi dengan Once Mekel melalui fitur IG story. Keduanya tampak tak menggunakan masker saat itu. Ahok tampak mengenakan kemeja biru dan celana hitam.



Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak riang menikmati waktu bernyanyi duet bersama penyanyi Once Mekel di atas panggung yang diiringi keyboard tersebut. Aurelie pun sempat menyematkan akun instagram @basukibtp dan @oncemekellofficial yang mengkonfirmasi bahwa kedua orang tersebut benar Ahok dan Once.

Namun, tak berselang lama IG story Aurelie yang memperlihatkan hal tersebut dihapus. Toh tangkapan layar menunjukkan, meski mengenakan masker, Ahok melepasnya saat bernyanyi bersama vokalis Once Mekel. Istrinya, Puput Nastiti Devi, juga para tamu, lainnya seperti Aurelie Moremans, Gading Marten, dan komika Uus pun terlihat tidak mengenakan masker.

Istri Ahok, Puput Nastiti Devi juga membagi fotonya bersama Nagita Slavina dan Renata Kusumo, menantu tiri Ricardo Gelael. Ketiganya berfoto tanpa mengenakan masker. “Happy birthday,” tulis Puput pada unggahan foto ini.

Maka, hebohlah jagat maya. Lebih dari itu, polisi juga ikut mengurus soal kerumunan para pesohor di masa PPKM dengan rekor korban Covid-19 yang belum menunjukkan kecenderungan penurunan signifikan. Hadeuh... ●



MENYOAL PERTANIAN DI MASA WABAH COVID-19

Mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi kekinian, “Memperkuat Peran Sektor Pertanian dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 menjadi salah satu agenda penting sepanjang 2021. Bagaimana prospek sebenarnya?

Persoalan dengan tema besar itu sebenarnya adalah kurang menekankan pentingnya kebahagiaan, ya minimal peningkatan pendapatan petani. Mana mungkin sektor pertanian bisa maju dan menopang pertumbuhan ekonomi, terlebih di tengah pandemi Covid-19, jika yang mengerjakannya



kurang bahagia dan lebih tertarik meninggalkan kegiatan cocok-tanam karena hasilnya masih kalah dibandingkan dengan mencari nafkah di sektor lainnya.

Boleh jadi banyak yang kurang memperhatikan sepanjang tiga tahun terakhir, 2018-2020, terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, jumlah penduduk toh tetap naik terus.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 tercatat sekitar 33,4 juta petani yang bergerak di semua komoditas sektor pertanian. Angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah petani pada 2019 yang mencapai 34,58 juta. Pada 2018, jumlah petani masih tercatat 35,70 juta orang.

Presiden Jokowi mengetahui kondisi penurunan angka partisipasi pekerjaan



di bidang pertanian ini. Jadi, mungkin karena itu pula, dalam sambutannya ketika membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara pada Senin, 11 Januari 2021, ia menyinggung sedikit saja mengenai pentingnya peningkatan pendapatan yang pada gilirannya kesejahteraan dan kebahagiaan petani.

Padahal, sekitar 100 hari sebelumnya, Presiden Jokowi dengan tegas mengajak para pemuda tidak lagi malu dan gengsi untuk menjadi petani. Menurutnya, minat pemuda menjadi petani menjadi harapan sebagai langkah regenerasi profesi tersebut.

"Saya berharap keberadaan forum petani organik muda saat ini dapat mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk kembali bertani, tidak malu, tidak gengsi," kata Jokowi, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Di akhir Oktober tahun lalu itu Jokowi menuturkan, bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan pertanian organik melalui sejumlah inovasi. Inovasi itu mencakup seluruh proses industri pertanian mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, pengolahan, branding, pengemasan (packaging), hingga pemasaran.

"Saya yakin, jika pemuda ikut terjun melakukan inovasi pertanian maka Indonesia bisa terbebas dari impor pangan dan sebaliknya menjadi eksportir," ujarnya.

Nah, jika dengan inovasi pertanian dan impor-ekspor pangan, sambutan Presiden Jokowi di Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 memang masih

ada kaitannya. Dalam pembukaan rakernas, Presiden Jokowi antara lain menyinggung peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh.

Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional. "Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain," ujarnya dalam acara yang dihadiri oleh para anggota kabinet yang datang ke Istana dan juga kepala daerah seluruh Indonesia antara lain melalui jaringan online.

Tampak antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hadir pula para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang terhubung secara virtual.

Tentu saja sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pertanian serta para Kepala Dinas Pertanian lingkup kabupaten dan kota. Jumlah peserta yang hadir sekitar 1.300 orang secara tatap muka maupun daring yang berpusat dari Auditorium Utama

Ir. Sadikin Sumintawikarta, Kampus Pertanian Cimanggu, Bogor. Ya, sudah standardnya demikian kegiatan daring dan luring seperti ini demi mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19

Nah, terkait dengan masa pandemi saat ini, Presiden mengungkapkan sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius. "Kita tahu, FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan, hati-hati mengenai ini, hati-hati. Akibat pembatasan

membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.

"Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh," ujarnya.

Dalam pandangan Presiden Jokowi, permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang

ten, yakni meningkatkan produktivitas beserta program pendukung terkait peningkatan produktivitas.

Selain itu, Menteri SYL juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan. "Setiap provinsi harus ada pangan lokal seperti pisang, sagu, dan sorgum," ujarnya.

Lebih jauh, Mentan mengatakan, penetapan arah kebijakan pembangunan pertanian adalah pertanian maju, mandiri dan modern. Arah kebijakan menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat dan tepat untuk mencapai kinerja yang lebih maju sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.



mobilitas warga, dan bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala," ujarnya.

Presiden juga mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. "Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor. Tolong ini menjadi catatan dan segera dicari-cari desain yang baik agar bisa kita selesaikan," kata Presiden.

Ia menambahkan pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah

dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor.

Untuk itulah diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.

"Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas," tandas Presiden.

Sedangkan dalam laporannya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengemukakan bahwa Rakernas ini digelar dalam rangka penyusunan program kerja Kementerian Pertanian pada 2021. Pijakannya selalu konsis-

“
Arah kebijakan menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat dan tepat untuk mencapai kinerja yang lebih maju sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Antara lain mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan kemandirian nasional dan lokal, memanfaatkan kekinian teknologi atau modernisasi, mekanisasi dan korporasi dari hulu sampai hilir.

Tapi, sekali lagi, tolong peningkatan penghasilan yang pada gilirannya kesejahteraan dan kebahagiaan petani menjadi perhatian serius. Tanpa itu, semangat yang berminat mewujudkan penguatan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 -tema besar Rakernas kali ini, mungkin surut. Seperti jumlah petani kita sepanjang tiga tahun terakhir. ●



HARAPAN DATANG DARI PENGELOLA ANGGARAN

Yang mengelola anggaran maksudnya Kementerian Keuangan. Nah, dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2021, itu, pengelola anggaran yang angkat bicara adalah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Ia mengungkapkan bahwa anggaran ketahanan pangan 2021 meningkat sangat signifikan sebesar 30 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung turun. Tapi, bagaimana pula alokasinya?

Soal alokasi, Wamenkeu Nazara mengemukakan, anggaran tahun ini akan digunakan untuk program ketahanan pangan 2021 agar dapat meningkatkan produksi pangan, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi. "Kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai dengan 2020, trennya turun. Namun, kami akan membuat di 2021 meningkat. Kalau 2020 kemarin kami perkirakan hanya sekitar 80 triliun, maka di tahun 2021 akan menjadi 104 triliun," ujar Wamenkeu secara daring pada Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021.

Lebih jauh, Wamenkeu merinci, anggaran ketahanan pangan pada 2021 ini alokasinya antara lain untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp62,8 triliun dengan rincian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,7 triliun, dan Kementerian PUPR Rp34,3 triliun.

Untuk Non K/L, alokasi APBN 2021 untuk subsidi sebesar Rp25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp5,4 triliun. Sementara,

Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp5,6 triliun berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK non fisik dana pelayanan ketahanan pangan.

"Peningkatan anggaran 2021 cukup besar. Mohon bisa digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Kami mengharapkan nanti bisa dibangun sinergi yang baik antara (lintas) kementerian," kata Wamenkeu.

Selanjutnya, kata Nazara, kebijakan ketahanan pangan pada 2021 akan berfokus untuk mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Selain itu, Pemerintah juga akan merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.

Sedangkan pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan melalui pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi small farming. "Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar. Sektor pertanian adalah kunci kita, kunci dalam penciptaan tenaga kerja," ujar Wamenkeu.

Nanti dulu Pak Wamenkeu. Jumlah petani turun terus itu. Atau estate-estate itu yang akan menjadikan petani sebagai buruhnya? •



Pupuk subsidi.

KETIKA PRESIDEN MENYOAL PUPUK SUBSIDI

Bagus jugalah Presiden Jokowi menyinggung soal pupuk subsidi di Rakernas Pembangunan Pertanian 2021. Agar terbuka saja bagaimana sebenarnya.

Di Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 itu Presiden Jokowi juga menyoal hasil subsidi pupuk gelontoran pemerintah selama ini. Dalam sambutan di Rakernas, Jokowi menyebut setiap tahun pemerintah terus mengeluarkan dana untuk subsidi pupuk lebih dari Rp30 triliun.

"Pupuk, saya jadi ingat pupuk. Be-

rapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Tiga puluhan triliun (rupiah)? Berapa, Bu Menteri Keuangan? Rp33 triliun seingat saya, Rp33 triliun setiap tahun," ungkapnya.

Kepala Negara mempertanyakan hasil subsidi pupuk tersebut. Apabila diperhitungkan dalam sepuluh tahun pemerintah telah mengeluarkan uang

Rp330 triliun untuk bantuan tersebut.

"Return-nya apa? Kita beri pupuk itu, kembalinya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun. Saya tanya, kembaliannya apa? Lima tahun berapa triliun berarti? Sepuluh tahun sudah berapa triliun? Kalau sepuluh tahun sudah Rp330 triliun," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama,



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Presiden juga menyoroti masih banyak komoditas pangan yang kebutuhannya masih mengandalkan impor, seperti kedelai, jagung, hingga bawang putih. "Artinya tolong itu dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya berkali-kali meminta ini, itu lah cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju," ujar Jokowi.

Menurut dia, selain soal pupuk dan bibit, Kementerian Pertanian harus membuat pertanian dengan skala luas dan menggunakan teknologi. Sehingga, nantinya harga pokok produksi yang bersaing dengan negara lain. Jokowi memberi contoh dua komoditas yang impornya masih tinggi, yaitu kedelai dan bawang putih. Ia mengatakan dua komoditas itu bisa tumbuh di Indonesia, namun petani enggan menanamnya.

"Karena problem dari dulu sampai sekarang, kenapa kedelai yang di In-

donesia bisa tumbuh baik, kenapa petani kita tidak mau tanam, karena harganya kalah dengan kedelai impor," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, harga pokok produksi kedelai lokal masih lebih tinggi ketimbang harga impor. Karena itu, perlu produksi dalam jumlah besar agar harga kedelai lokal bisa bersaing dengan harga kedelai impor.

Persoalan sama juga terjadi pada bawang putih. Jokowi mengatakan Indonesia sempat banyak memproduksi bawang putih. Namun, sekarang, petani juga tidak mau menanam komoditas tersebut karena harganya tidak bisa bersaing dengan bawang putih impor.

"Wonosobo, dulu bawang putihnya banyak, di NTB bawang putihnya banyak, kenapa tidak bisa perluas agar bisa kalahkan harga impor, ada competitive

pricenya. kalau harga tidak kompetitif, akan sulit kita bersaing," ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi menegaskan perlunya ada solusi pada persoalan ini agar harga pokok produksi komoditas di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. "Ini baru benar. Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, maka ada yang salah, ada yang enggak benar di situ."

Jokowi menghargai adanya pertumbuhan ekspor yang baik di sektor pertanian selama masa pandemi ini. Namun, ia mengatakan ekspor itu meningkat hanya pada komoditas sawit, bukan komoditas yang disuntik subsidi pupuk.

Saat ini, guna menggenjot ketahanan pangan, pemerintah tengah membangun lumbung pangan alias food estate di Sumatera Utara dan Ka-

limantan Tengah guna menggenjot ketahanan pangan. Apabila berhasil, program tersebut akan diperluas ke wilayah lain.

"Jadi, saya minta betul-betul di lapangan diikuti, sehingga nantinya lumbung pangan yang kita bangun bisa benar. Provinsi lain akan kita dorong dengan dana APBN, tapi harus ada return ekonomi yang diberikan kepada negara," ujar Jokowi.

Menyoal pupuk subsidi sambil memberikan penghargaan terhadap sumbangan ekspor hasil perkebunan sawit sebenarnya saling berkaitan. Alasannya, studi Bank Dunia justru menunjukkan, salah satu penyebab kegagalan penerapan pupuk subsidi adalah merembesnya pupuk subsidi yang harganya lebih murah ke perkebunan sawit yang seharusnya membeli pupuk dengan harga industri, tentu

subsidi adalah gas alam di ladang-ladang migas. Sialnya, Bank Dunia justru menilai subsidi energi dan pupuk oleh pemerintah Indonesia dinilai tidak maksimal dan salah sasaran.

Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn mengatakan subsidi energi justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, bukan masyarakat kelas bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga jenis subsidi energi yang dimaksud, yaitu diesel (solar), LPG, kerosin, dan listrik (450-900 VA).

"Pihak yang menikmati subsidi diesel, LPG, dan listrik justru sebagian besar dari kelas menengah ke atas. Pemerintah Indonesia seharusnya mengubah 30 persen dari total subsidi menjadi cash transfer [bantuan tunai langsung/BLT] kepada 40 persen kelompok terbawah," ujarnya dalam

erima subsidi, misalnya perkebunan kelapa sawit.

Kecuali perkebunan sawit, Bank Dunia juga menghitung, subsidi pupuk oleh pemerintah yang seharusnya untuk petani gurem hanya 60 persen saja benar-benar dinikmati mereka. "Dari subsidi yang disediakan pemerintah, 40 persen dinikmati oleh petani yang sejahtera," ungkapnya.

Dibandingkan dengan memberi pupuk secara langsung, Ralph justru menyarankan pemerintah mengubah bentuk subsidi kepada petani. Salah satu caranya, yaitu dengan memberikan akses bagi petani untuk mempelajari teknologi pertanian demi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Hal tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi petani yang ingin mengembangkan usahanya dan lebih tepat sasaran ketimbang memberikan subsidi pupuk. "Reformasi dalam pemberian subsidi dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan," jelasnya.

Nah, boleh jadi Presiden menyoal pupuk subsidi dalam Rakernas Pembangunan Pertanian terkait pengurangan volume pupuk subsidi dalam tiga tahun terakhir. Per 2018 volumenya masih 9,55 juta ton, selanjutnya pada 2019 turun menjadi 8,6 juta ton. Alokasi turun lagi menjadi 7,9 juta ton pada 2020.

Namun, pada 2021, dengan berbagai pertimbangan, volume pupuk subsidi naik sedikit dari tahun lalu. Subsidi pupuk 2021 tercatat mencapai volume 8,2 juta ton meskipun secara keseluruhan anggaran pertanian malah meningkat signifikan.

Dalam paparan Wakil Menteri Keuangan di Rakernas itu anggaran bidang pertanian dan ketahanan pangan pada 2021 justru meningkat menjadi Rp104 triliun dari Rp80 triliun pada 2020. Yang menarik, anggaran pertanian terbesar untuk kementerian dan lembaga justru untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp34,3 triliun. Alokasi untuk Kementerian Pertanian tercatat Rp21,8 triliun. Irigasi, jalan, dan teknologi pertanian agaknya memang mendapat perhatian lebih. ●



dengan harga lebih mahal.

Bank Dunia menyebut sekitar 30 persen pupuk subsidi merembes ke perkebunan sawit. Jadi, jika menyandingkan perhitungan Presiden bahwa selama 10 tahun pemerintah menyalurkan Rp330 triliun biaya untuk pupuk subsidi, sekitar 30 persen menurut Bank Dunia atau setara dengan sekitar Rp100 triliun justru membantu penghematan biaya pupuk di sektor perkebunan, terutama sawit yang meliputi areal paling luas di Indonesia.

Bank Dunia mengelompokkan subsidi pupuk dengan subsidi energi. Boleh jadi karena bahan baku pupuk

Media Briefing Online: Public Expenditure Review World Bank, Senin, 22 Juni 2020 lalu

Berdasarkan laporan Bank Dunia, masyarakat miskin dan rentan yang menerima subsidi kerosin (minyak tanah) dan LPG hanya 21 persen. Sementara itu, subsidi solar yang tepat sasaran hanya dinikmati sekitar tiga persen dan subsidi listrik 15 persen.

Selain sektor energi, Ralph juga mengungkapkan subsidi pupuk oleh pemerintah justru tidak berdampak pada kesejahteraan petani. Justru 30 persen dari total subsidi pupuk justru bocor ke pihak yang bukan target pen-

SEMOGA KEBUN SAWIT BERHENTI MENILAP PUPUK SUBSIDI

Luar areal perkebunan sawit selama tiga tahun terakhir memang meningkat pesat. Apakah peningkatan ini akan memicu peningkatan rembesan subsidi, yang menurut Bank Dunia dapat mencapai 30 persen dari total volume pupuk harga petani itu, masih perlu menunggu waktu pembuktiannya.

Toh sepanjang tiga tahun terakhir, areal perkebunan sawit di Indonesia memang meningkat. Data resmi BPS menunjukkan pada 2017 luas areal perkebunan sawit baru mencapai 12,38 juta hektare. Angka ini meningkat pesat pada 2018 menjadi 14,32 juta ha. Naik lagi sedikit pada 2019 menjadi 14,72 juta ha. Peningkatan pesat terjadi lagi pada 2020 sehingga total luas perkebunan sawit tahun lalu tercatat hingga 16,38 juta ha.

Dari 16,3 juta ha perkebunan sawit di Indonesia per 2020, Riau menempati posisi pertama seluas 3,387 juta ha atau sekitar 20 persen. Selanjutnya, Sumatera Utara 2,079 juta ha atau 12,69 persen. Sedangkan Kalimantan Barat seluas 1,807 juta ha atau sekitar 11 persen. Dalam persentase yang hampir sama dengan Kalbar, menyusul kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Dari sisi pengelolaan, sebagian besar areal tersebut, menurut data 2018, sekitar 55,09 persen, merupakan kelolaan swasta, kemudian perkebunan rakyat mencapai 40,62 persen. Perkebunan besar negara menempati urutan terendah hanya

sekitar 4,29 persen luas total perkebunan sawit.

Terkait dengan kebutuhan pupuk, bandingkan saja luas areal perkebunan sawit dengan luar persawahan di Indonesia. Luas lahan persawahan di Indonesia justru turun dari tahun ke tahun. Pada 2013, lahan baku sawah Indonesia masih tercatat 7,75 juta ha. Pada 2020 luasnya tinggal 7,46 juta ha.

Jadi, sangat masuk akal jika pupuk subsidi merembes ke perkebunan kelapa sawit. Untuk tanaman sawit produktif, pasokan ideal pupuknya dapat mencapai tiga kg per batang pohon dalam setahun. Sedangkan jumlah ideal tanaman sawit adalah 128-130 batang per ha. Jadi, setiap ha kebun sawit memerlukan sekitar 390 kg pupuk urea per tahun. Nah, dengan luas lahan sawit 15 juta ha saja, perlu pasokan pupuk hingga 5,85 juta ton pupuk.

Untuk tanaman padi, jika dua kali tanam per tahun perlu sekitar 600 kg pupuk urea per ha. Dengan luasan lahan sawah 8 juta ha pun kebutuhan pupuk urea per tahun hanya 4,8 juta ton. Katakanlah jika musim ketiga menanam palawija atau tanaman pangan lainnya, kebutuhan pupuk subsidi petani berkisar 7,2 juta ton per tahun. Hitung-hitungan kasar memang.

Yang jelas, pada 2020, APBN menganggarkan subsidi 8,2 juta ton pupuk. Jika hitungan Bank Dunia pas 30 persen merembes keluar, maka sekitar tiga juta ton pupuk subsidi akan tercecer ke mana-mana. Semoga perkebunan sawit berhenti menilap pupuk subsidi. ●



DESPOT

Gunawan Effendi

Despotisme baru. Istilah ini terasa semakin viral dan menjadi wacana, terutama di komunitas akademik maupun politik praktis di Indonesia belakangan ini.

Sebenarnya despotisme baru adalah judul sebuah buku tulisan John Keane. Aslinya berjudul *The New Despotism* yang terbit pertama pada Mei 2020 lalu. Kabarnya buku itu mendapat penghargaan terbaik 2020 dari Australian Book Review.

Tak mengherankan jika *The New Despotism* John Keane populer di Australia. Cetak ulang buku itu muncul pada Desember 2020. Buku ini semakin memperkuat posisi Keane sebagai pemikir politik. Di mata saya, pemikiran politik barat tentunya.

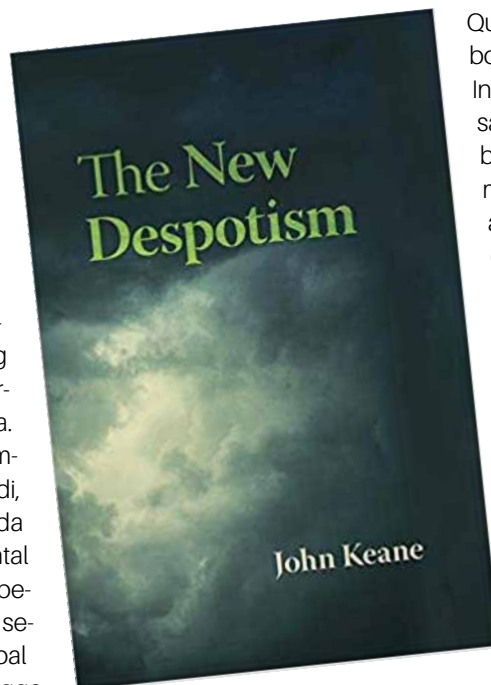
Keane sendiri merupakan seorang profesor. Ia guru besar ilmu politik di University of Sydney Australia dan Wissenschaftszentrum Berlin Jerman. Yang terakhir ini adalah lembaga penelitian terbesar di bidang sosial-politik di Uni Eropa. Sedangkan buku *The New Despotism* nya terbitan Harvard University AS. Jadi, Prof Keane yang kelahiran Australia pada 3 Februari 1949 itu memang sangat kental pemikiran baratnya. Namanya sebagai pemikir politik barat, tentu saja demokrasi sebagai intinya, memang sudah mengglobal.

Nah, di Indonesia, yang menjadi tetangga dekat Australia di utara, pemahaman tentang despotisme baru itu juga viral belakangan ini. Apalagi banyak putra-putri Indonesia yang beajar di sana. Bukan belakangan ini saja. Malah sejak zaman Colombo Plan berkibar pada 1950-an sudah banyak putra-putri Indonesia belajar di Negeri Kanguru itu, hingga sekarang. Para alumninya menyebar baik di pemerintahan maupun swasta, yang mendukung pemerintah maupun pengkritisnya.

Mengapa saya perlu menyebut yang mendukung maupun mengkritisi pemerintah, seperti membuat polarisasi dikotomi? Ini ada kaitannya dengan wacana despotisme baru yang viral di media sosial belakangan. Yang membuat viral wacana despotisme baru di Indonesia tampak-

nya adalah tulisan Dr Airlangga Pribadi Kusman dan Dr Milda Istiqomah berjudul "Indonesia's New Despotism". Nama penulisnya Indonesia sekali.

Tulisannya muncul di situs Melbourne Asia Review yang menjadi kelolaan Asian Institute, sebuah lembaga pendidikan dan penelitian di University of Melbourne. Direktur Asian Institute adalah Prof Vedi R Hadiz, nama Indonesia juga.



Dari pemikiran Keane di Sydney, di Queensland ke Asian Institute di Melbourne, Victoria, lantas sampai pula ke Indonesia. Dari Sydney ke Melbourne saja hampir 900 kilometer. Dari Melbourne ke daratan terdekat Indonesia malah hampir 4.000 km. Tapi, apalah arti jarak untuk menyampaikan gagasan ketika Revolusi Industri 4.0 berbasis teknologi informasi dan komunikasi sudah berlanjut.

Begitulah. di artikel Despotisme Baru Indonesia, terbentang pengertian istilah itu dengan contoh-contoh nyatanya. Mengutip Prof Keane, despotisme mutakhir ini adalah "a new type of pseudo-democratic government led by rulers skilled in the art of manipulating and meddling with people's lives, marshalling their support, and winning with their conformity."

Dengan berani Dr Airlangga dan Dr Milda menulis bahwa tiga tahun terakhir pemerintahan Jokowi menunjukkan kecenderungan untuk mengatasi kontradiksi antara reformasi kelembagaan dan kepentingan oligarki, yang mengarah pada despotisme baru yang merayap. Metodanya, menggunakan kekuasaan, penerapan hukum, dan mobilisasi media untuk menciptakan musuh yang menjadi target, dan tentu saja menegasikan demokrasi.

Mungkin muncul pertanyaan apa padanan despot dalam bahasa. Tapi, bagi saya, yang lebih penting, apakah kita mau membiarkan atau memperbaiki despotisme baru di Indonesia ini? Secara akademis maupun politik praktis. ●

info indonesia

www.infoindonesia.id



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
INFO
kepada
masyarakat

**ALAMAT REDAKSI/
IKLAN/PEMASARAN:**
JL. RAYA KALIBATA NO. 8,
JAKARTA SELATAN 12750
TELP / FAX : 021-79196781/
021-79196786

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

Ir Budi Gunadi Sadikin ChFC CLU

Kesehatan Pulih Dulu, Baru Ekonomi Menyusul



Rp. 50.000,- Jabotabek
Rp. 75.000,- Luar Pulau